



LAPORAN KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 yang merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025 yang telah tertuang pada Rencana Strategis 2025-2029.

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo tertuang perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo Tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja juga menjadi salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi acuan dalam upaya perbaikan secara berkelanjutan dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo pada tahun-tahun selanjutnya.

Bungo, 26 Februari 2026

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Bungo



Pernanda Sapryanoki, S.Farm, Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPOM, stakeholder dan masyarakat. Laporan Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Bungo tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang terdiri dari 7 sasaran strategis dengan 25 indikator kinerja.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator	Target Tahunan	% Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	106,02	Sangat Baik 
		2 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	126,40 dinormalisasikan 110	Sangat Baik 
		3 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	NA
		4 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	108,82	Sangat Baik 
		5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	105,24	Sangat Baik 
		6 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	117,17 dinormalisasikan 110	Sangat Baik 
		7 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	104,62	Sangat Baik 
		8 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	108,54	Sangat Baik 
		9 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,39	115,86 dinormalisasikan 110	Sangat Baik 
		10 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	119,05 dinormalisasikan 110	Sangat Baik 

	11	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	101,61	Sangat Baik	
	12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5	104,09	Sangat Baik	
	13	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	25	100	Baik	
2	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,83	103,14	Sangat Baik	
	15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	100	Baik	
	16	Jumlah desa pangan aman	1	100	Baik	
	17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	100	Baik	
3	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17,24	100	Baik	
4	19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	93	107,53	Sangat Baik	
5	20	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	90	106,48	Sangat Baik	
6	21	Layanan Publik UPT yang prima	4,4	109,55	Sangat Baik	
7	22	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	78,39	96,64	Baik	
	23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	100	Baik	

24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55	102,94	Sangat Baik	
25	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	Baik	

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan berdasarkan capaian per indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja memperoleh nilai dengan kategori Sangat Baik Yang sudah dinormalisasikan menjadi 110%, yaitu:
 - IKU 2 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai 126,40%
 - IKU 6 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai 117,17%
 - IKU 9 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan nilai 115,86%
 - IKU 10 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan nilai 119,05%
2. Indikator Kinerja memperoleh nilai dengan kategori Sangat Baik ($100\% < x \leq 110\%$), yaitu:
 - IKU 1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai 106,02%
 - IKU 4 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai 108,82%
 - IKU 5 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan nilai 105,24%
 - IKU 7 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai 104,62%
 - IKU 8 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai 108,54%
 - IKU 11 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dengan nilai 101,61%

- IKU 12 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan nilai 104,09%
- IKU 14 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan nilai 103,14%
- IKU 19 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan nilai 107,53%
- IKU 20 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan nilai 106,48%
- IKU 21 Indeks Pelayanan Publik UPT dengan nilai 109,55%
- IKU 24 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM dengan nilai 102,94%

3. Indikator Kinerja memperoleh nilai dengan kategori Baik (= 100%), yaitu:

- IKU 13 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan nilai 100%
- IKU 15 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan nilai 100%
- IKU 16 Jumlah desa pangan aman dengan nilai 100%
- IKU 17 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan nilai 100%
- IKU 18 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan nilai 100%
- IKU 22 Nilai AKIP UPT BPOM dengan nilai 96,64%
- IKU 23 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM dengan nilai 100%
- IKU 25 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT dengan nilai 100%

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo didukung anggaran APBN pada awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. Rp3.572.436.000-. Pada Bulan Maret 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo

mendapat tambahan anggaran Belanja Barang yang diperuntukkan untuk Honor PPNPN sebesar Rp 30.000.000,-. Sehingga total anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo pada Triwulan I menjadi Rp 3.602.436.000, pada tanggal 1 Juli 2025 Loka POM mendapatkan anggran kembali mendapat tambahan anggaran Belanja Barang sebesar Rp. 137.277.000,- Sehingga total anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo hingga Triwulan IV menjadi Rp 3.739.713.000,-. Realisasi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah Rp 2.851.124.974,- atau 76.24% berdasarkan total keseluruhan anggaran yang termasuk dengan pagu blokir sebesar Rp 888.142.000. Dalam hal realisasi anggaran terhadap ketersediaan dana hingga akhir tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo mencapai 99,94%.

Secara garis besar, Loka POM di Kabupaten Bungo telah berhasil mencapai target pada tahun 2025. Namun dalam pencapaian ini masih ditemukan kendala antara lain:

1. Kurangnya jumlah tenaga pengawas inspeksi dan sertifikasi dibandingkan dengan jumlah sarana yang menjadi target Loka POM di Kabupaten Bungo.
2. Adanya kebocoran informasi dalam kegiatan penindakan tindak pidana Obat ilegal oleh oknum ekspedisi.
3. Penguasaan teknologi informasi pelaku usaha masih terbatas
4. Adanya efisiensi anggaran yang berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan tupoksi.
5. Pengelolaan kinerja anggaran yang belum optimal. Halaman III DIPA belum dilakukan perencanaan secara maksimal.
6. Pengambilan sampel yang belum sesuai dengan pedoman sampling dan terjadi beberapa kali kesalahan pengiriman sampel yang tidak sesuai dengan balai tujuan.

Loka POM di Kabupaten Bungo berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir Tahun 2025. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025, telah dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain yaitu:

- a. Mengoptimalkan pengumpulan data kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala melalui monitoring capaian kinerja, agar dapat mengantisipasi semua kendala dan hambatan dan menentukan langkah-langkah perbaikan;
- b. Melakukan penyesuaian kegiatan dan anggaran mengikuti adanya kebijakan efisiensi anggaran.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dan stakeholder terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo.

Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Bungo perlu meningkatkan efektivitas edukasi dan sosialisasi guna menjangkau masyarakat secara lebih luas serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pengawasan produk yang dikonsumsi. Upaya ini dapat diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat, lintas sektor, serta pelaku usaha dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo. Hal ini akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi Loka POM di Kabupaten Bungo. Loka POM di Kabupaten Bungo berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

HIGHLIGHT

2025

LAPAK POM SAPAKAT



Melaksanakan kegiatan penyebaran informasi Obat dan Makanan aman dan LAPAK POM SAPAKAT di Pasar Beduk Kabupaten Bungo Senin, 03 Maret 2025. LAPAK POM SAPAKAT merupakan program inovasi Loka POM di Kabupaten Bungo semenjak tahun 2023 guna menjangkau lebih banyak Masyarakat untuk mendapatkan layanan publik dengan lebih mudah dan cepat. Dilaksanakannya Dimana Petugas melakukan pemajangan produk Obat dan Makanan yang Illegal, rusak, dan mengandung bahan berbahaya.

Petugas juga memberikan layanan konsultasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat yang berkonsultasi terkait Obat dan Makanan Aman. Kegiatan ini diiringi dengan pelaksanaan pengujian sampling bersama tim pengujian untuk pengecekan produk pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya di pasar beduk Harapannya pelaksa KIE dan Layanan Publik ini dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha yang terkendala jarak untuk mendapatkan informasi dan pengaduan terkait obat dan makanan dan memberikan edukasi serta pengetahuan kepada pengunjung di pasar beduk.

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Merangin



Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo sebagai upaya mendekatkan layanan pengawasan obat dan makanan kepada masyarakat. Kehadiran ini merupakan bagian dari komitmen Loka POM dalam mendukung Reformasi Birokrasi, khususnya pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Partisipasi Loka POM dalam MPP tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di masing-masing kabupaten selaku penyelenggara MPP. Melalui layanan terpadu ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan, meliputi konsultasi dan permintaan informasi, penyampaian pengaduan, layanan sertifikasi obat dan makanan, serta fasilitasi perbaikan Corrective Action Preventive Action (CAPA) pada sarana yang menjadi objek pengawasan.

Kehadiran Loka POM di MPP Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo diharapkan dapat semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pengawasan obat dan makanan dalam satu lokasi pelayanan terpadu. Selain itu, kegiatan ini mencerminkan implementasi Reformasi Birokrasi berkelanjutan melalui pelayanan publik yang kolaboratif, inklusif, dan responsif. Loka POM di Kabupaten Bungo berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan secara rutin sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.

KIE Pencegahan Stunting melalui Gizi Seimbang dan Keamanan Pangan



19 Juni 2025, Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bertema gizi seimbang dan keamanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap upaya pencegahan stunting. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Pelepat dengan sasaran orang tua dengan anak berisiko stunting, calon pengantin, serta kader KB dan kader stunting. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah kecamatan dan Balai Penyuluh KB.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya penerapan gizi seimbang, pemilihan pangan yang aman, pemahaman label pangan olahan, serta penerapan higienitas dalam pengolahan dan penyimpanan makanan. Kegiatan dilaksanakan secara interaktif melalui diskusi dan tanya jawab, sehingga meningkatkan partisipasi dan pemahaman peserta. Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam penerapan gizi seimbang dan keamanan pangan sebagai upaya berkelanjutan dalam pencegahan stunting di Kabupaten Bungo.

Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan dan Pengendalian Resistensi Antimikroba



18 Juni 2025, Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Bungo melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan pengawasan obat dan makanan. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan kolaborasi Pentahelix yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, dan media massa dari empat wilayah kerja, yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh, guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam perlindungan kesehatan masyarakat.

Melalui forum ini dilakukan evaluasi bersama terhadap standar pelayanan Loka POM serta pembahasan isu strategis pengawasan obat dan makanan, termasuk optimalisasi pendampingan UMKM pangan, peningkatan sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha, dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan penanganan produk berisiko. Kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai pengendalian resistensi antibiotik dan menghasilkan sejumlah rekomendasi, termasuk penguatan kebijakan daerah. Secara keseluruhan, FKP menghasilkan komitmen bersama untuk meningkatkan standar pelayanan Loka POM dan mendukung pengendalian resistensi antimikroba secara berkelanjutan.

Penyebaran Informasi Pameran dalam Rangka HUT Kabupaten Bungo ke 60



Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Bungo turut berpartisipasi dalam Pameran Pembangunan Bungo Expo 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Kabupaten Bungo. Pada kegiatan tersebut, Loka POM menyelenggarakan pameran Obat dan Makanan Aman sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih, menggunakan, dan mengonsumsi obat serta pangan yang aman dan sesuai ketentuan. Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan MTQ Baru dan berlangsung meriah selama periode 19 hingga 25 Oktober 2025.

Melalui pameran ini, Loka POM di Kabupaten Bungo memberikan informasi dan edukasi terkait keamanan obat dan makanan, termasuk pengenalan ciri produk yang memenuhi standar, pemahaman label, serta pencegahan peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan. Partisipasi Loka POM dalam Bungo Expo 2025 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keamanan obat dan makanan, sekaligus memperkuat peran Loka POM dalam mendukung perlindungan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bungo.

Joins Inspection



Pada tanggal 02 Desember 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo melakukan melakukan Kegiatan Joint Inspection Bersama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo dalam rangka pengendalian resistensi antimikroba pada sektor pengobatan hewan.

Launching Program Ayo Buang Sampah Obat (ABSO)



Program Ayo Buang Sampah obat (ABSO) di Kabupaten Bungo resmi diluncurkan pada Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 di Lapangan MTQ Baru Kabupaten Bungo pada Minggu 23 November 2025. Program ini diresmikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Bungo, Bapak Tri Wahyu Hidayat. Peresmian Program ABSO ditandai dengan pembuangan sampah obat secara simbolis oleh Kepala Loka Kabupaten Bungo bersama Wakil Bupati Kabupaten Bungo, Forkopimda, Pemerintah Daerah, Ketua PC IAI Kabupaten Bungo, Ketua DWP Loka POM Kabupaten Bungo serta perwakilan dari Apotek Kimia Farma dan Apotek K-24.

Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Natal dan Tahun Baru 2026



Dalam rangka pengawalan keamanan pangan bagi masyarakat menjelang Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, Loka POM di Kabupaten Bungo perlu melakukan Intensifikasi Pengawasan Pangan (Inwas) untuk memastikan produk pangan aman dan bermutu di peredaran. Kegiatan pengawasan dilakukan di sarana distribusi pangan olahan seperti distributor, Toko, Grosir, Swalayan, Minimarket dan Pasar Tradisional di wilayah Kabupaten bungo, Kabupaten Merangin, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Kerinci. Sasaran pengawasan pangan tanpa izin edar (TIE), rusak (kemasan robek/penyok, kaleng berkarat dan lain-lain) serta pangan kadaluarsa

PENGHARGAAN

Peringkat ke-3 Kategori Nilai IKPA Terbaik Pagu Sedang 3 s.d. 8 Miliar periode Triwulan III Tahun 2025



Pada Periode Triwulan III Tahun 2025, satuan kerja Loka POM di Kabupaten Bungo berhasil meraih Peringkat 3 Nilai IKPA Terbaik Pagu 3 s.d. 8 Miliar sebagai bentuk pengakuan atas kinerja unggul dalam pelaksanaan anggaran. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara optimal, tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencerminkan kualitas perencanaan, ketepatan penyerapan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas penyelesaian tagihan dan pengelolaan kas.

Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, memperbaiki aspek-aspek yang masih perlu disempurnakan, dan menargetkan capaian yang lebih baik pada periode berikutnya.

Peringkat ke-4 Kategori Implementasi Digitalisasi Pembayaran Cash Management System (CMS) Periode Triwulan III tahun 2025



Pada periode Triwulan III tahun 2025, satuan kerja Loka POM di Kabupaten Bungo meraih penghargaan Peringkat ke-4 Kategori Digitalisasi Pembayaran Cash Management System (CMS). Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung transformasi digital pengelolaan keuangan serta optimalisasi pemanfaatan perbankan berbasis elektronik.

Penilaian kategori ini mencerminkan tingkat pemanfaatan CMS dalam proses transaksi keuangan, ketepatan dan kecepatan pelaksanaan pembayaran, serta kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Implementasi CMS secara konsisten telah meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan kesalahan manual, serta mempercepat proses rekonsiliasi dan pelaporan keuangan.

Peringkat ke-1 Kategori Nilai IKPA Terbaik Pagu kurang dari 5 Miliar Periode Tahun 2025



Pada Tahun Anggaran 2025, satuan kerja Loka POM di Kabupaten Bungo berhasil meraih penghargaan Peringkat ke-1 kategori Nilai IKPA terbaik Pagu kurang dari 5 miliar, yang mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran sudah dilakukan dengan sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh indikator dalam komponen penilaian IKPA telah dikelola secara optimal dan konsisten sepanjang tahun berjalan.

Peringkat ke-2 kategori Nilai IKPA Indikator Deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) Periode Tahun 2025



Pada Tahun Anggaran 2025, satuan kerja Loka POM di Kabupaten Bungo berhasil meraih penghargaan Peringkat ke-2 kategori Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA Terbaik periode Tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran telah dikelola secara optimal dan berada pada kategori sangat baik.

Peringkat ke-3 kategori Nilai IKPA Indikator Deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) Periode Triwulan III Tahun 2025



Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja anggaran pada periode Triwulan III Tahun 2025, Loka POM di kabupaten Bungo berhasil meraih Peringkat ke-3 dalam Kategori Nilai IKPA Indikator Deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada periode Triwulan III Tahun 2025. Capaian ini mencerminkan komitmen dan konsistensi dalam menyusun Rencana Penarikan Dana yang akurat, tepat waktu dan selaras dengan target pelaksanaan.

Penilaian pada Indikator RPD Halaman III DIPA menitikberatkan pada ketepatan penyampaian rencana penarikan dana, kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta kualitas pengelolaan revisi anggaran.

Keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran, sehingga ke depan dapat mencapai hasil yang lebih optimal serta mempertahankan kinerja yang telah dicapai.

Predikat Pelayanan Prima dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP)



Sebagai upaya menjalankan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, BPOM selaku instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik terkait pengawasan Obat dan Makanan berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) secara mandiri. Pelaksanaan PEKPPP BPOM mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana diubah pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang PEKPPP, yang secara teknis kembali diatur pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan evaluasi melalui penilaian terhadap 6 (enam) aspek pelayanan yang diselenggarakan oleh masing-masing UPP. Aspek penilaian tersebut meliputi: 1) Kebijakan Pelayanan; 2) Profesionalisme SDM; 3) Sarana Prasarana; 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik; 5) Konsultasi dan Pengaduan; dan 6) Inovasi. Pelaksanaan PEKPPP BPOM 2025 dilakukan dengan metode pengisian kuesioner melalui aplikasi evortalapom.go.id yang disesuaikan dengan instrumen pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP, serta dilakukan wawancara dan verifikasi data secara daring. Pada tahun 2025, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Loka POM di Kabupaten Bungo mencapai nilai 4,82 dengan kategori A (Pelayanan Prima). Capaian ini melampaui target IPP tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 4,40 dengan kategori A (Sangat Baik), sehingga menunjukkan keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Predikat “Informatif” pada Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan POM.



Salah satu bentuk penguatan keterbukaan informasi publik di bidang Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di Lingkungan BPOM Tahun 2023 terhadap 106 PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Besar/Balai POM, dan Loka dengan kriteria Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif dan Tidak Informatif. Monitoring ini dilakukan oleh PPID BPOM untuk memonitor dan memantau PPID Pelaksana. Dilaksanakan sepanjang Anggaran tahun berjalan dan dilakukan pendampingan terhadap PPID Pelaksana melalui Tim Monitoring dan Evaluasi. Aspek penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) antara lain terkait pengelolaan Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, Loka POM di Kabupaten Bungo, setelah dilakukan Monev didapatkan predikat “Informatif” dengan bobot 97,97 dimana mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025 dengan rincian SAQ bobot 100, Penyajian 97,17, Komitmen penerapan 94, Inovasi 91,67, dan Kolaborasi 91,33.

Loka terbaik 2 pada katagori tindak lanjut Rekomendasi cegah tangkal Kejahatan Obat dan Makanan.



Pada Tahun Anggaran 2025, satuan kerja Loka POM di Kabupaten Bungo berhasil meraih penghargaan Loka Terbaik ke-2 pada Katogori Tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan diberikan pada Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan "Penguatan Strategi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dalam Upaya melindungi Kesehatan Masyarakat pada tanggal 30 Juni 2025.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
HIGHLIGHT.....	ix
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
DAFTAR GRAFIK	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	6
1.4 ISU STRATEGIS.....	10
1.4.1 ISU INTERNAL	11
1.4.2 ISU EKSTERNAL.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA	15
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).....	19
2.3 PERJANJIAN KINERJA	21
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	25
2.5 METODE PENGUKURAN.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	34
a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Bersangkutan	35
b. Perbandingan Realisasi Serta Capaian Tahun Sebelumnya (2021 – 2025).....	38
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra	43
d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding	45
3.1.1 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.....	48
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA	208
3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	226
3.4 REALISASI ANGGARAN	227
BAB IV PENUTUP	249
3.1 KESIMPULAN.....	249
3.2 KENDALA.....	250
3.3 REKOMENDASI	251

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	iii
Tabel 3. Data Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan	7
Tabel 4. Data Jumlah Pegawai ASN yang telah Menduduki Jabatan	7
Tabel 5. Luas wilayah masing-masing Kabupaten/Kota	8
Tabel 6. Jumlah kecamatan dan desa di masing-masing Kabupaten/Kota.....	8
Tabel 7. Jumlah penduduk wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo (Sumber : Data BPS)	9
Tabel 8. Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo.....	9
Tabel 9. RKT Loka POM di Kabupaten Bungo.....	19
Tabel 10. Indikator Kategori Capaian Kinerja	33
Tabel 11 Capaian per Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025.....	34
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Indikator terhadap Target Tahun 2025.....	35
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Serta Capaian Tahun Sebelumnya (2021 – 2025).....	38
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra.....	43
Tabel 15. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 antara 4 Loka POM yang sudah ditentukan	45
Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024.....	48
Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	50
Tabel 18. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	53
Tabel 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra.....	54
Tabel 20. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	54
Tabel 21 Analisis Rekomendasi Presentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	56
Tabel 22 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	57
Tabel 23. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57
Tabel 24 Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	58
Tabel 25. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	58
Tabel 26 Analisis Rekomendasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60
Tabel 27 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji sesuai Standar oleh UPT	61

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT	62
Tabel 29 Perbandingan dengan Target Janga Menengah	62
Tabel 30. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT.....	63
Tabel 31 Analisis Rekomendasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT.....	64
Tabel 32 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	65
Tabel 33. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	66
Tabel 35 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	68
Tabel 36. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	69
Tabel 37. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	70
Tabel 38 Analisis Rekomendasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72
Tabel 39 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73
Tabel 40. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75
Tabel 41. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	76
Tabel 42 Analisis Rekomendasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78
Tabel 43 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	79
Tabel 44. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	81
Tabel 45. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82
Tabel 46 Analisis Rekomendasi Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84

Tabel 47 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
Tabel 48. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	86
Tabel 49. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
Tabel 50 Analisis Rekomendasi Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89
Tabel 51 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan.....	90
Tabel 52. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.....	92
Tabel 53. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.....	93
Tabel 54 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	95
Tabel 55. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar .	96
Tabel 56. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar.....	97
Tabel 57 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	99
Tabel 58. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.....	100
Tabel 59. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.....	101
Tabel 60 Analisis Rekomendasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	103
Tabel 61 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	104
Tabel 62. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.....	105
Tabel 63. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	106
Tabel 64 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	108
Tabel 65. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	109

Tabel 66. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	110
Tabel 67. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2025.....	118
Tabel 68 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT.....	119
Tabel 69. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT.....	120
Tabel 70. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT	122
Tabel 71 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	126
Tabel 72. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	127
Tabel 73. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	128
Tabel 74 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Jumlah Desa Pangan Aman	135
Tabel 75. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Jumlah desa pangan aman.....	137
Tabel 76. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Jumlah desa pangan aman	139
Tabel 77 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	144
Tabel 78. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.....	145
Tabel 79. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Jumlah desa pangan aman	147
Tabel 80. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 3 Tahun 2025	152
Tabel 81 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.....	152
Tabel 82. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.....	154
Tabel 83. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding	156
Tabel 84 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	161
Tabel 85. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	162
Tabel 86. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding	163
Tabel 87. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2025.....	166

Tabel 88 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar.....	167
Tabel 89. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	169
Tabel 90. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding	170
Tabel 91. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2024.....	172
Tabel 92 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indeks Pelayanan Publik UPT	173
Tabel 93. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Indeks Pelayanan Publik UPT.....	173
Tabel 94. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding	175
Tabel 95. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 Tahun 2025.....	182
Tabel 96 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indeks Pelayanan Publik UPT	183
Tabel 97. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Indeks Pelayanan Publik UPT.....	184
Tabel 98. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding	185
Tabel 99 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	189
Tabel 100. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM.....	189
Tabel 101. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding	190
Tabel 102 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.....	192
Tabel 103. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	195
Tabel 104. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding	196
Tabel 105 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	198
Tabel 106. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT.....	199
Tabel 107. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding	201
Tabel 108. Rincian realisasi anggaran tiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	231
Tabel 109. Nilai Indeks Efisiensi.....	235

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Luas wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo.....	8
Gambar 2 Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kabupaten Bungo	10
Gambar 3 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)	17
Gambar 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo.....	21
Gambar 5 RAPK Loka POM di Kabupaten Bungo	25
Gambar 6. Indikator Kategori Capaian Kinerja	30
Gambar 7 Nilai NKO Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025	35

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	55
Grafik 3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	59
Grafik 4. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT.....	63
Grafik 5. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	67
Grafik 6. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.....	71
Grafik 7 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
Grafik 8. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77
Grafik 9. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83
Grafik 10. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
Grafik 11. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.....	93
Grafik 12. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar.....	97
Grafik 13. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.....	102
Grafik 14. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	106
Grafik 15. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	111

Grafik 16. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan.....	120
Grafik 17. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT	122
Grafik 18. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	129
Grafik 19. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Jumlah desa pangan aman	139
Grafik 20. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.....	148
Grafik 21. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding	157
Grafik 22. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding	164
Grafik 23. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding	170
Grafik 24. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding	175
Grafik 25. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding	185
Grafik 26. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding	186
Grafik 27. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding	191
Grafik 28. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding	196
Grafik 29. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	200
Grafik 30. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding	202

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum Organisasi
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Isu Strategis



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengawali fase baru pembangunan Nasional yang semakin dekat dengan Indonesia Emas 2045. Periode ini ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045 untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam rpjmn 2025-2029 terkait kesehatan untuk semua. Menjamin akses kesehatan untuk semua dengan memperkuat sistem kesehatan nasional yang berfokus pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas diseluruh wilayah serta kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. BPOM menghadapi penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dalam penguatan pengawasan pangan dan sediaan farmasi. Terkait dengan hal tersebut, pangan dan sediaan farmasi merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional.

Loka POM di Kabupaten Bungo memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di wilayah pengawasan aman berkhasiat/bermanfaat,dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Loka POM di Kabupaten Bungo mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Hal ini merupakan tanggungjawab besar bagi Loka POM di Kabupaten Bungo dalam memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah melalui evaluasi keamanan, mutu yang ketat. Selain bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang beredar dipasaran.Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Loka POM di Kabupaten Bungo bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan,memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Pencapaian kegiatan kinerja yang telah dilakukan dituangkan dalam bentuk laporan kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja berisi secara ringkas dan lengkap menjelaskan capaian kinerja terhadap pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi termasuk aspek keuangan yang mana menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo tahun 2025 adalah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Bungo, mengetahui tingkat efektivitas kinerja sesuai dengan Target Rencana Strategis Tahun 2025 dengan membandingkan capaian, target dan evaluasi.

Pencapaian kegiatan kinerja yang telah dilakukan dituangkan dalam bentuk laporan kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja berisi secara ringkas dan lengkap menjelaskan capaian kinerja terhadap pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi termasuk aspek keuangan yang mana menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo tahun 2024 adalah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Bungo, mengetahui tingkat efektivitas kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2024 dengan membandingkan capaian, target dan evaluasi.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Badan POM menerbitkan Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM dengan wilayah kerja

4 Kabupaten Kota yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut. UPT Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana. program. dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal. intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi. informasi. edukasi. dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan POM pada tahun 2018 telah ditetapkan Loka POM di Kota Sungai Penuh sebagai salah satu UPT BPOM yang berfungsi melakukan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kemudian pada

tanggal 23 Agustus 2023 melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan mengalami penambahan 2 (dua) wilayah kerja, yaitu Kabupaten Bungo dan kabupaten Merangin. Pada 23 April 2024 melalui surat dinas nomor PR.05.03.21.04.24.13 sehubungan dengan surat Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan nomor S-39/AG/AG.4/2024 tanggal 22 April 2024 hal Penyampaian Pemutakhiran Satker Loka POM di Kota Sungai Penuh menjadi Loka POM di Kabupaten Bungo. Untuk melaksanakan fungsinya, kantor Loka POM di Kabupaten Bungo pada tahun 2025 melakukan pengadaan sewa gedung yang digunakan sebagai Kantor Loka POM di Kabupaten Bungo yang terdiri dari 2 (dua) unit bangunan yang berlokasi di Jl. Rang Kayo Hitam, Cadika, Kec. Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi .

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Loka POM di Kabupaten Bungo pada tanggal 28 Agustus 2023 memperoleh hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Bungo sesuai nomor NPHD 030/05.141.12/NPHD/BPKAD/2023 atau PL.03.07.1.2.08.23.01 dan nomor BAST 030/05-141.13/BAST/BPKAD/2023 atau PL.03.07.1.2.08.23.18. Hibah tanah bertujuan untuk pembangunan kantor Loka POM di Kabupaten Bungo dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas obat dan Makanan Republik Indonesia.

Hibah tanah yang diterima oleh Loka POM di Kabupaten Bungo beralamat di Jl. Lintas Bandara Muara Bungo Sisi Darat No. 22, Kabupaten Bungo dengan luas 10.000m² senilai Rp248.000.000,00. Saat ini, hibah tanah tersebut telah dilakukan pengesahan oleh KPPN pada tanggal 28 Desember 2023. Pemberian Hak Pakai berdasarkan Keputusan Nomor 3/HP/BPN-06.03/V/2024 Tanggal 21 Mei 2024. Aset tanah telah dilakukan Nilai Wajar dibuktikan dengan Laporan Penilaian Barang Milik Negara Tanah Nomor LAP-0159/1/PRO-01/KNL.0401/01.01.00/2024 tanggal 20 September 2024 dan Surat Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Negara pada Loka POM di Kabupaten Bungo Nomor S-1636/KNL.0401/2024 tanggal 23 September 2024 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi senilai Rp2.315.250.000,00.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bungo disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dijelaskan Loka POM terdiri atas Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagan 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bungo

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Dalam mendukung tugas-tugas Loka POM di Kabupaten Bungo sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. Pada tahun 2025 Triwulan III pegawai Loka POM di Kabupaten Bungo yang berstatus ASN berjumlah 16 orang, CPNS 6 orang, 2 orang PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) dan 5 orang tenaga outsourcing. Latar

belakang pendidikan pegawai Loka POM di Kabupaten Bungo yang berstatus ASN terdiri dari apoteker sebanyak 4 orang, sarjana sebanyak 10 orang, dan diploma sebanyak 2 orang.

Tabel 2. Data Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan

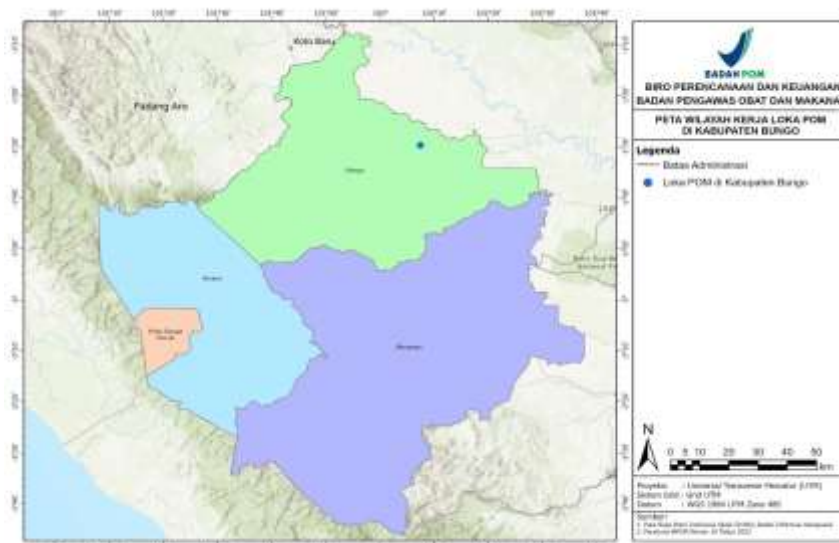
No	Status Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		Apoteker	S-1	D-III	SLTA/Sederajat	
1	PNS	4	9	2		15
2	PPPK		1			1
3	CPNS	1	3	2		6
4	PPNPN		2			2
5	Petugas Keamanan				3	3
6	Pengemudi				1	1
7	Cleaning Service				1	
Total		5	15	4	5	28

Pegawai ASN Loka POM di Kabupaten Bungo telah menduduki jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan dan pendidikannya. Profil jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3. Data Jumlah Pegawai ASN yang telah Menduduki Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Loka	1
2	PFM Ahli Madya	0
3	PFM Ahli Muda	3
4	PFM Ahli Pertama	11
5	Bendahara	1
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2
7	Perencana Ahli Pertama	1
8	Penata Laksana Barang Terampil	1
9	Pranata Komputer	1
10	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	
Total		22

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo terdiri dari Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin. Luas Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo secara keseluruhan adalah 16.527,50 km².



Gambar 1 Luas wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo

Luas wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo secara keseluruhan adalah 16.527,50 km²

Tabel 4. Luas wilayah masing-masing Kabupaten/Kota

No	Area	Luas(km ²)
1	Kota Sungai Penuh	391,50
2	Kabupaten Kerinci	3.808,00
3	Kabupaten Bungo	4.659,00
4	Kabupaten Merangin	7.669,00
Total		16.527,50

Jumlah kecamatan di wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo secara keseluruhan adalah 65 kecamatan dan 702 Desa.

Tabel 5. Jumlah kecamatan dan desa di masing-masing Kabupaten/Kota

No	Area	Kecamatan	Desa
1	Kota Sungai Penuh	8	69
2	Kabupaten Kerinci	16	287
3	Kabupaten Bungo	17	141
4	Kabupaten Merangin	24	205
	Total	65	702

Tabel 6. Jumlah penduduk wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo (Sumber : Data BPS)

No	Area	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)
1	Kota Sungai Penuh	99,2
2	Kabupaten Kerinci	253,9
3	Kabupaten Bungo	373,3
4	Kabupaten Merangin	357,6
	Total	1.084

Tabel 7. Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

No	Area	Waktu Tempuh (Jam)
1	Kota Sungai Penuh	6 - 8
2	Kabupaten Kerinci	6 - 8
3	Kabupaten Bungo	1 - 3
4	Kabupaten Merangin	1– 5

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Bungo telah disediakan fasilitas berupa ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Terdapat fasilitas penunjang transportasi yakni satu unit mobil laboratorium keliling untuk kegiatan pengujian sederhana sampel pangan dan PJAS di kantin sekolah, pasar dan pangan berbuka puasa. Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai Unit Layanan Pengaduan Konsumen Masyarakat berkomitmen dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional, transparan, obyektif, efektif, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Sesuai dengan instruksi

Kepala Badan POM yang di atur pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk konsultasi, saran dan keluhan terhadap Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan di UPT Loka POM Bungo maka dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 2 Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kabupaten Bungo

1.4 ISU STRATEGIS

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Sesuai dengan Visi Badan POM untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melakukan pengawasan secara *full spectrum* yang dimulai dari *pre-market* hingga *post-market control*, pemberdayaan masyarakat dan upaya penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan POM

bekerjasama dengan lintas sektor terutama Pemerintah Daerah untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan.

1.4.1 ISU INTERNAL

a) Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Sebagaimana tertuang pada PP Nomor 80 Tahun 2017 perihal tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan/kebijakan, maka daripada itu BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur pengawasan Obat dan Makanan secara menyeluruh.

b) Sumber Daya Manusia

SDM pegawai Loka POM di Kabupaten Bungo merupakan pegawai yang mengemban tugas tidak hanya sesuai keahliannya tetapi juga tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh jabatan tertentu, seperti pengelola kearsipan, pengelola BMN dan perencana, sehingga Loka membutuhkan SDM yang baru (Redistribusi dan Penerimaan Pegawai Baru dengan jenjang keahlian), hal ini terkait efektifitas kegiatan Pengawasan Obat dan. Selain itu dengan bertambahnya catchmen area, dari 2 kabupaten/kota menjadi 4 wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bungo, sehingga kompleksitas dan keberagaman sarana semakin banyak. Oleh karena itu masih diperlukan penambahan jumlah pegawai terutama PFM.

c) Pengembangan Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) Loka PoM di Kabupaten Bungo banyak yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang merangkap, sehingga pengembangan kompetensi menjadi sangat penting. Tanpa kompetensi yang memadai, pekerjaan yang dilakukan akan terasa lebih sulit dan kurang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan, workshop, atau program pengembangan keterampilan agar mereka dapat menjalankan tugas ganda dengan lebih efisien dan profesional.

d) Peningkatan Klasifikasi UPT

Untuk meningkatkan citra dan pandangan lintas sektor dan pemerintah daerah setempat terhadap UPT, peningkatan Klasifikasi UPT Loka POM di Kabupaten Bungo menjadi Balai POM sangat diharapkan. Adanya tantangan dari upaya strategis yang melibatkan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan.

e) Kapasitas Pengujian Loka

Loka POM di Kabupaten Bungo saat ini melakukan pengujian komoditas pangan menggunakan metode uji cepat pangan (rapid test kit) untuk parameter-parameter uji kritis yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk sampel obat pengujian rutin telah dapat dilakukan dengan menggunakan rapid test obat telah dilaksanakan mulai akhir tahun 2024. Namun, untuk sampel obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik, pengujian dilakukan di Balai Regionalisasi. Dalam rentang waktu tahun 2025-2029, Loka POM di Kabupaten Bungo telah mulai melakukan pengujian secara mandiri, meskipun masih terbatas pada beberapa parameter tertentu, diharapkan kapasitas pengujian di Loka POM semakin meningkat sehingga dapat melakukan pengujian secara mandiri untuk lebih banyak parameter.

1.4.2 ISU EKSTERNAL

a) Pengawasan Obat dan Makanan

Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Loka

POM. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Loka POM Kabupaten Bungo dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

b) Kejahatan Obat dan Makanan

Masih terdapat pedagang yang menjual obat dengan bebas (Obat bebas terbatas dan obat keras), sehingga masyarakat masyarakat memperoleh obat bukan dari sarana yang legal. Konsumen tidak mendapatkan produk obat yang aman dan bermutu yang beresiko bagi kesehatan konsumen. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Loka POM di Kabupaten Bungo dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk pangan olahan UMKM yang belum memiliki izin (P-IRT) sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan pengawasan.

c) Sinergitas Kelembagaan dengan Pemangku Kepentingan

Perlu mengoptimalkan sinergitas antara lintas sektor dan Loka POM di Kabupaten Bungo, sehingga diperlukan program untuk peningkatan koordinasi lintas sektor dalam hal ini melalui pertemuan jejaring Tim Koordinasi Pengawas Obat dan Makanan wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bungo.

d) Lokus Pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo

Wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo yaitu Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bungo. Beberapa kecamatan di Kabupaten Bungo dan kabupaten Merangin merupakan wilayah dengan jarak tempuh jauh dengan kondisi jalan yang rusak sehingga sulit untuk dilewati. Selain itu sarana dan prasarana di daerah tersebut belum memadai.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

2.3 Perjanjian Kinerja

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

2.5 Metode Pengukuran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Pembangunan Nasional untuk tahun 2025-2029 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029. Renstra BPOM 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Renstra Loka POM di Kabupaten Bungo 2025-2029 disusun megacu pada Renstra BPOM 2025-2029, perubahan ruang lingkup sasaran strategis pengawasan Obat dan Makanan menuntut BPOM untuk melakukan perubahan peningkatan kinerja yang optimal. Untuk memenuhi hal tersebut Loka POM di Kabupaten Bungo telah menetapkan Rencana Strategis untuk dapat mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang optimal. Renstra Loka POM di Kabupaten Bungo 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang dijadikan sebagai pedoman kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo.

Pertimbangan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029 Loka POM di Kabupaten Bungo telah disusun dalam bentuk draft rencana strategis pada tahun 2025 dengan mengacu pada hasil reuiu Renstra BPOM. Sasaran strategis ini disusun sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI BADAN POM

Loka POM di Kabupaten Bungo merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI yang memiliki visi serupa dengan BPOM yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam mengarahkan

seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi Kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu:

“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 VISI BADAN POM

”Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas”

MISI BADAN POM :

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi strategis yang menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 3 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,

kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 - 2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM
4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Bungo dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Bungo. Sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
4. Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Layanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Terwujudnya organisasi dan tatakelola BPOM yang berintegritas dan adaptif

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo pada tahun 2025, serta Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 – 2029 maka Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 8. RKT Loka POM di Kabupaten Bungo

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75

	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72
	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70
	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75
	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19
2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	11,5
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	86,83
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
	Jumlah desa pangan aman	1
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	85,5
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	93

6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	50
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	50
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi kepada pimpinan UPT untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai perwujudan komitmen antara Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Kepala Badan POM. DIPA Tahun 2024 dijadikan sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja pada Tahun 2025. dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Berikut merupakan perjanjian kerja yang memuat sasaran strategis, indikator kegiatan, serta target pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 :

Gambar 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PERNANDA SAPRYANOKI

Jabatan : Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kabupaten Bungo, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten
Bungo

PERNANDA SAPRYANOKI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19 Persen
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5 Persen
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,83 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan ORA, Kos yang baik dan/atau IP CPPDB pangan olahan	85,5 Persen
5.	06 - Terlaksananya Perindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4 Indeks
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78.39 Persen
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 predikat
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.55 Persen
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3.572.436.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.410.506.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.161.930.000

Kabupaten Bungo, 12 Februari 2025

Pihak Pertama

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo



PERNANDA SAPRYANOKI

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

Terjadi Perubahan Perjanjian Kinerja terhadap Target dan penambahan 3 IKU yaitu **Persentase pemenuhan target pengendalian AMR, Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar di wilayah UPT, Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman berdasarkan Nota Dinas No : PR.07.2.08.25.451** perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 Tanggal : 14 Agustus 2025. Perubahan PK terbaru terlampir pada lampiran 1.

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan tindak lanjut dari perjanjian kinerja yang telah disepakati untuk pelaksanaan kinerja dari masing-masing indikator. Berikut tabel mengenai RAPK Loka POM di Kabupaten Bungo.

Gambar 5 RAPK Loka POM di Kabupaten Bungo



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO
SADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	81.008.500
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	81.008.500
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	28.259.250
		05 - Persentase sampel PRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	56.518.500
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	35.295.600
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35.295.600

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	35.295.600
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	35.295.600
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	35.295.600
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	10	0	0	10.5	0	0	11	0	0	11.5	28.259.250
3.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	0	0	86.83	0	0	86.83	0	0	86.83	0	0	86.83	92.941.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.875.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.875.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2100.000
4.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPPOB pangan olahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	372.105.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	80.651.500
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	80.651.500
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	306.000.000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.39	864.772.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.82	648.579.000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.55	648.579.000
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT (Loka)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1.775.000
Total															3.572.436.000

Kabupaten Bungo, 14 Agustus 2025
 Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo

 PERMUDA SAPRIYANOKI

Terjadi Perubahan RAPK Terhadap Target dan penambahan 3 IKU yaitu **Persentase pemenuhan target pengendalian AMR, Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar di wilayah UPT, Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman** berdasarkan Nota Dinas No : PR.07.2.08.25.451 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 Tanggal : 14 Agustus 2025. Perubahan RAPK terbaru terlampir pada lampiran 2.

2.5 METODE PENGUKURAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan bahwa setiap unit pelaksana teknis melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah

dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat Sasaran Strategis yang tidak memiliki nilai (n/a), maka Sasaran Strategis tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Kategori Capaian Indikator Kinerja

Adapun metode pengukuran terhadap penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025, tingkat keberhasilan capaian kinerja sebuah unit kerja dihitung dengan Nilai Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

- NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki

capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

- NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

1) Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 predikat, yaitu:

- 1) Sangat Kurang;
- 2) Kurang
- 3) Butuh Perbaikan
- 4) Baik
- 5) Istimewa

Notifikasi Warna	Capaian	Kategori
	>100	Istimewa
	$80 < \text{NKO} \leq 100$	Baik
	$60 < \text{NKO} < 80$	Butuh Perbaikan
	$20 < \text{NKO} < 60$	Kurang
	$0 \leq \text{NKO} < 20$	Sangat Kurang

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Adapun metode pengukuran terhadap analisis akuntabilitas kinerja yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut :

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Gambar 6. Indikator Kategori Capaian Kinerja

Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan anggaran

(input) yang lebih sedikit dalam menghasilkan capaian kinerja (output) yang sama atau lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian output terhadap persentase capaian input, sesuai rumus:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Sedangkan untuk mengetahui Standar Efisiensi (SE) yang dapat digunakan sebagai angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi, dapat diperoleh dengan membandingkan persentase rencana capaian output terhadap persentase rencana capaian input dengan nilai SE = 1 yang diperoleh dengan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana capaian output}}{\% \text{ Rencana capaian input}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 1$$

Untuk mengetahui efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika:

Jika $IE \geq SE$: kegiatan efisien
Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Selanjutnya masing-masing kegiatan diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan *range* sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi
Sebelumnya
- 3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja
- 3.4 Realisasi Anggaran



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis capaian kinerja disajikan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2025, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah, serta membandingkan realisasi kinerja dengan UPT dalam satu cluster dan target nasional. Selain itu, dalam analisis capaian kinerja juga dijelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), serta informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

Tabel 10 Capaian per Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Capaian tahun 2025 (%)	Kategori
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	106,58	Sangat Baik 
2	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,78	Sangat Baik 
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100	Baik 
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	107,53	Sangat Baik 
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	106,48	Sangat Baik 
6	Layanan Publik UPT yang prima	109,55	Sangat Baik 
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	99,90	Baik 

Detail NKO Loka POM di Kabupaten Bungo Periode Desember 2025					
Informasi Data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dan Predikat Kinerja Organisasi (PKO) (diambil dan diproses dari integrasi data dengan SIMTBS)					
Unit Kerja	Periode	TW	NKO	PKO	Tersedia Diambil
Loka POM di Kabupaten Bungo	Desember 2025	4	94,13	Baik	24 Jan 2026 10:24 WIB

Gambar 7 Nilai NKO Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025

Loka POM di Kabupaten Bungo memiliki 7 Sasaran Strategis yang diukur capaiannya dengan hasil yaitu 1 Sasaran Strategis perhitungan dilakukan di akhir tahun 2025, 5 Sasaran Strategis termasuk kategori SANGAT BAIK, 1 Sasaran Strategis kategori BAIK. Berdasarkan gambar 7 dapat diketahui nilai NKO Loka POM di kabupaten Bungo, diperoleh nilai NKO sebesar 94,13% dengan kategori BAIK. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan 7 sasaran strategis dan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Indikator terhadap Target Tahun 2025

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Bersangkutan

Sasaran Strategis	IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun an	Realisasi		Kategori Terhadap Target	
				Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	Tahun 2025	Tahun 2025
1 Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	83,23	106,02	Sangat Baik 	Tercapai 
	2	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	94,8	126,40 110	Sangat Baik 	Tercapai 
	3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diujis sesuai standar oleh UPT	100	NA	NA	NA	NA
	4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92,5	108,82	Sangat Baik 	Tercapai 

5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	75,77	105,24	Sangat Baik	Tercapai
						
6	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	96,08	117,17 110	Sangat Baik	Tercapai
						
7	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	90,76	104,62	Sangat Baik	Tercapai
						
8	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	96,6	108,54	Sangat Baik	Tercapai
						
9	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,39	98,93	115,86 110	Sangat Baik	Tercapai
						
10	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	95,24	119,05 110	Sangat Baik	Tercapai
						
11	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	101,61	101,61	Sangat Baik	Tercapai
						
12	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5	11,97	104,09	Sangat Baik	Tercapai
						
13	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	25	25	100,00	Baik	Tercapai
						
NILAI CAPAIAN SASARAN				106,58	Sangat Baik	Tercapai
						

2	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	86,83	89,56	103,14	Sangat Baik	Tercapai
								
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	100,00	Baik	Tercapai
								
		16	Jumlah desa pangan aman	1	1	100,00	Baik	Tercapai
								
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	Baik	Tercapai
								
NILAI CAPAIAN SASARAN						100,78	Sangat Baik	Tercapai
								
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17,24	17,24	100,00	Baik	Tercapai
								
NILAI CAPAIAN SASARAN						100,00	Baik	Tercapai
								
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	100	107,53	Sangat Baik	Tercapai
								
NILAI CAPAIAN SASARAN						107,53	Sangat Baik	Tercapai
								
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	95,83	106,48	Sangat Baik	Tercapai
								

NILAI CAPAIAN SASARAN						106,48	Sangat Baik	Tercapai
								
6	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4	4,82	109,55	Sangat Baik	Tercapai
								
NILAI CAPAIAN SASARAN						109,55	Sangat Baik	Tercapai
								
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai AKIP UPT BPOM	78,39	75,76	96,64	Baik	Akan Tercapai
								
		23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100,00	Baik	Tercapai
								
		24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55	2,625	102,94	Sangat Baik	Tercapai
								
		25	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100,00	Baik	Tercapai
								
NILAI CAPAIAN SASARAN						99,90	Baik	Akan Tercapai
								

b. Perbandingan Realisasi Serta Capaian Tahun Sebelumnya (2021 – 2025)

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Serta Capaian Tahun Sebelumnya (2021 – 2025)

No	Sasaran Strategis	IKU	Indeks Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2021	-	-	-	-
				2022	-	-	-	-

dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT		2023	-	-	-	-	
		2024	-	-	-	-	
		2025	78,5	83,75	106,69	Sangat Baik	
2	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2021	-	-	-	-	
		2022	-	-	-	-	
		2023	-	-	-	-	
		2024	-	-	-	-	
		2025	75	94,8	126,4	Sangat Baik	
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT	2021	-	-	-	-	
		2022	-	-	-	-	
		2023	-	-	-	-	
		2024	-	-	-	-	
		2025	100	NA	NA	TIDAK ADA KASUS, TIDAK MASUK DALAM PERHITUNGAN NKO	
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2021	-	-	-	-	
		2022	-	-	-	-	
		2023	-	-	-	-	
		2024	-	-	-	-	
		2025	85	92,5	108,82	Sangat Baik	
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	2021	50,7	35,11	69,25	Kurang	
		2022	54	62,8	116,30	Sangat Baik	
		2023	58	65,43	112,81	Sangat Baik	
		2024	66	71,68	108,61	Sangat Baik	
		2025	72	75,77	105,24	Sangat Baik	
6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2021	44	22,45	51,02	Kurang	
		2022	35	41,89	119,69	Sangat Baik	
		2023	45	52,24	116,09	Sangat Baik	
		2024	52,3	73,97	141,44	Sangat Baik	
		2025	82	96,08	117,17	Sangat Baik	
7	Persentase fasilitas distribusi sediaan	2021	-	-	-	-	

	farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2022	-	-	-	-	
		2023	-	-	-	-	
		2024	-	-	-	-	
		2025	86,75	90,76	104,62	Sangat Baik	
8	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2021	-	-	-	-	
		2022	-	-	-	-	
		2023	-	-	-	-	
		2024	-	-	-	-	
		2025	89	96,6	108,54	Sangat Baik	
9	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	2021	-	-	-	-	
		2022	-	-	-	-	
		2023	-	-	-	-	
		2024	-	-	-	-	
		2025	85,39	98,93	115,86	Sangat Baik	
10	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	2021	-	-	-	-	
		2022	-	-	-	-	
		2023	-	-	-	-	
		2024	-	-	-	-	
		2025	80	95,24	119,05	Sangat Baik	
11	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	2021	-	-	-	-	
		2022	-	-	-	-	
		2023	-	-	-	-	
		2024	-	-	-	-	
		2025	100	101,61	101,61	Sangat Baik	
12	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	2021	-	-	-	-	
		2022	-	-	-	-	
		2023	-	-	-	-	
		2024	-	-	-	-	
		2025	11,5	11,97	104,09	Sangat Baik	
13	Persentase Kabupaten/Kota yang	2021	-	-	-	-	

			didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	2022	-	-	-	-	
				2023	-	-	-	-	
				2024	-	-	-	-	
				2025	25	25	100	Baik	
2	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	2021	87,92	91,39	103,95	Sangat Baik	
				2022	93,9	94,48	100,62	Sangat Baik	
				2023	94,9	95,57	100,71	Sangat Baik	
				2024	96,4	96,48	100,08	Sangat Baik	
				2025	86,83	89,56	103,14	Sangat Baik	
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2021	-	-	-	-	
				2022	-	-	-	-	
				2023	-	-	-	-	
				2024	-	-	-	-	
				2025	2	2	100	Baik	
		16	Jumlah desa pangan aman	2021	-	-	-	-	
				2022	-	-	-	-	
				2023	-	-	-	-	
				2024	-	-	-	-	
				2025	1	1	100	Baik	
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2021	-	-	-	-	
				2022	-	-	-	-	
				2023	-	-	-	-	
				2024	-	-	-	-	
				2025	1	1	100	Baik	
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	2021	-	-	-	-	
				2022	77	80	103,90	Sangat Baik	
				2023	79	100	126,58	Sangat Baik	
				2024	100	100	100,00	Baik	
				2025	17,24	17,24	100	Baik	
4	Terlaksananya Penindakan	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan	2021	80	110	137,50	Sangat Baik	

	Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	2022	52	100	192,31	Sangat Baik	
				2023	55	100	181,82	Sangat Baik	
				2024	90	100	111,11	Sangat Baik	
				2025	93	100	107,53	Sangat Baik	
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	2021	-	-	-	-	
				2022	-	-	-	-	
				2023	-	-	-	-	
				2024	-	-	-	-	
				2025	90	95,83	106,48	Sangat Baik	
6	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	2021	-	-	-	-	
				2022	-	-	-	-	
				2023	-	-	-	-	
				2024	-	-	-	-	
				2025	4,4	4,82	109,55	Sangat Baik	
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai AKIP UPT BPOM	2021	-	-	-	-	
				2022	-	-	-	-	
				2023	82,2	76,35	92,88	Baik	
				2024	74,29	77,39	104,17	Sangat Baik	
				2025	78,39	75,76	96,64	Baik	
		23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	2021	-	-	-	-	
				2022	90,6	90,52	99,91	Baik	
				2023	91,8	89,65	97,66	Baik	
				2024	92,47	91,94	99,43	Baik	
				2025	5	5	100	Baik	
		24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2021	-	-	-	-	
				2022	-	-	-	-	
				2023	-	-	-	-	
				2024	-	-	-	-	
				2025	2,55	2,625	102,94	Sangat Baik	
		25	Persentase implementasi rencana	2021	100	100	100,00	Baik	

aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	2022	100	100	100,00	Baik	
	2023	100	100	100,00	Baik	
	2024	100	100	100,00	Baik	
	2025	100	100	100,00	Baik	

Loka POM di Kabupaten Bungo memiliki 7 Sasaran Strategis (SS) dan 25 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). SS dan IKSS ini berubah sepanjang 2021-2025 mengikuti perjanjian kinerja dengan pusat. Terdapat perubahan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja pada tahun 2025 dibandingkan dengan manual IKU tahun-tahun sebelumnya. Perubahan tersebut juga terdapat pada Definisi Operasional IKU serta cara perhitungan masing-masing IKU dalam tiap Sasaran Strategis.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

No	Sasaran Strategis	IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori	
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	83,23	101,5	Tercapai/ Melampaui	
		2	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	79	94,8	120	Tercapai/ Melampaui	
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	NA	NA	NA	
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	92,5	106,32	Tercapai/ Melampaui	
		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76	75,77	99,70	Akan Tercapai	
		6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	96,08	111,72	Tercapai/ Melampaui	
		7	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90,76	100,84	Tercapai/ Melampaui	
		8	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	96,6	106,15	Tercapai/ Melampaui	
		9	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,59	98,93	111,67	Tercapai/ Melampaui	

2	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	82	95,24	116,15	Tercapai/ Melampaui	
		11	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	101,61	101,61	Tercapai/ Melampaui	
		12	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	18	11,97	66,50	Perlu Upaya Keras	
		13	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	75	25	33,33	Perlu Upaya Keras	
		14	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	88,57	89,56	101,12	Tercapai/ Melampaui	
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	100,00	Tercapai/ Melampaui	
		16	Jumlah desa pangan aman	1	1	100,00	Tercapai/ Melampaui	
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	51,72	17,24	33,33	Perlu Upaya Keras	
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95	100	105,26	Tercapai/ Melampaui	
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	92	95,83	104,16	Tercapai/ Melampaui	
6	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,5	4,82	107,11	Tercapai/ Melampaui	
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai AKIP UPT BPOM	80,39	75,76	94,24	Akan Tercapai	
		23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100,00	Tercapai/ Melampaui	
		24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,65	2,625	99,06	Akan Tercapai	
		25	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100,00	Tercapai/ Melampaui	

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 antara 4 Loka POM yang sudah ditentukan

No	Sasaran Strategis	IKU	Indeks Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Bungo	78.5	83.23	106.02	Sangat Baik	
				Aceh Tengah	83.25	87.08	104.60	Sangat Baik	
				Toba	82.25	89.86	109.25	Sangat Baik	
				Belitung	81.25	99.56	122.54	Sangat Baik	
		2	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Bungo	75	94.8	126.4	Sangat Baik	
				Aceh Tengah	75	99.77	133.03	Sangat Baik	
				Toba	85.00	88.8	104.47	Sangat Baik	
				Belitung	90	100	111.11	Sangat Baik	
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Bungo	100	NA	NA	TIDAK ADA KASUS, TIDAK MASUK DALAM PERHITUNGAN NKO	
				Aceh Tengah	100	NA	NA	TIDAK ADA KASUS, TIDAK MASUK DALAM PERHITUNGAN NKO	
				Toba	100.00	100	100.00	Baik	
				Belitung	100.00	100	100.00	Baik	
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Bungo	85	92,5	108,82	Sangat Baik	
				Aceh Tengah	85	100	117.65	Sangat Baik	
				Toba	85.00	90.63	106.62	Sangat Baik	
				Belitung	91	100	109.89	Sangat Baik	
		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Bungo	72	75.77	105,24	Sangat Baik	
				Aceh Tengah	91	92	101.10	Sangat Baik	
				Toba	78.90	82.35	104.37	Sangat Baik	
				Belitung	79	94.93	120.16	Sangat Baik	
		6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Bungo	82	96,08	117,17	Sangat Baik	
				Aceh Tengah	70	84.21	120.30	Sangat Baik	
				Toba	90.00	97.22	108.02	Sangat Baik	

			Belitung	91	97.78	107.45	Sangat Baik		
	7	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Bungo	86,75	90,76	104,62	Sangat Baik		
			Aceh Tengah	89.75	99.41	110.76	Sangat Baik		
			Toba	97.25	99.24	102.05	Sangat Baik		
			Belitung	95	100	105.26	Sangat Baik		
	8	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Bungo	89	96,6	108,54	Sangat Baik		
			Aceh Tengah	80	83.22	104.03	Sangat Baik		
			Toba	90.00	96.92	107.69	Sangat Baik		
			Belitung	91	100	109.89	Sangat Baik		
	9	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Bungo	85,39	98,93	115,86	Sangat Baik		
			Aceh Tengah	93.2	99.93	107.22	Sangat Baik		
			Toba	92.60	97.11	104.87	Sangat Baik		
			Belitung	91	99.99	109.88	Sangat Baik		
	10	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Bungo	80	95,24	119,05	Sangat Baik		
			Aceh Tengah	85	100	117.65	Sangat Baik		
			Toba	80.00	82.76	103.45	Sangat Baik		
			Belitung	90	100	111.11	Sangat Baik		
	11	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Bungo	100	101,61	101,61	Sangat Baik		
			Aceh Tengah	100	106.14	106.14	Sangat Baik		
			Toba	100.00	104.95	104.95	Sangat Baik		
			Belitung	100	106.25	106.25	Sangat Baik		
	12	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Bungo	11,5	11,97	104,09	Sangat Baik		
			Aceh Tengah	11	11.25	102.27	Sangat Baik		
			Toba	11.75	12.42	105.70	Sangat Baik		
			Belitung	18	18.7	103.89	Sangat Baik		
	13	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Bungo	25	25	100.00	Baik		
			Aceh Tengah	20	20	100.00	Baik		
			Toba	11.11	11.11	100.00	Baik		
			Belitung	50	50	100.00	Baik		
2	Meningkatnya Efektivitas KIE di	14	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan	Bungo	86,83	89,56	103,14	Sangat Baik	

	masing-masing wilayah kerja UPT	pangan olahan diwilayah kerja UPT	Aceh Tengah	83.48	84.56	101.29	Sangat Baik				
			Toba	87.24	89.73	102.85	Sangat Baik				
			Belitung	85.78	89.46	104.29	Sangat Baik				
			15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Bungo	2	2	100	Baik		
			Aceh Tengah		2	2	100	Baik			
			Toba		2	1	50	Kurang			
			Belitung		2	2	100	Baik			
				16	Jumlah desa pangan aman	Bungo	1	1	100	Baik	
						Aceh Tengah	1	1	100	Baik	
						Toba	1	1	100	Baik	
Belitung	1	1				100	Baik				
	17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Bungo	1	1	100	Baik				
			Aceh Tengah	1	1	100	Baik				
			Toba	1	1	100	Baik				
			Belitung	1	1	100	Baik				
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Bungo	17,24	17,24	100	Baik			
				Aceh Tengah	11.76	11.76	100.00	Baik			
				Toba	12.00	12	100.00	Baik			
				Belitung	13.79	17.24	125.02	Sangat Baik			
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Bungo	93	100	107,53	Sangat Baik			
				Aceh Tengah	75	50	66.67	Cukup			
				Toba	75.00	80	106.67	Sangat Baik			
				Belitung	91	100	109.89	Sangat Baik			
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	Bungo	90	95,83	106,48	Sangat Baik			
				Aceh Tengah	90	95.83	106.48	Sangat Baik			
				Toba	90.00	100	111.11	Sangat Baik			
				Belitung	90	99	110.00	Sangat Baik			
6	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	Bungo	4,4	4,82	109,55	Sangat Baik			
				Aceh Tengah	3.6	4.43	123.06	Sangat Baik			
				Toba	3.75	4.38	116.80	Sangat Baik			

7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai AKIP UPT BPOM	Belitung	4.05	4.86	120.00	Sangat Baik	
				Bungo	78,39	75,76	96,64	Baik	
				Aceh Tengah	76.5	77.7	101.57	Sangat Baik	
				Toba	75.44	75	99.42	Baik	
		23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Belitung	75.7	75.41	99.62	Baik	
				Bungo	5	5	100	Baik	
				Aceh Tengah	5	4	80.00	Cukup	
				Toba	5	-	-	Baik	
		24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Belitung	5	5	100	Baik	
				Bungo	2,55	2,625	102,94	Sangat Baik	
				Aceh Tengah	3	2.75	91.67	Baik	
				Toba	2.40	2.47	102.92	Sangat Baik	
		25	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Belitung	2.9	2.906	100.21	Sangat Baik	
				Bungo	100	100	100,00	Baik	
				Aceh Tengah	100	100	100,00	Baik	
				Toba	100.00	100.75	100.75	Sangat Baik	
				Belitung	100	100	100,00	Baik	

3.1.1 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.1.1 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Capaian ini didukung dari 13 (Tiga Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada Sasaran Strategis (SS) 1 terhadap target tahun 2025 diperoleh hasil rata-rata 106,58 mendapat kriteria **“Tercapai/Melampaui”** Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024

Sasaran Strategis	IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun an	Realisasi		Kategori Terhadap Target	
				Realisasi	%Capaian thd	Tahun 2025	Tahun 2025

						Target bulan n		
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	83,23	106,02	Sangat Baik 	Tercapai 
		2	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	94,8	126,40 110	Sangat Baik 	Tercapai 
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	NA	NA	NA	NA
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92,5	108,82	Sangat Baik 	Tercapai 
		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	75,77	105,24	Sangat Baik 	Tercapai 
		6	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	96,08	117,17 110	Sangat Baik 	Tercapai 
		7	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	90,76	104,62	Sangat Baik 	Tercapai 
		8	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	96,6	108,54	Sangat Baik 	Tercapai 
		9	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,39	98,93	115,86 110	Sangat Baik 	Tercapai 
		10	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	95,24	119,05 110	Sangat Baik 	Tercapai 

11	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	101,61	101,61	Sangat Baik	Tercapai
						
12	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5	11,97	104,09	Sangat Baik	Tercapai
						
13	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	25	25	100,00	Baik	Tercapai
						
NILAI CAPAIAN SASARAN				106,58	Sangat Baik	Tercapai
						

IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 16 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	83,23	106,02	Sangat Baik



Realisasi presentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar memiliki capaian 106,02% dengan kategori capaian **"Tercapai"**

Sampling sediaan farmasi dilakukan terhadap Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilaksanakan sesuai Pedoman Sampling tahun 2025. Adapun cara perhitungan resentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :

- a) % Obat = $A+B+C+D+E$
- A = $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$
- B = $20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$
- C = $20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total sampel yang diuji} \times 100\%)$
- D = $20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$
- E = $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$
- b) %OBAOK = $(A+B+C+D+E) / 5$
- A = $(a1 + a2) / 2$
- a1 = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$
- a2 = $(\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$
- B = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/ disampling dan diuji}) \times 100\%$
- C = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$
- D = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- E = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$
- c) % SK = $(A+B+C+D+E) / 5$

- A = $(a1 + a2) / 2$
 $a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$
 $a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$
- B = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/ disampling dan diuji}) \times 100\%$
- C = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$
- D = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- E = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$
- d) % Kosmetik = $(A+B+C+D+E) / 5$
- A = $(a1 + a2) / 2$
 $a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$
 $a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$
- B = $(\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel} \times 100\%)$
- C = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$

D = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

E = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

% Sampel Sediaan Farmasi = %Obat + % OBAOK + %SK + % Kosmetik / 4
 Realisasi sampel obat yang telah disampling sebanyak 82 sampel, untuk obat bahan alam sebanyak 51 sampel, obat kuasi 2 sampel, suplemen kesehatan 13 sampel dan kosmetik sebanyak 102 sampel. Sehingga total sampel yang telah disampling sebanyak 250 sampel. Realisasi tersebut sesuai dengan target jumlah sampel sediaan farmasi tahun 2025.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	78,5	83,75	106,69	Sangat Baik 

Berdasarkan tabel diatas untuk perhitungan target tahun 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya dengan nama IKU yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Perhitungan capaian tidak hanya dari realisasi jumlah sampel yang di sampling tetapi juga berdasarkan ketentuan lainnya seperti kesesuaian sampling dengan renlak yang disusun, Jumlah sampel yang masuk dan diuji di laboratorium, jumlah sampel yang dilaporkan serta surat tindaklanjut yang ditindaklanjuti oleh UPT. Realisasi untuk persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu 83,75% dengan target pada tahun 2025

yakni 78,5% sehingga capaian untuk tahun 2025 yakni sebesar 106,02% dengan kategori Sangat Baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

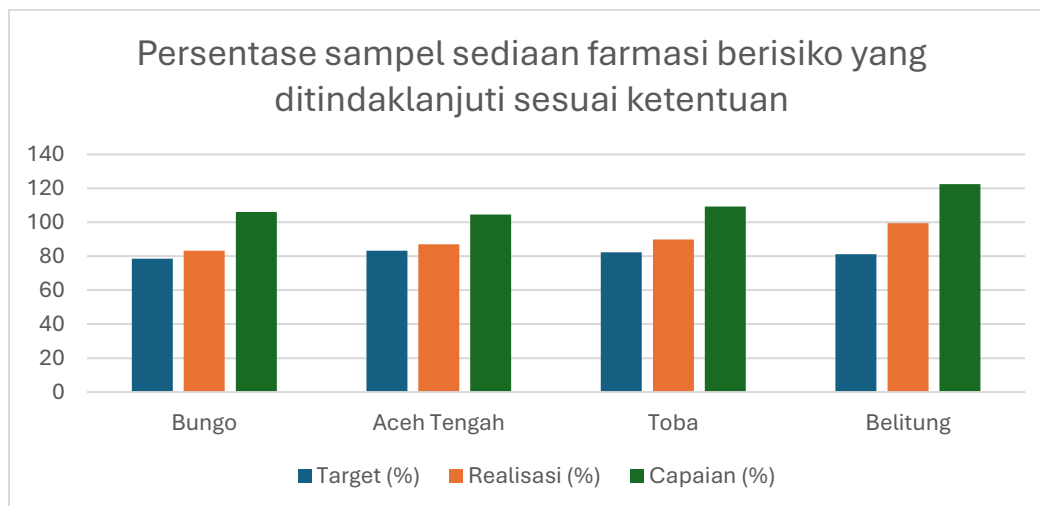
IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	83,23	101,5	Tercapai/Melampaui 

Realisasi Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 memiliki capaian 101,5% terhadap target jangka menengah tahun 2027 dengan kategori Tercapai/Melampaui. Kinerja ini sudah mencapai target dan harus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun berikutnya karena setiap tahunnya ada peningkatan target.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Bungo	78.5	83.23	106.02	Sangat Baik 
	Aceh Tengah	83.25	87.08	104.60	Sangat Baik 
	Toba	82.25	89.86	109.25	Sangat Baik 
	Belitung	81.25	99.56	122.54	Sangat Baik 



Grafik 1. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan grafik diatas, capaian tertinggi diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Belitung dengan nilai 122,54% kategori Sangat Baik. Sedangkan ketiga Loka POM lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Bungo, Loka POM di Kabupaten Toba, dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah juga dengan kategori Sangat Baik, yaitu masing-masing memiliki nilai 106,02 ; 109,25 dan 104,60. Diharapkan dari data ini Loka POM di Kabupaten Bungo dapat meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian setiap tahunnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Nilai realisasi presentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah 83,23% dengan capaian kinerja terhadap target 2025 sebesar 106,02% sehingga dikategorikan dengan kriteria capaian "**Sangat Baik**". Hal ini disebabkan karena semua sampel yang disampling pada tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai ketentuan meskipun ada sampel yang melewati *timeline* pengujian tetapi capaian masih sesuai. Pelaksanaan sampling tahun 2025 dilaksanakan secara regionalisasi. Loka POM di Kabupaten Bungo masuk pada region 2 yaitu BBPOM Pekanbaru sebagai Balai Koordinator. Region Pekanbaru terdiri dari Jambi, Lampung, Palembang, Pekanbaru dan Pangkal Pinang. Untuk komoditi sediaan farmasi semua sampel

dilaksanakan secara regional, sedangkan produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, kuasi dan kosmetik sebagian regional dan sebagian non regional (pengujian dilakukan ke Balai POM di Jambi). Pada tahun 2025 juga Loka POM di Kabupaten Bungo juga melaksanakan pengujian sampel Obat secara *Rapid Test*. Dalam pelaksanaan teknisnya, regionalisasi pengujian yang sebelumnya dalam tahap penyesuaian sekarang sudah dalam tahap ke yang lebih baik dan terorganisir ditambah untuk sampel obat telah dapat diuji secara *rapid test* untuk sebagian obatnya. Namun beberapa kendala yang masih ada antara lain adanya kebijakan efisiensi pada awal tahun dan direlaksasi kembali pada Triwulan 2 yang membuat sampel menjadi menumpuk pada bulan-bulan berikutnya yang mengakibatkan tidak semua sampel dapat diuji dan dilaporkan tepat waktu serta rentang waktu pengujian yang terlampaui singkat.

Tabel 20 Analisis Rekomendasi Presentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Presentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat sampel yang dikirim tidak sesuai dengan tujuan Balai pengujian yang disebabkan kelalaian petugas dalam melakukan pelabelan box sampel yang akan dikirim sehingga sampel tidak dapat terkirim tepat waktu	Melakukan pengecekan pada box sampel sehingga alamat pengiriman sesuai dengan balai tujuan	Memberi penandaan pada box sampel dengan tujuan Balai pengujian	TW 4 2025	Y	PEM 01	Salah pengiriman obat sampel ke balai pengujian dalam regionalisasi laboratorium
2		Sampling baru berjalan efektif setelah pulih pagu pada bulan Mei sehingga sampel yang tersisa tertumpuk pada bulan lainnya.	Melakukan pembagian sampel yang Tersisa untuk Bulan yang Tersisa	Penyesuaian target dengan jumlah sampel yang tersisa	TW 4 2025	T		

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan atau Kegagalan pencapaian kinerja dapat ditentukan oleh hal berikut :

1. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan

diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

2. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
4. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

IKU 2. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	94,8	126,40 110	Sangat Baik



Nilai realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 94,8% dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 126,40% sehingga dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”. Hal ini menandakan produk yang tersampling pada tahun 2025 itu sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	75	94.8	126,4	Sangat Baik 

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2025 capaian Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan lebih dari 100% dengan kategori Sangat Baik sehingga pelaksanaan sampling telah sesuai dengan ketentuan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 23 Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
2	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	79	94,8	120	Tercapai/ Melampaui 

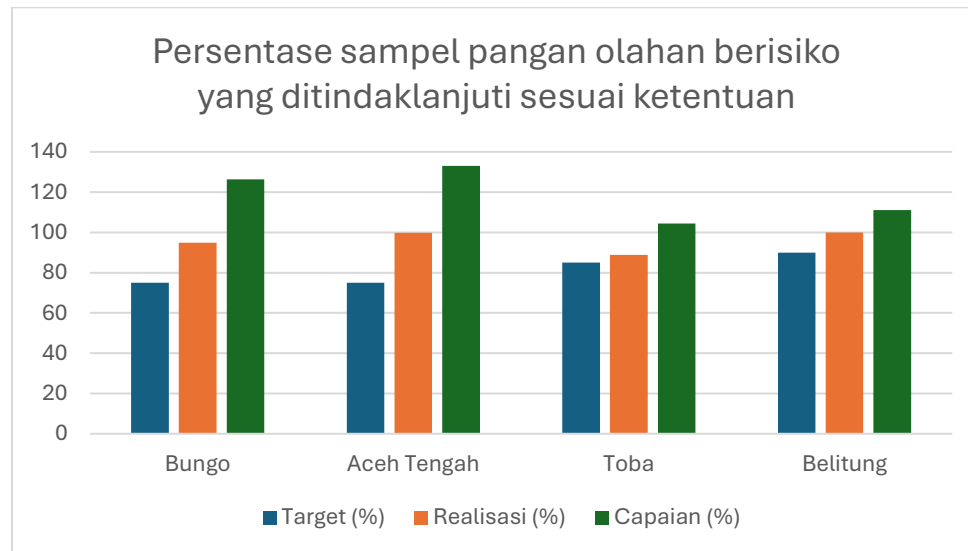
Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2025 capaian Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan lebih dari 100% dengan kategori Sangat Baik sehingga pelaksanaan sampling telah sesuai dengan ketentuan.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
	Bungo	75	94.8	126.4	Sangat Baik 

Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Aceh Tengah	75	99.77	133.03	Sangat Baik	●
	Toba	85.00	88.8	104.47	Sangat Baik	●
	Belitung	90	100	111.11	Sangat Baik	●



Grafik 2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan grafik diatas, capaian tertinggi diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dengan nilai 133,03% kategori Sangat Baik. Sedangkan ketiga Loka POM lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Bungo, Loka POM di Kabupaten Toba, dan Loka POM di Kabupaten Belitung juga dengan capaian dengan kategori Sangat Baik, yaitu masing-masing memiliki nilai 126,4 ; 104,47 dan 111,11.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Nilai realisasi persentase persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 adalah 94,8% dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 126,4% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”.

Penilaian ini berdasarkan jumlah sampel pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Tercapainya realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan kategori

Sangat Baik menandakan bahwa dari seluruh sampel pangan olahan yang disampling di tahun 2025 telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan sesuai definisi operatif. Sehingga melampaui target dari target yang telah ditetapkan yang menyebabkan nilai menjadi Sangat Baik. Pengujian sampel makanan juga dilaksanakan secara Regionalisasi Laboratorium, oleh karena itu petugas dan tim di Loka POM di Kabupaten Bungo bertekad untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik mungkin. tepat waktu serta rentang waktu pengujian yang terlampaui singkat.

Tabel 25 Analisis Rekomendasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel yang dikirim rusak/pecah akibat kelalaian mitra ekspedisi saat proses pengiriman yang membuat jumlah sampel tidak tercukupi untuk dilakukan pengujian	Telah membuat perjanjian kerjasama dengan POS Indonesia terkait asuransi jaminan pengiriman sampel	MoU dengan POS Indonesia	TW 4 2025	Y	PEM 02	pecah/rusaknya sampel di perjalanan

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dari kesesuaian target sampel yang disampling, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya. Keberhasilan persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak terlepas dari perencanaan pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2025.

IKU 3. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji sesuai Standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 26 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji sesuai Standar oleh UPT

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT	100	NA	NA	NA	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT

Indikator Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT hingga Tahun 2025 tidak memiliki capaian kinerja dikarenakan tidak terdapat sampel kasus KLB dan penilaian untuk indikator ini dikecualikan dalam pengukuran NKO apabila tidak terdapat kasus KLB

KP. Capaian ini dapat direalisasikan jika terdapat sampel KLB yang dilakukan sampling dan pengujian.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	100	NA	NA	TIDAK ADA KASUS, TIDAK MASUK DALAM PERHITUNGAN NKO

Berdasarkan tabel diatas selama periode renstra menjelaskan bahwa pada tahun 2021 hingga tahun 2024 tidak terdapat target karena indikator kinerja ini belum menjadi perjanjian kinerja UPT Loka POM di Kabupaten Bungo. Pada tahun 2025 indikator kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT telah menjadi perjanjian kinerja UPT Loka POM di Kabupaten Bungo. Namun, pada tahun 2025 tidak terdapat kejadian luar biasa di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo, maka tidak terdapat capaian pada indikator kinerja ini.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 28 Perbandingan dengan Target Janga Menengah

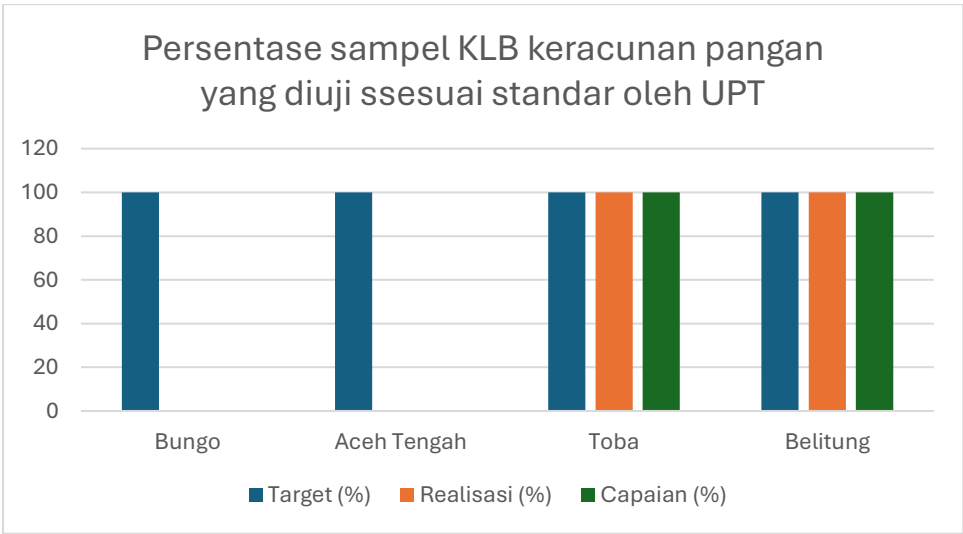
IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT	100	NA	NA	NA

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT tahun 2025 tidak ada. Terdapat target tahun 2027 sebesar 100%. Adapun upaya yang akan dilakukan terkait hal ini yaitu aktif melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo sehingga dapat melaksanakan sampling dan pengujian sampel KLB jika terdapat sampel KLB.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT	Bungo	100	NA	NA	TIDAK ADA KASUS, TIDAK MASUK DALAM PERHITUNGAN NKO
	Aceh Tengah	100	NA	NA	TIDAK ADA KASUS, TIDAK MASUK DALAM PERHITUNGAN NKO
	Toba	100.00	100	100.00	Baik
	Belitung	100.00	100	100.00	Baik



Grafik 3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT

Berdasarkan grafik diatas, capaian tertinggi diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Toba dan Loka POM di Kabupaten Belitung dengan nilai 100% kategori Baik. Sedangkan Loka POM lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Bungo dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah tidak ada capaian dikarenakan tidak ada kasus.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Loka POM di Kabupaten Bungo hingga tahun 2025 belum terdapat realisasi untuk indikator kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, dikarenakan tidak adanya sampel KLB selama tahun 2025, akan dilakukan pengujian sampel KLB jika terdapat sampel KLB.

Tabel 30 Analisis Rekomendasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT	Tidak ada kejadian KLB Keracunan Pangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Melakukan koordinasi secara langsung denga pembentukan tim Penanganan KLB	Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Akhir tahun 2025	Y	PEM 13	Pengambilan Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Loka POM di Kabupaten Bungo hingga tahun 2025 belum terdapat realisasi untuk indikator kinerja Presentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, dikarenakan tidak adanya sampel KLB di tahun 2025, akan dilakukan sampling dan pengujian sampel KLB jika terdapat sampel KLB pada tahun berikutnya.

IKU 4. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 31 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92,5	108,82	Sangat Baik



Nilai realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 92,5% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan III sebesar 108,82% sehingga dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”. Hal ini menandakan produk yang tersampling pada tahun 2025 itu sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	85	92,5	108,82	Sangat Baik



Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2025, capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan lebih dari 100% dengan kategori Sangat Baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

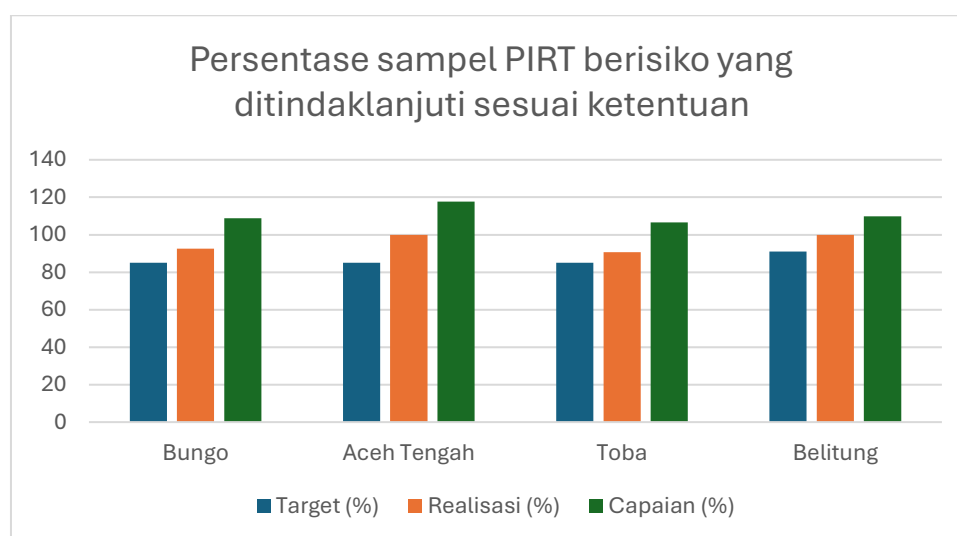
IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	92,5	106,32	Tercapai/ Melampaui 

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 memiliki capaian 106,32% terhadap target jangka menengah tahun 2027 dengan kategori capaian tercapai/melampaui. Kinerja ini sudah mencapai target dan harus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga target tahun 2027 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Bungo	85	92,5	108,82	Sangat Baik 
	Aceh Tengah	85	100	117.65	Sangat Baik 
	Toba	85.00	90.63	106.62	Sangat Baik 
	Belitung	91	100	109.89	Sangat Baik 



Grafik 4. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan grafik diatas, capaian tertinggi diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dengan nilai 117,65% kategori Sangat Baik. Sedangkan ketiga Loka POM lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Bungo, Loka POM di Kabupaten Toba, dan Loka POM di Kabupaten Belitung capaian dengan kategori Sangat Baik, yaitu masing-masing memiliki nilai 108,82 ; 106,62 dan 109,89.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Nilai realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 92,5% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan III sebesar 108,82% sehingga dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”.

Penilaian ini berdasarkan jumlah sampel PIRT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Tercapainya realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan kategori tercapai/melampaui menandakan bahwa dari sampel PIRT yang disampling tahun 2025 telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan sesuai definisi operatif. Sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Pengujian sampel makanan juga dilaksanakan secara Regionalisasi Laboratorium, oleh karena itu petugas dan tim di Loka POM di Kabupaten Bungo bertekad untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik mungkin.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala/permasalahan	-	-	-	-	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dari kesesuaian target sampel yang disampling, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan waktu pelaporan dan tindak lanjut sampel PIRT. Keberhasilan persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak terlepas dari perencanaan pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2025.

IKU 5. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 34 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	75,77	105,24	Sangat Baik



Nilai realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 75,77 dengan capaian terhadap target triwulan IV 2025 sebesar 105,24%, sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “**Sangat Baik**”.

Nilai persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dihitung berdasarkan :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan :

$$\% = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100 \%$$

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor :

$$\% = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100 \%$$

Hingga akhir TW IV 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo telah melaksanakan/ menerima tindak lanjut dari pelaku usaha sebanyak 57 laporan perbaikan/CAPA dari 89 surat tindak lanjut yang diterbitkan. Sementara itu jumlah tindak lanjut dari lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan sebanyak 21 surat dari 24 surat tindak lanjut yang telah disampaikan. Dengan demikian, capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 105,24% dengan kategori “**Sangat Baik**”.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 35. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	2021	50,7	35,11	69,25	Kurang	
	2022	54	62,8	116,30	Sangat Baik	
	2023	58	65,43	112,81	Sangat Baik	
	2024	66	71,68	108,61	Sangat Baik	
	2025	72	75,77	105,24	Sangat Baik	

Berdasarkan grafik diatas selama perolehan renstra 5 tahun persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan ditindaklanjuti oleh stakeholder mengalami fluktuatif, namun pada tahun 2022 hingga 2025 realisasinya sudah melewati target dengan kategori “Sangat Baik”. Pada tahun 2025 persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan ditindaklanjuti oleh stakeholder mengalami penurunan dari tahun 2024. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama sehingga Defenisi Operasional masing-masing IKU juga mengalami perubahan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

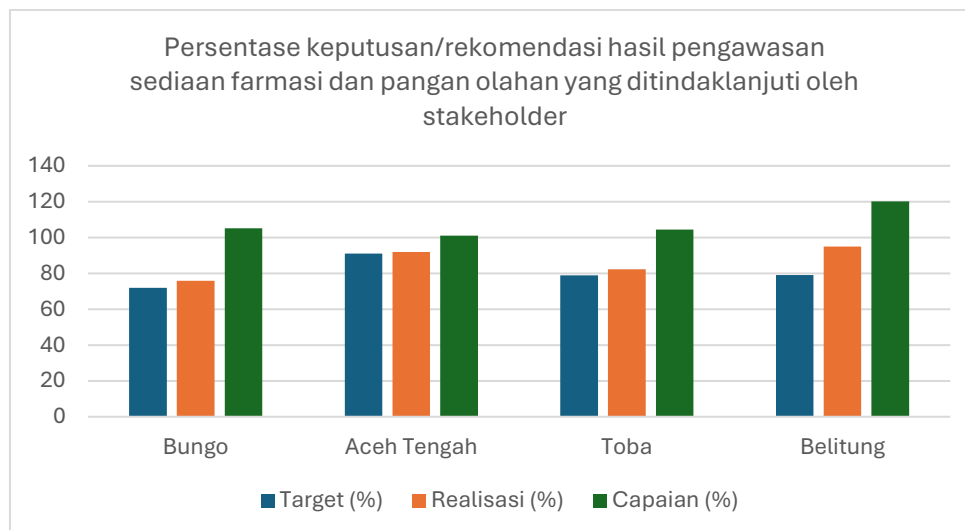
IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76	75,77	99,70	Akan Tercapai 

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder tahun 2025 memiliki capaian 99,70% terhadap target jangka menengah tahun 2027 dengan kategori capaian akan tercapai. Kinerja ini sudah mencapai target namun tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Bungo	72	75.77	105,24	Sangat Baik 
	Aceh Tengah	91	92	101.10	Sangat Baik 
	Toba	78.90	82.35	104.37	Sangat Baik 
	Belitung	79	94.93	120.16	Sangat Baik 



Grafik 5. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Berdasarkan grafik diatas, capaian tertinggi diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Belitung dengan nilai 120,16% kategori Sangat Baik. Sedangkan ketiga Loka POM lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Bungo, Loka POM di Kabupaten Toba, dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sudah melebihi 100% dengan kategori Sangat Baik, yaitu masing-masing memiliki nilai 105.24%, 104.37% dan 101.10%. Ketercapaian target ini disebabkan oleh komitmen yang baik dari pelaku usaha dan lintas sektor dalam menindaklanjuti hasil penagwasan obat dan makanan yang diberikan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Nilai realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 75,77 capaian terhadap target triwulan IV 2025 sebesar 105,24%, sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”. Keberhasilan capaian pada TW III ini dikarenakan :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh rekomendasi yang diberikan. Kegiatan monev ini rutin dilakukan oleh katim setiap akhir bulan.

- b. Percepatan tindak lanjut terhadap rekomendasi dengan pembinaan ditempat pada saat pemeriksaan sarana dengan meminta komitmen terhadap rencana tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) kepada pelaku usaha dan melakukan Desk CAPA apabila dibutuhkan.
- c. Menerapkan pembinaan setempat terhadap pelaku usaha yang dapat memastikan untuk melaksanakan perbaikan berkelanjutan
- d. Aktif berkoordinasi dengan lintas sektor terkait, terkait hasil pengawasan obat dan makanan serta tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. Membuat link bersama terkait hasil pengawasan sarana distribusi yang bisa diakses oleh Dinas Kesehatan setempat.

Tabel 37 Analisis Rekomendasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Monitoring dan Evaluasi Laporan Perbaikan (CAPA) dari pelaku usaha	Masih sedikit pelaku usaha yang mengirimkan laporan perbaikan terhadap surat tindak lanjut yang diberikan, terutama untuk sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian	Melakukan monitoring dan evaluasi CAPA sesuai dengan timeline yang diberikan.	Sudah dievaluasi diakhir TW IV 2025	-	Ya	PEM 03	Rendahnya feedback tindaklanjut hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dari pemangku kepentingan
2	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut dari lintas sektor	Belum ada feedback terhadap hasil pemeriksaan sarana distribusi yang sudah disampaikan kepada dinas kesehatan setempat	Koordinasi dengan dinas kesehatan setempat	- sudah ada sharing folder hasil tindak lanjut yang bisa di akses oleh Dinas Kesehatan	-	Ya	PEM 03	Rendahnya feedback tindaklanjut hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dari pemangku kepentingan

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Nilai % capaian keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder “Sangat Baik”. Hal ini dilakukan dengan aktif berkoordinasi dengan lintas sektor dan adanya penggunaan link bersama terkait hasil pengawasan untuk dapat diakses oleh

Stakeholders. Selain itu sudah ada link monitoring dan evaluasi terkait surat tindak lanjut yang diberikan oleh petugas kepada pelaku usaha.

IKU 6. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 38 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	96,08	117,17 110	Sangat Baik 

Nilai realisasi persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 96,08% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan III sebesar 117,17% sehingga dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”. Hal ini menandakan pangan olahan yang diperiksa pada Tahun 2025 sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan kategori penilain sebagai berikut:

Kategori Penilaian	Uraian
Evaluasi Ketepatan Waktu	Ketepatan waktu merupakan kesesuaian waktu pelaporan hasil pemeriksaan sarana yang diinput oleh UPT melalui SIPT (sampai dengan terkirim ke unit pusat), sesuai dengan waktu pelaporan yang ada di dalam SK Pedoman Pemeriksaan
Cara perhitungan : $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%$	

Evaluasi Ketepatan Tindak Lanjut

Ketepatan Tindak Lanjut merupakan kesesuaian antara tindak lanjut yang diterbitkan oleh UPT dengan pedoman tindak lanjut. terkait pengawasan produksi pangan olahan dan kewenangan tindak lanjut. Tindak lanjut pemeriksaan dihitung terhadap tindak lanjut pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll

Cara perhitungan: = (Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat/Jumlah Jumlah sarana yang diperiksa) X100%

Evaluasi Ketepatan Grading

Kesesuaian grading merupakan konversi hasil pemeriksaan dengan grading, dimana jika hasil: pemeriksaan A dan B atau pemeriksaan level I dan level II maka grading sebagai A (MK) pemeriksaan C atau pemeriksaan level III maka grading sebagai B (TMK) pemeriksaan D atau pemeriksaan level IV maka grading sebagai C (TMK)

Cara perhitungan= (Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%

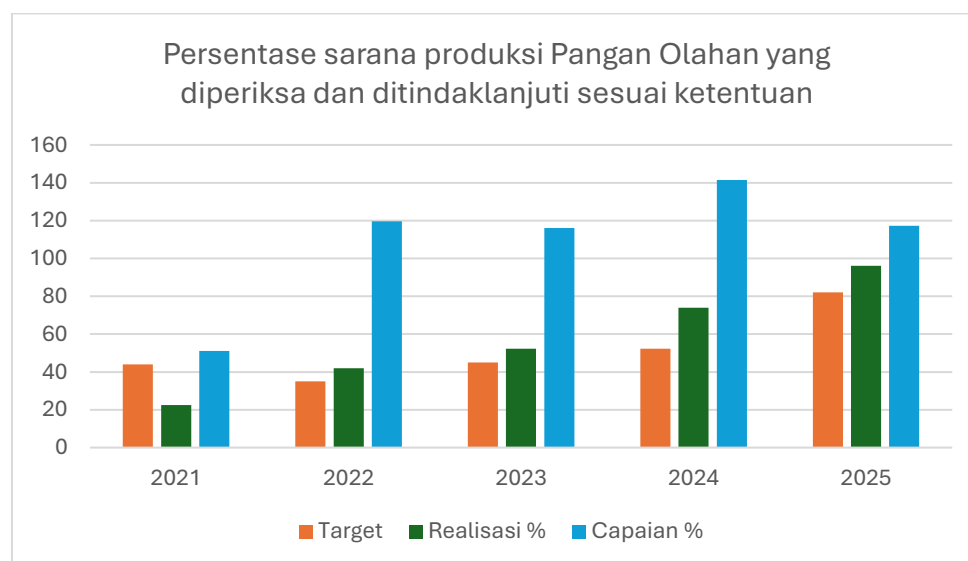
Hingga akhir Triwulan IV tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo sudah melakukan pengawasan sarana produksi pangan olahan sebanyak 17 sarana. di wilayah Loka POM di Kabupaten Bungo dengan hasil 11 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) yang berdasarkan evaluasi ketepatan waktu dan evaluasi ketepatan tindak

lanjut terdapat 1 sarana yang tidak sesuai sehingga diperoleh Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III tahun 2025 adalah 96,08%.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 39. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2021	44	22,45	51,02	Kurang	●
	2022	35	41,89	119,69	Sangat Baik	●
	2023	45	52,24	116,09	Sangat Baik	●
	2024	52,3	73,97	141,44	Sangat Baik	●
	2025	82	96,08	117,17	Sangat Baik	●



Grafik 6 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan grafik diatas selama periode renstra 5 tahun menjelaskan bahwa pada tahun 2021 capaian persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan masih kurang, tetapi hal ini mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya. Pada 2022 hingga tahun 2025 capaian persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan

ditindaklanjuti sesuai ketentuan secara konsisten selalu mencapai lebih dari 100% dengan kategori Sangat Baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

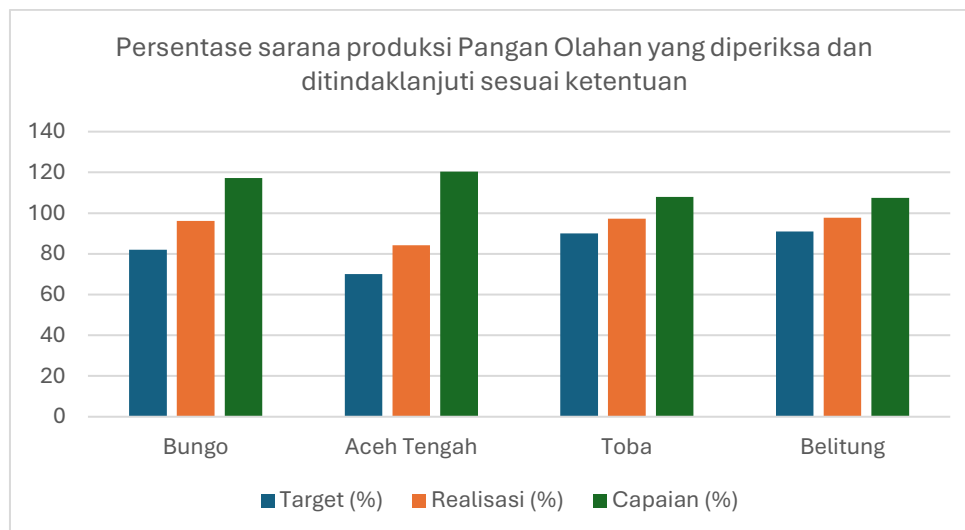
IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76	75,77	99,70	Akan Tercapai 

Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 memiliki capaian 117,72% terhadap target jangka menengah tahun 2027 dengan kategori capaian Tercapai/Melampaui. Kinerja ini sudah mencapai target namun tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga target tahun 2027 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Bungo	82	96,08	117,17	Sangat Baik	
	Aceh Tengah	70	84.21	120.30	Sangat Baik	
	Toba	90.00	97.22	108.02	Sangat Baik	
	Belitung	91	97.78	107.45	Sangat Baik	



Grafik 7. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan grafik diatas, capaian tertinggi diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dengan nilai 120,30% kategori Sangat Baik. Sedangkan ketiga Loka POM lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Bungo, Loka POM di Kabupaten Toba, dan Loka POM di Kabupaten Belitung dengan capaian di atas 100% dan kurang dari 120% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Lokpa POM di Kabupaten Bungo terkait Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan terlaksana dan terukur dengan baik sesuai perencanaan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Nilai realisasi persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 96,08% dengan capaian kinerja terhadap target Tahun 2025 sebesar 117,17% sehingga dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”. Keberhasilan capaian pada Tahun 2025 ini dikarenakan :

- a. Kontrol tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi dalam spreadsheet Hasil Pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 yang dikelola oleh Tim Pemeriksaan

- b. Percepatan pelaporan dan pemberian tindak lanjut terhadap rekomendasi dengan pembinaan ditempat pada saat pemeriksaan sarana dengan meminta komitmen terhadap rencana tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) kepada pelaku usaha
- c. Menerapkan pembinaan setempat terhadap pelaku usaha yang dapat memastikan untuk melaksanakan perbaikan berkelanjutan
- d. Aktif berkoordinasi dengan lintas sektor terkait terkait hasil pengawasan obat dan makanan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Tabel 41 Analisis Rekomendasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Potensi pendekatan informal oleh pelaku usaha di luar mekanisme resmi pemeriksaan yang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas pelaksanaan pemeriksaan serta tindak lanjut sarana produksi Pangan Olahan.	1. Melakukan penolakan dengan melengkapi surat tugas dengan atribut anti gratifikasi 2. Membuat postingan di media sosial terkait gratifikasi 3. Melaporkan melalui aplikasi Sang Integritas	1. Melakukan penolakan dengan melengkapi surat tugas dengan atribut anti gratifikasi 2. Membuat postingan di media sosial terkait gratifikasi 3. Melaporkan melalui aplikasi Sang Integritas	-	Ya	PEM 05 PEM 06	Pelaku Usaha memberikan gratifikasi kepada petugas

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Perubahan format perhitungan nilai indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang telah disesuaikan menjadi lebih komprehensif turut mendukung ketepatan pengukuran capaian kinerja. Selain itu, tingginya dedikasi serta peningkatan kompetensi petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sarana produksi berkontribusi terhadap pemberian penilaian (grading) dan penetapan tindak lanjut yang sesuai dengan pedoman yang berlaku.

IKU 7. Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 42 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	90,76	104,62	Sangat Baik



Nilai realisasi persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 90,76% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan IV sebesar 104,62% sehingga dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”. Hal ini menandakan fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa pada triwulan itu sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

a) Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

- 1) Persentase pemenuhan target pemeriksaan dihitung: Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa / jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa X 100 %
- 2) Persentase kesesuaian tindaklanjut dihitung: Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%

- 3) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut
- b) Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Rata-rata (a+b+c+d)

- a) Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi OBA = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target tahunan}) \times 100\%$
- b) Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat OBA = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$
- c) Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi OBA = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi}) \times 100\%$
- d) Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana OBA = $(\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindaklanjut})$

- c) Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Rata-rata (a+b+c+d)

- a) Pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target tahunan}) \times 100\%$.
- b) Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$.
- c) Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$.

- d) Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$.

Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sebanyak 194 sarana dengan rincian 112 sarana distribusi obat, 35 sarana distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan dan 47 sarana distribusi kosmetik. Selain itu pada bulan oktober Loka POM di kabupaten Bungo telah melakukan kegiatan intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam. Kegiatan tersebut dilakukan terhadap sarana distribusi obat bahan alam seperti toko obat herbal, depot jamu, lapak jamu, apotek maupun toko obat. Tujuan kegiatan tersebut yaitu Mengurangi risiko peredaran produk OBA BKO palsu, ilegal, dan tidak bermutu. Tindak lanjut terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan berupa surat peringatan, peringatan keras dan perbaikan CAPA. Tindak lanjut tersebut mengacu kepada pedoman tindak lanjut masing-masing komoditi. Peraturan Badan POM No 19 Tahun 2025 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Obat dan Peraturan BPON No 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Obat Tadisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik. Kesesuaian penentuan kriteria temuan sangat berpengaruh dalam pengambilan kesimpulan hasil pengawasan (Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 43. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	86,75	90,76	104,62	Sangat Baik 

Berdasarkan grafik diatas selama periode renstra 5 tahun menjelaskan bahwa pada tahun 2021 hingga tahun 2024 capaian Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat dihitung. Hal ini dikarenakan IKU Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan baru muncul pada tahun 2025 dengan realisasi capaian 104,62 % dengan kategori “Sangat Baik”. Pada tahun sebelumnya sarana distribusi sediaan farmasi masuk kedalam IKU Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Namun pada tahun 2025 IKU ini dipecah menjadi 2 yaitu Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Selain itu Defenisi Operasional (DO) juga mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori	
7	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90,76	100,84	Tercapai/Melampaui	

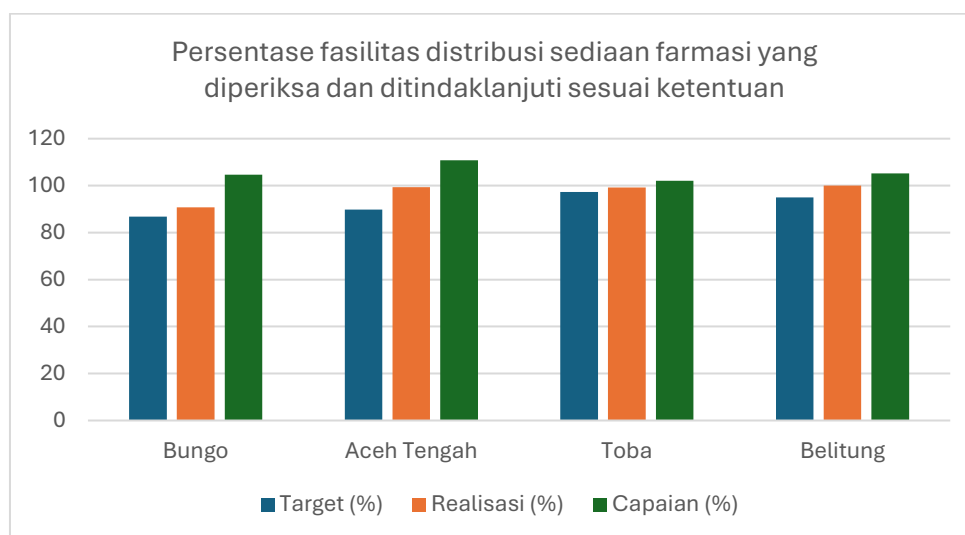
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 memiliki capaian 100,84% terhadap target jangka menengah tahun 2027 dengan kategori capaian Tercapai/Melampaui. Kinerja ini sudah mencapai target namun tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 44. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
-------------------------	-----	--------	-------------	-----------	----------

Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Bungo	86,75	90,76	104,62	Sangat Baik	●
	Aceh Tengah	89.75	99.41	110.76	Sangat Baik	●
	Toba	97.25	99.24	102.05	Sangat Baik	●
	Belitung	95	100	105.26	Sangat Baik	●



Grafik 8. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan grafik diatas, capaian tertinggi diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dengan nilai 110,76% kategori Sangat Baik. Sedangkan ketiga Loka POM lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Belitung, Loka POM di Kabupaten Bungo dan Loka POM di Kabupaten Toba capaian sudah melewati 100% dengan kategori Sangat Baik, yaitu masing-masing memiliki nilai 105,26%; 104,62% dan 102,05%. Tercapainya target Indikator ini dikarenakan komitmen petugas dalam menginput data laporan sesuai timeline yang telah ditetapkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Nilai realisasi persentase sarana fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 90,76% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan III sebesar 104,62% sehingga dikategorikan

dalam kriteria capaian “**Sangat Baik**”. Tercapainya realisasi Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disebabkan karena beberapa faktor, seperti:

- Penyampaian laporan SIPT yang dilakukan tepat waktu oleh masing-masing petugas serta ketepatan petugas dalam menentukan kesimpulan serta tindak lanjut hasil pengawasan.
- Supervisor independen dalam mengoreksi laporan SIPT dan surat tindak lanjut oleh petugas, Sehingga bisa meminimalisir ketidaksesuaian dalam pengambilan kesimpulan serta rutin melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pada link yang telah disediakan.
- Adanya Monitoring dan Evaluasi (Monev) berkala oleh supervisor independen diakhir bulan.

Tabel 45 Analisis Rekomendasi Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan dalam perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penyusunan laporan dan tindak lanjut melalui link internal maupun aplikasi SIPT	Terdapat perbedaan persepsi masing-masing petugas dalam menentukan kategori temuan. Hal ini akan menyebabkan kesalahan dalam menarik kesimpulan akhir sehingga memperpanjang durasi penginputan SIPT dikarenakan adanya perbaikan dari SPV.	- Sosialisasi dan sharing knowledge dari Inspektur - Membuat format surat tindak lanjut yang sudah dilengkapi dengan temuan dan kategori	Sudah dilakukan di TW IV	-	Ya	PEM 04	Perbedaan penilaian petugas dalam penentuan kategori temuan dan tindak lanjut sarana
2.	Melakukan kegiatan Forum Komunikasi dengan Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia terkait Cara Distribusi Obat yang Baik, Antimicrobial Resistant, dan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo	Masih banyak ditemukan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang belum menerapkan CDOB dan standar pengelolaan obat yang baik serta hamper disemua apotek menyerahkan antibiotika tanpa menggunakan resep dokter	- Perlu diadakannya Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada penanggung jawab sarana pelayanan kefarmasian tentang Cara Pengelolaan Obat yang Baik di Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Bimtek mengenai Antimicrobial Resistant (AMR)	Sudah dilakukan di TW II dan TW IV	-	Ya	PEM 15	Rendahnya komitmen dari pelaku usaha dalam pengendalian resistensi antibiotika

sesuai ketentuan

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program yang menunjang keberhasilan pencapaian target yaitu :

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Bungo. Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo telah menambah 1 orang Inspektur CDOB Senior.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administrative) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran
- Aktif berkomunikasi dengan pelaku usaha, terutama penanggung jawab sarana terkait timeline perbaikan yang telah disepakati.
- Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan sarana distribusi obat dan makanan.
- Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat terkait Keamanan Produk Obat, OBA, SK, Kuasi dan Kosmetik dan Cek KLIK (cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kadaluarsa).

IKU 8. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 46 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	96,6	108,54	Sangat Baik



Nilai realisasi persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan IV tahun 2025 adalah 96,60% sudah mencapai capaian kinerja terhadap target TW IV sebesar 89 dengan capaian 108,54% sehingga dapat dikategorikan dalam kategori capaian “**Sangat Baik**”.

Nilai Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dari (a+b+c):

- a. pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = $20\% \times ((\text{jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$
- b. Ketepatan tindak lanjut = $70\% \times ((\text{jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$
- c. Kesesuaian waktu pelaporan = $10\% \times ((\text{jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

Hingga akhir TW IV, Loka POM di Kabupaten Bungo sudah melakukan pengawasan sarana distribusi pangan olahan sebanyak 50 sarana. Selain itu pada bulan Desember 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo telah melakukan kegiatan intensifikasi pengawasan pangan menjelang natal dan tahun baru 2026. Target pengawasan yaitu sarana distributor, grosir, tokodan minimarket. Jumlah sarana yang diperiksa yaitu 27 sarana (22 sarana MK dan 5 sarana TMK). Jumlah temuan yaitu 28 item (582 pcs) dengan total nilai ekonomi Rp 3.987.000,-. Tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang tidak memenuhi ketentuan berupa surat peringatan. Apabila di sarana ditemukan produk tidak memenuhi syarat (TMS) seperti produk rusak, kadaluarsa dan tanpa izin edar (TIE) maka dilakukan pemusnahan produk oleh pelaku usaha sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 47. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	89	96,6	108,54	Sangat Baik 

Berdasarkan grafik diatas selama periode renstra 5 tahun menjelaskan bahwa pada tahun 2021 hingga tahun 2024 capaian Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat dihitung. Hal ini dikarenakan IKU Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan baru muncul pada tahun 2025 dengan realisasi capaian 108,54 % dengan kategori “Sangat Baik”. Pada tahun sebelumnya sarana distribusi pangan olahan masuk kedalam IKU Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Namun pada tahun 2025 IKU ini dipecah menjadi 2 yaitu Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Selain itu Defenisi Operasional (DO) juga mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

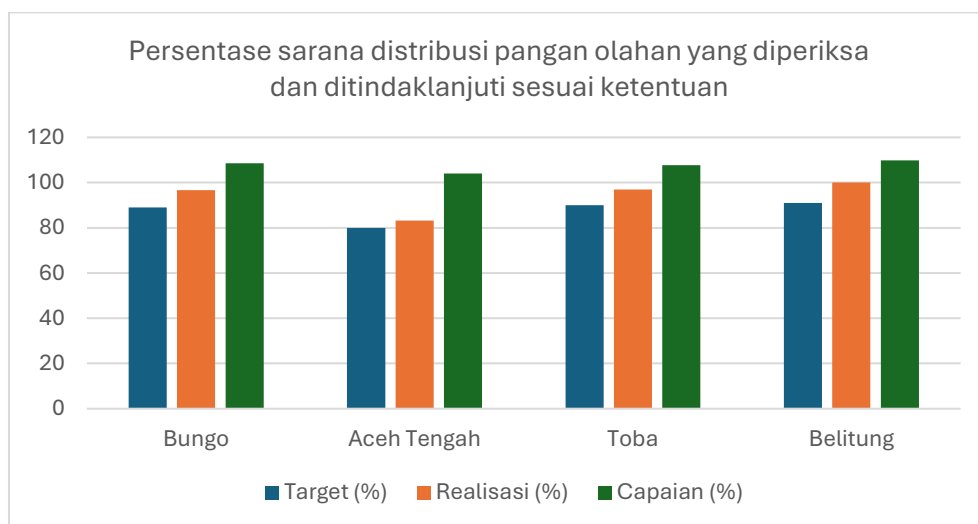
IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
8	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	96,6	106,15	Tercapai/ Melampaui 

Realisasi Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 memiliki capaian 106,15% terhadap target jangka menengah tahun 2027 dengan kategori capaian sangat baik dan tercapai. Kinerja ini sudah mencapai target namun tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 48. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Bungo	89	96,6	108,54	Sangat Baik	●
	Aceh Tengah	80	83.22	104.03	Sangat Baik	●
	Toba	90.00	96.92	107.69	Sangat Baik	●
	Belitung	91	100	109.89	Sangat Baik	●



Grafik 9. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan grafik diatas, capaian tertinggi diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Belitung dengan nilai 109,89% kategori Sangat Baik. Sedangkan ketiga Loka POM lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Bungo, Loka POM di Kabupaten Toba, dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah capaian sudah melewati 100% dengan kategori Cukup, yaitu masing-masing memiliki nilai 108,54 ; 107,69 dan 104,03. Tercapainya target ini disebabkan karena komitmen petugas dalam melaporkan SIPT sesuai timeline yang telah ditentukan pada SOP terkait.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Nilai realisasi persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan IV tahun 2025 adalah 96,60% sudah mencapai capaian kinerja terhadap target TW IV sebesar 89 dengan

capaian 108,54% sehingga dapat dikategorikan dalam kategori capaian “Sangat Baik”.

Beberapa penyebab tercapainya target IKU persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

- a. Kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat disetiap bulannya.
- b. Petugas mengambil keputusan hasil pemeriksaan sarana distribusi dan menyusun surat tindak lanjut berdasarkan Pedoman Tindak lanjut Pangan Olahan.
- c. Ketua tim aktif dalam memonitoring dan evaluasi terhadap pelaporan sarana melalui SIPT maupun bit.ly internal serta surat tindak lanjut.
- d. Adanya hasil evaluasi pelaporan SIPT yang dikirim pusat setiap triwulan.

Tabel 49 Analisis Rekomendasi Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan dalam perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penyusunan laporan dan tindak lanjut melalui link internal maupun aplikasi SIPT	Masih terdapat ketidaktepatan petugas dalam menginput hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan melalui SIPT	Membuat laporan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan	Sudah dilakukan diakhir TW IV	-	Ya	PEM 04	Perbedaan penilaian petugas dalam penentuan kategori temuan dan tindak lanjut sarana
2	Melakukan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi bersama dengan lintas sektor terkait	Terdapat penolakan dari pelaku usaha/pihak sarana ketika akan dilakukan pengawasan oleh petugas	Kegiatan intensifikasi pengawasan pangan dengan melibatkan lintas sektor, seperti intensifikasi Ramadhan dan menjelang Idul Fitri dan intensifikasi menjelang Natal dan Tahun Baru	Sudah dilakukan di Bulan Desember	-	Ya	PEM 09	Penolakan dari pelaku usaha saat pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan

sesuai ketentuan

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program yang menunjang keberhasilan pencapaian target yaitu :

- o Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Bungo, seperti Food Inspector Dasar/Muda/Madya, Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan pelatihan lain terkait pangan olahan. Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo telah menambah 1 orang Inspektur Pangan dasar.
- o Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administrative) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran
- o Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait Cara Ritel Pangan Olahan yang Baik dan Keamanan Pangan.
- o Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat terkait keamanan pangan dan Cek KLIK (cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kadaluarsa).

IKU 9. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 50 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,39	98,93	115,86 110	Sangat Baik 

Nilai presentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah 98,93% dengan capaian kinerja terhadap target 2025 sebesar 115,86% dengan normalisasi 100% mencapai kategori capaian **"Sangat Baik"**.

Pengawasan iklan dilaksanakan terhadap Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta Pangan Olahan. Adapun cara perhitungan presentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{e) \% Obat} &= (A+B)/2 \\ A &= (\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{Jumlah target iklan yang} \end{aligned}$$

- diawasi sesuai renlak) x 100%
- B = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu / jumlah target iklan yang diawasi) x 100%
- f) % OBAOK = (A+B+C)/3
- A = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- B = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
- C = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%
- g) % SK = (A+B+C)/3
- A = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- B = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
- C = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%
- h) % Kosmetik = (A+B)/2
- A = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media
- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%
- B = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2
- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
 - Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
- i) % PO = A+B+C
- A = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
- B = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%
- C = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

% iklan sediaan farmasi dan pangan olahan = %Obat + %OBAOK + %SK + %Kosmetik + %PO
/ 5

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 51. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	85,39	98,93	115,86	Sangat Baik 

Berdasarkan tabel diatas selama periode renstra menjelaskan bahwa pada tahun 2021 hingga tahun 2024 tidak terdapat target karena indikator kinerja ini belum menjadi perjanjian kinerja UPT Loka POM di Kabupaten Bungo. Pada tahun 2025 indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan telah menjadi perjanjian kinerja UPT Loka POM di Kabupaten Bungo, maka dapat diketahui bahwa diperoleh capaian sebesar 115,86% dengan dinormalisasi menjadi 110%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
9	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,59	98,93	111,67	Tercapai/ Melampaui 

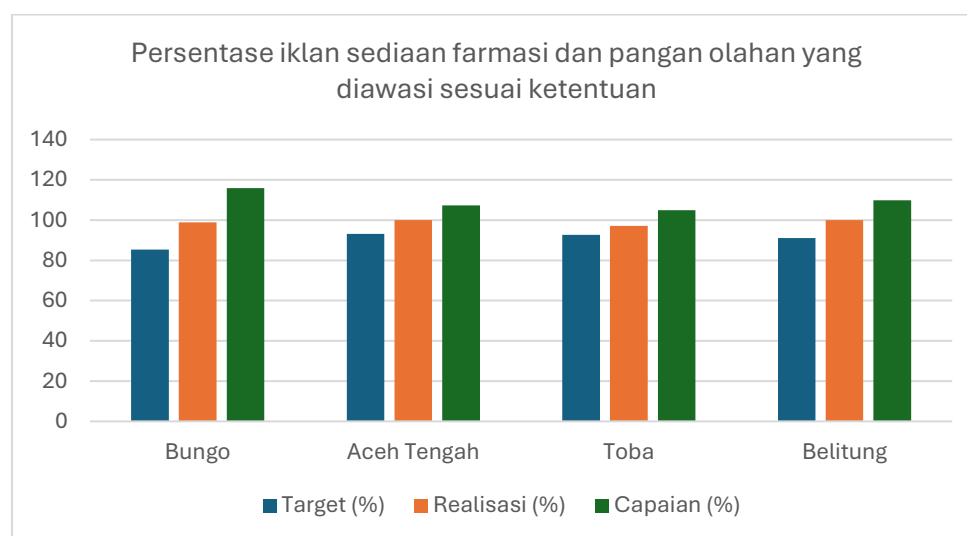
Capaian perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2027 pada indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang

diawasi sesuai ketentuan sebesar 111,67%. Hal ini dikategorikan dengan Tercapai/Melampaui untuk mencapai target di tahun pertengahan rencana strategis yaitu tahun 2027 sebesar 88,59. Kinerja ini sudah optimal dalam pencapaian, namun perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga target tahun 2027 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Bungo	85,39	98,93	115,86	Sangat Baik	●
	Aceh Tengah	93.2	99.93	107.22	Sangat Baik	●
	Toba	92.60	97.11	104.87	Sangat Baik	●
	Belitung	91	99.99	109.88	Sangat Baik	●



Grafik 10. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Berdasarkan grafik diatas, capaian tertinggi diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Bungo dengan nilai 115,86% kategori Sangat Baik. Sedangkan ketiga Loka POM lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Loka POM di Kabupaten Toba, dan Loka POM di Kabupaten Belitung termasuk kriteria Sangat Baik, namun nilai persentasenya lebih rendah dibandingkan

Loka POM di Kabupaten Bungo. Nilai masing-masing memiliki 107,22 ; 104,87 dan 109,88.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Nilai presentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah 98,93% dengan capaian kinerja terhadap target 2025 sebesar 115,86% dengan kategori capaian "Sangat Baik".

Penilaian ini berdasarkan perhitungan pada poin a, menandakan bahwa pelaksanaan pengawasan iklan masih sesuai ketentuan walau pun masih ada iklan yang masih berbeda penilaian dengan pusat. Kesesuaian dengan pusat juga menjadi penilaian dalam pengawasan iklan ini. Petugas telah mampu melakukan pengawasan terhadap iklan sesuai dengan jumlah yang telah direncanakan, melaporkan secara tepat waktu, dan kesesuaian kesimpulan yaitu Memenuhi Ketentuan atau Tidak Memenuhi Ketentuan. Namun, diharapkan petugas dapat melakukan pengawasan iklan lebih teliti sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis yang telah ditetapkan BPOM dengan ketepatan waktu yang sudah ditentukan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pelaksanaan belum sesuai pedoman/juknis	Melaksanakan pengawasan iklan sesuai pedoman/ juknis yang telah disediakan pada <i>database</i> iklan	Pengawasan iklan sesuai dengan pedoman/juknis yang telah disediakan pada <i>database</i> iklan	Desember 2025	Y	PEM 11	Ketidaksesuaian pemilihan kategori pengawasan iklan
2		Pelaporan yang belum tepat waktu	Melaksanaan pengawasan iklan dengan tepat waktu dengan mengingatkan petugas agar tidak lewat <i>timeline</i>	Telah dilakukan <i>reminder</i> kepada petugas agar melaksanakan pelaporan iklan dengan tepat waktu	Desember 2025	Y	PEM 11	Ketidaksesuaian pemilihan kategori pengawasan iklan

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan atau Kegagalan pencapaian kinerja dapat ditentukan oleh hal berikut :

1. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang telah sesuai
2. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

IKU 10. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 53 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	95,24	119,05 110	Sangat Baik 

Nilai presentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah 95,24% dengan capaian kinerja terhadap target 2025 sebesar 119,05% dengan normalisasi 110% mencapai kategori capaian "**Sangat Baik**". Pengawasan label dilaksanakan terhadap produk tembakau dan/atau rokok elektronik. Adapun cara perhitungan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar adalah sebagai berikut :

- a. Persentase pemenuhan jumlah target pengawasan label :

$$A = (\text{Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi} / \text{Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi}) \times 100\%$$

b. Persentase ketepatan waktu pelaporan label :

B = (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
= %A + %B/ 2

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 54. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	80	95,24	119,05	Sangat Baik 

Indikator Kinerja P Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar merupakan Indikator Kinerja yang baru. Indikator ini baru dimunculkan pada September 2025. Perhitungan Capaian dilaksanakan di akhir tahun 2025. Pada Tahun 2025 realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar yaitu 95,24% dari target 80% dengan persen capaian 119,05%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
-----	----------------------	-------------------	----------------------	-----------	----------

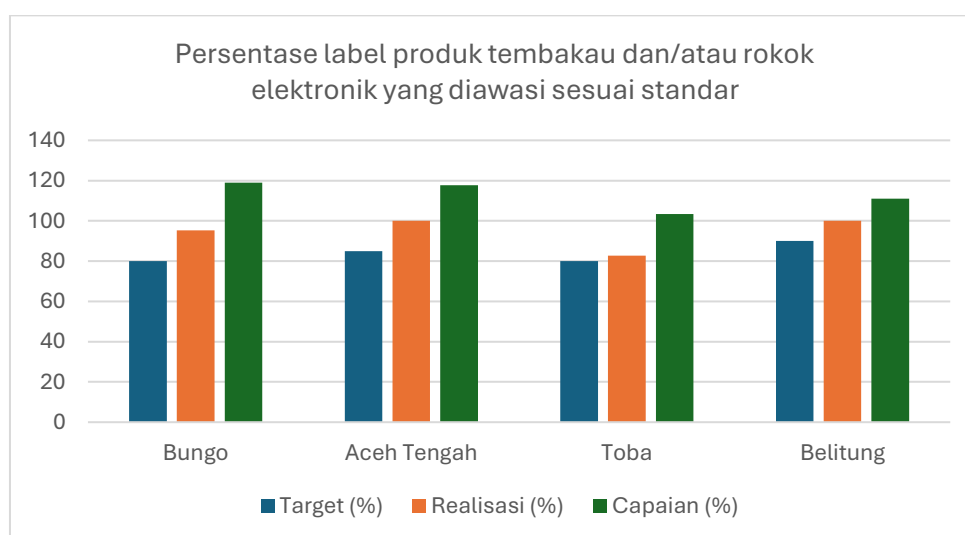
10	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	82	95,24	116,15	Tercapai/ Melampaui	
----	--	----	-------	--------	------------------------	---

Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar tahun 2025 memiliki capaian 116,15% terhadap target jangka menengah tahun 2027 dengan kategori capaian sangat baik dan tercapai. Kinerja ini sudah mencapai target namun tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga target tahun 2027 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 55. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Bungo	80	95,24	119,05	Sangat Baik	
	Aceh Tengah	85	100	117.65	Sangat Baik	
	Toba	80.00	82.76	103.45	Sangat Baik	
	Belitung	90	100	111.11	Sangat Baik	



Grafik 11. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Berdasarkan grafik diatas, capaian tertinggi diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Bungo dengan nilai 119,05% kategori Sangat Baik. Sedangkan ketiga Loka POM lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Belitung, Loka POM di Kabupaten Toba, dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah capaian sudah melewati 100% dengan kategori Sangat Baik, yaitu masing-masing memiliki nilai 111,11; 103,45 dan 117,65. Tercapainya target ini disebabkan karena komitmen petugas dalam melaporkan SIPT sesuai timeline yang telah ditentukan pada SOP terkait.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Nilai persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada tahun 2025 adalah 93,22% dengan capaian kinerja terhadap target 2025 sebesar 119,05% dengan kategori capaian "Sangat Baik". Penilaian ini berdasarkan perhitungan pada poin c, menandakan bahwa pelaksanaan pengawasan label tembakau masih sesuai ketentuan walaupun masih ada label tembakau yang masih dilaporkan belum tepat waktu. Petugas diharapkan dapat melakukan pengawasan label tembakau sesuai dengan pedoman/juknis yang telah ditetapkan BPOM dengan ketepatan waktu yang sudah ditentukan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Tidak ada kendala	-	-	-	-	-	-

f. **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Keberhasilan atau Kegagalan pencapaian kinerja dapat ditentukan oleh hal berikut :

1. Label yang diawasi adalah produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang harus diawasi sesuai juknis yang sudah ditetapkan.
2. Jumlah label dan Ketepatan waktu pelaporan label tembakau dan/atau rokok elektronik juga menjadi penilaian, sehingga petugas yang ditugaskan diwajibkan melaporkan penandaan label tembakau dan elektronik sesuai dengan target yang diberikan dan dilaporkan dengan tepat waktu.

IKU 11. Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 56 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	101,61	101,61
				Sangat Baik



Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan Indikator Kinerja yang baru. Indikator ini baru dimunculkan pada September 2025. Perhitungan Capaian dilaksanakan di akhir tahun 2025. Pada Tahun 2025 realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT yaitu 101,61% dari target 100 % dengan persen capaian 101,61%. Penilaian indikator kinerja UPT dalam pengendalian AMR di wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata % capaian terhadap target yang ditetapkan dari kegiatan :

- a) Pengawasan dengan menggunakan tools pengawasan antibiotik. Penilaian ini mempertimbangkan penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotika pada pemeriksaan apotek. Hingga akhir TW IV jumlah apotek yang telah diperiksa sebanyak 43 sarana apotek. Semua

pengawasan sarana apotek sudah menggunakan tools pengawasan antibiotika.

b) Bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba

Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo telah melakukan Bimbingan Teknis Pengendalian Resistensi Antimikroba pada tanggal 08 November 2025. Peserta Bimtek yaitu Apoteker Penanggung Jawab Apotek dan Pengurus IAI PC Kab Bungo.

c) Advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba

Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo telah melakukan kegiatan advokasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai penuh. Output hasil advokasi tersebut berupa Surat Edaran dari Pemerintah Daerah Kab/Kota. Pada tahun 2025 telah terbit sebanyak 2 surat edaran terkait pengendalian resistensi antibiotika yaitu surat edaran dari Walikota Kota Sungai Penuh dan Surat Edaran dari Bupati Kabupaten kerinci.

Selain itu pada Bulan Desember 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo telah melakukan kegiatan join inspection ke sarana penyedia obat-obatan hewan bersama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Bungo. Kegiatan ini bertujuan untuk pemantauan adanya penggunaan obat manusia pada sektor pengobatan hewan.

d) Publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotika tanpa resep dokter.

e) Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo telah melakukan publikasi terkait hasil pengawasan antibiotika pada TW III dan TW IV. Publikasi ini dilakukan pada media sosial (instagram) Loka POM di Kabupaten Bungo.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 57. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	2021	-	-	-	-

2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	
2025	100	101,61	101,61	Sangat Baik	

Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan Indikator Kinerja yang baru. Indikator ini baru dimunculkan pada September 2025. Perhitungan Capaian dilaksanakan di akhir tahun 2025. Pada Tahun 2025 realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT yaitu 101,61% dari target 100 % dengan persen capaian 101,61%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

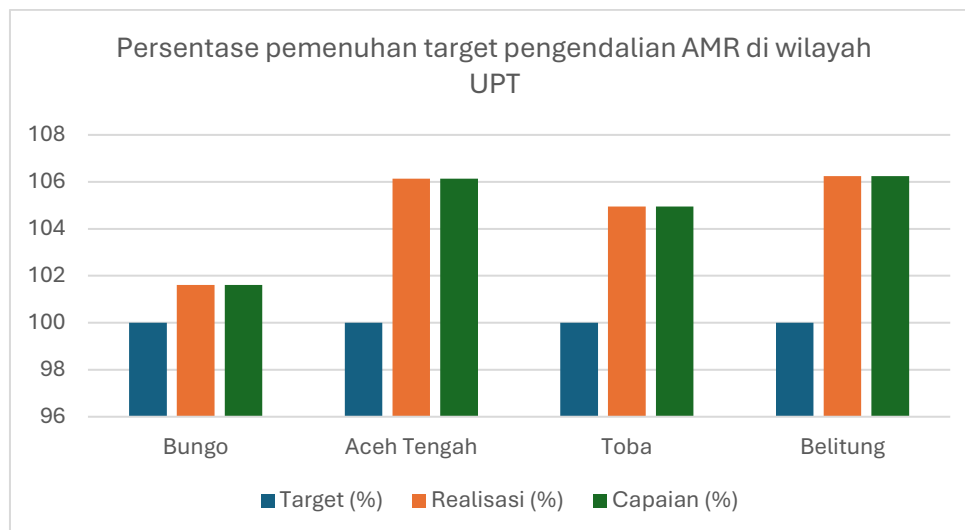
IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori	
11	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	101,61	101,61	Tercapai/ Melampaui	

Realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT tahun 2025 memiliki capaian 101,61% terhadap target jangka menengah tahun 2027 dengan kategori capaian sangat baik dan tercapai. Kinerja ini sudah mencapai target namun tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga target tahun 2027 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 58. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Bungo	100	101,61	101,61	Sangat Baik	
	Aceh Tengah	100	106.14	106.14	Sangat Baik	
	Toba	100.00	104.95	104.95	Sangat Baik	
	Belitung	100	106.25	106.25	Sangat Baik	



Grafik 12. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Berdasarkan grafik diatas, capaian tertinggi diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Belitung dengan nilai 106,25% kategori Sangat Baik. Sedangkan ketiga Loka POM lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Aceh tengah, Loka POM di Kabupaten Toba dan Loka POM di Kabupaten Bungo sudah mencapai target 100% dengan kategori Sangat Baik, yaitu masing-masing memiliki nilai 106,14; 104,95 dan 101,61. Pencapaian target dikarenakan adanya komitmen dari petugas dalam melakukan seluruh tahapan pengendalian resistensi antimikroba seperti penggunaan tools antibiotika saat pengawasan sarana apotek, melakukan Bimbingan Teknis Pengendalian AMR pada Apoteker Penanggung Jawab Apotek, melakukan kegiatan advokasi dengan pemerintah daerah sehingga terbit surat edaran dari kepala daerah tentang pengendalian resistensi antibiotika dan melakukan publikasi rutin (setiap) triwulan di media sosial Loka POM di Kabupaten Bungo.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan pencapaian IKU Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT disebabkan oleh beberapa faktor :

- a) Adanya komitmen dari pemerintah daerah (Kepala Daerah) terkait dengan pengendalian resistensi antimikroba. Hal ini didukung dengan adanya

penerbitan surat edaran dari Bupati Kabupaten Kerinci dan Walikota Kota Sungai penuh

- b) Kekonsistenan petugas dalam penggunaan tools AMR dalam pengawasan apotek serta pelaporan melalui SIPT.
- c) Komitmen dari Pengurus IAI dan Apoteker Penanggung Jawab Apotek dalam pengendalian resistensi antibiotika.

Tabel 59 Analisis Rekomendasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Melakukan kegiatan Forum Komunikasi dengan Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia terkait Cara Distribusi Obat yang Baik, Antimicrobial Resistant, dan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo	Masih banyak ditemukan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang belum menerapkan CDOB dan standar pengelolaan obat yang baik serta hamper di semua apotek menyerahkan antibiotika tanpa menggunakan resep dokter	Perlu diadakannya Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada penanggung jawab sarana pelayanan kefarmasian tentang Cara Pengelolaan Obat yang Baik di Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Bimtek mengenai Antimicrobial Resistant (AMR)	Sudah dilakukan di TW II dan TW IV	-	Ya	PEM 15	Rendahnya komitmen dari pelaku usaha dalam pengendalian resistensi antibiotika

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan Pengendalian Resistensi AMR :

- a) Komitmen dari lintas sektor seperti Dinas Kesehatan dalam melakukan monitoring penyerahan antibiotika tanpa resep di sarana pelayanan kefarmasian.
- b) Komitmen dari pelaku usaha (pemilik sarana apotek dan penanggung jawab apoteker) untuk tidak menyerahkan antibiotika tanpa resep dokter.
- c) Komitmen dari Masyarakat untuk tidak mengonsumsi antibiotika secara bebas.

- d) Adanya monitoring dan evaluasi dari BPOM Pusat terkait pelaksanaan rangkaian kegiatan pengendalian resistensi antimikroba

IKU 12. Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dihitung menggunakan form dan rumus Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang diberikan oleh PPPOMN. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Loka POM di Kabupaten Bungo dalam tingkatan pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT yaitu pada tier/tingkat 1.

- Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1, dapat dihitung berdasarkan rumus $(75 \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$
- Nilai pemenuhan SRL Loka POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$
- Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$
- Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 60 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5	11,97	104,09	Sangat Baik



Nilai realisasi pemenuhan Lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium pada tahun 2025 adalah 11,97% dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 104,09% dengan

kategori capaian "Sangat Baik". Rincian perolehan nilai pemenuhan lab Loka POM di Kabupaten Bungo yaitu Standar Ruang Lingkup 7,12, Standar Peralatan 17,50, dan Standar Kompetensi Laboratorium 40.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 61. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	11,5	11,97	104,09	Sangat Baik 

Berdasarkan tabel diatas selama periode renstra menjelaskan bahwa pada tahun 2021 hingga tahun 2024 tidak terdapat target karena indikator kinerja ini belum menjadi perjanjian kinerja UPT Loka POM di Kabupaten Bungo. Pada tahun 2025 indikator kinerja Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium telah menjadi perjanjian kinerja UPT Loka POM di Kabupaten Bungo, maka dapat diketahui bahwa diperoleh capaian sebesar 104,09%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
12	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	18	11,97	66,50	Perlu Upaya Keras 

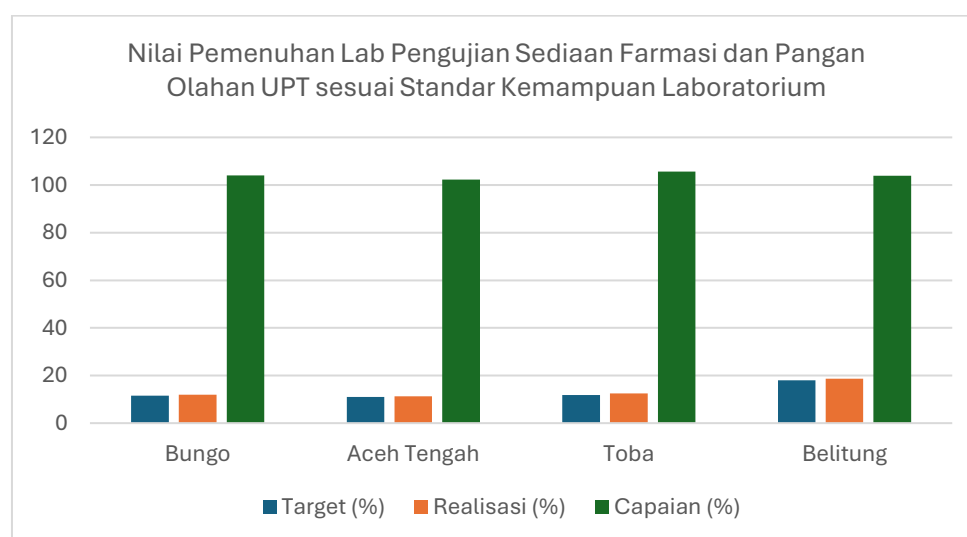
Capaian perbandingan realisasi tahun 2025 terhadap target tahun 2027 pada indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 66,50%. Hal ini dikategorikan dengan Perlu Upaya Keras untuk mencapai target di tahun pertengahan rencana strategis yaitu tahun 2027. Kinerja ini harus ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga target tahun 2027 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 62. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Bungo	11,5	11,97	104,09	Sangat Baik	●
	Aceh Tengah	11	11.25	102.27	Sangat Baik	●
	Toba	11.75	12.42	105.70	Sangat Baik	●
	Belitung	18	18.7	103.89	Sangat Baik	●



Grafik 13. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Berdasarkan grafik diatas, capaian tertinggi diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Toba dengan nilai 105,70% kategori Sangat Baik. Sedangkan ketiga Loka POM lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Bungo, Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, dan Loka POM di Kabupaten Belitung termasuk kriteria Sangat Baik, namun nilai persentasenya lebih rendah dibandingkan

Loka POM di Kabupaten Toba. Nilai masing-masing memiliki 104,09 ; 102,27 dan 103,89.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Nilai pemenuhan Lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium pada tahun 2025 adalah 11,97 dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 104,09% dengan kategori capaian "Sangat Baik". Tercapainya keberhasilan nilai pemenuhan laboratorium pada tahun 2025 ini dikarenakan adanya perencanaan yang dibuat sesuai dengan realisasi kegiatan yang dilakukan, baik pada Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, dan Standar Kompetensi Laboratorium, kemudian adanya komitmen dari petugas laboratorium untuk pemenuhan SKL, dan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait kebutuhan pemenuhan laboratorium SKL. Salah satunya yaitu dalam pemenuhan standar ruang lingkup yang direncanakan yaitu pada SRL ONAPPZA sebanyak 6 zat aktif yaitu Metilprednisolon, Ibuprofen, Domperidone, Triheksifenidil, Haloperidol, dan Asam Mefenamat. Kemudian yang telah direncanakan SRL Pangan sebanyak 4 identifikasi Identifikasi Arsen, Identifikasi Sianida, Identifikasi Nitrit, dan Identifikasi Pb telah terlaksana sesuai.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Ketidaksesuaian rencana zat aktif yang dilakukan pemenuhan ruang lingkup	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Monitoring dan evaluasi berkelanjutan rencana kegiatan pelaksanaan	Desember 2025	Y	Pengujian 5	Ketidakmampuan pemenuhan komponen SRL Obat yang telah ditetapkan

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pemenuhan SKL ini dengan melakukan

- Pemetaan dan perencanaan setiap bulan, triwulan, hingga tahunan agar tergambar kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai target IKU ini
- Melakukan monitoring secara berkala dan perbaikan berkelanjutan
- Melakukan pengadaan reagen, test kit dan alat gelas yang sesuai kebutuhan agar rencana kegiatan dapat dilaksanakan

IKU 13. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 63 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	25	25	100,00	Sangat Baik



Capaian kinerja Tahun 2025 untuk indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman menunjukkan bahwa target sebesar 25 kabupaten/kota telah berhasil direalisasikan sepenuhnya dengan capaian 100%, sehingga masuk kategori **Sangat Baik**. Hasil ini mencerminkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo terhadap seluruh kabupaten/kota sasaran telah berjalan efektif. Capaian 100% ini menegaskan keberhasilan strategi pendampingan dan menunjukkan kesiapan Loka POM dalam mendukung implementasi Kabupaten/Kota Pangan Aman secara menyeluruh dan berkelanjutan.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 64. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	25	25	100	Baik 

Berdasarkan Tabel 19, realisasi indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman pada Tahun 2025 tercapai 25 kabupaten/kota dari target 25 kabupaten/kota, atau 100% dengan kategori **Baik**.

Mengingat data capaian tahun-tahun sebelumnya (2021–2024) tidak tersedia atau belum dicatat, capaian 2025 ini menjadi acuan awal yang menggambarkan keberhasilan program pendampingan. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota sasaran menerima pendampingan secara efektif dan sesuai rencana. Keberhasilan ini juga menandai kemampuan Loka POM di Kabupaten Bungo dalam mengimplementasikan strategi advokasi, sosialisasi, pembinaan dan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman secara menyeluruh.

Pendampingan yang konsisten, koordinasi dengan pemerintah daerah, dan partisipasi aktif pemangku kepentingan lokal menjadi faktor kunci tercapainya target ini. Capaian ini diharapkan menjadi landasan untuk mempertahankan kualitas pendampingan dan memperluas cakupan program pada tahun-tahun berikutnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
13	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	75	25	33,33	Perlu Upaya Keras 

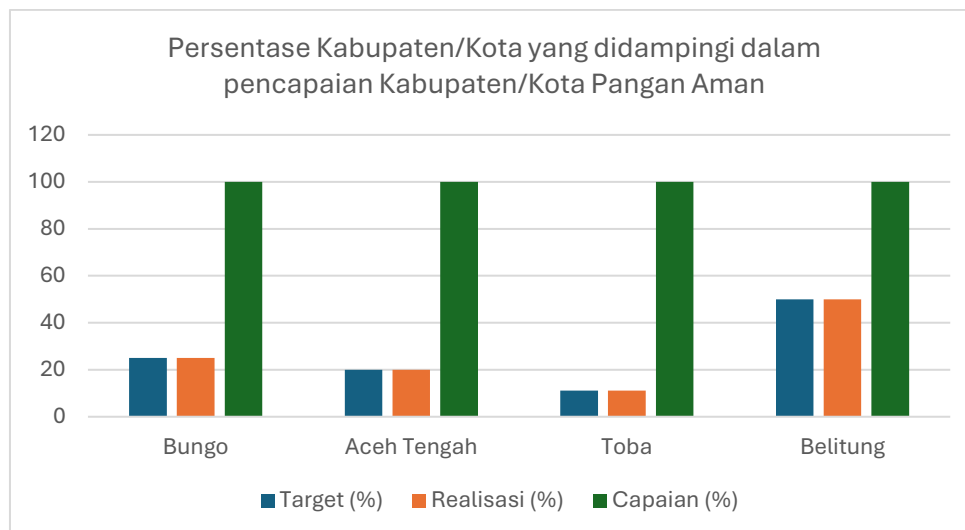
Berdasarkan dokumen Renstra, target jangka menengah Tahun 2027 untuk indikator **Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman** ditetapkan sebesar 75%. Hingga Tahun 2025, realisasi yang dicapai adalah 25%, atau sebesar 33,33% dari target jangka menengah, sehingga termasuk kategori **Perlu Upaya Keras**.

Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun target tahunan Tahun 2025 telah terpenuhi, secara kumulatif terhadap target jangka menengah masih diperlukan percepatan dan perluasan pendampingan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi implementasi program perlu diperkuat agar cakupan kabupaten/kota yang didampingi dapat meningkat secara signifikan hingga mencapai target 2027. Dengan demikian, diperlukan optimalisasi perencanaan kabupaten / kota yang akan direncanakan untuk didampingi pada tahun selanjut selanjutnya, peningkatan intensitas pendampingan kepada kabupaten/kota yang telah atau belum dilakukan pendampingan dalam penilaian kabupaten/kota pangan aman, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan target jangka menengah dapat tercapai sesuai waktu yang ditetapkan.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 65. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Bungo	25	25	100.00	Baik	
	Aceh Tengah	20	20	100.00	Baik	
	Toba	11.11	11.11	100.00	Baik	
	Belitung	50	50	100.00	Baik	



Grafik 14. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Berdasarkan Tabel 20 dan Grafik 14, realisasi capaian indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Bungo mencapai target 25% dengan realisasi 25% atau 100% capaian kinerja, sehingga masuk kategori **Baik**.

Apabila dibandingkan dengan UPT pembanding dalam Cluster 3, yaitu Loka POM di Aceh Tengah, Loka POM di Toba, dan Loka POM di Belitung, seluruh UPT tersebut juga menunjukkan capaian 100% terhadap target masing-masing dengan kategori Baik.

Meskipun terdapat perbedaan nilai target (Bungo 25%, Aceh Tengah 20%, Toba 11,11%, dan Belitung 50%), seluruh satuan kerja mampu merealisasikan target yang telah ditetapkan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa secara kinerja tahunan, Loka POM di Kabupaten Bungo berada pada posisi yang setara dengan UPT pembanding dalam hal efektivitas pelaksanaan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Perbedaan besaran target (Bungo 25%, Aceh Tengah 20%, Toba 11,11%, dan Belitung 50%) mencerminkan variasi jumlah kabupaten/kota binaan serta kondisi geografis masing-masing wilayah kerja. Loka POM dengan cakupan wilayah yang luas dan akses geografis menantang memerlukan intensitas pendampingan yang lebih tinggi, terutama dalam koordinasi lintas sektor dan kunjungan lapangan. Dalam konteks ini, capaian 25% oleh Loka POM di

Kabupaten Bungo menunjukkan kapasitas pengelolaan program yang terencana, khususnya jika mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan wilayah binaan. Perbedaan besaran target lebih dipengaruhi jumlah kabupaten/kota binaan serta penyesuaian dengan target penetapan pusat. Secara umum, kinerja Cluster 3 pada indikator ini dapat dikategorikan sangat baik karena seluruh unit mencapai target secara penuh.

Pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi karena tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup advokasi kebijakan daerah, penguatan kapasitas SDM pemerintah daerah, monitoring implementasi program keamanan pangan, serta evaluasi pemenuhan indikator nasional. Kompleksitas ini sangat dipengaruhi oleh tingkat komitmen pemerintah daerah, kesiapan regulasi, serta dukungan lintas sektor di masing-masing wilayah binaan. Dengan demikian, meskipun seluruh UPT pada Cluster 3 mencatat capaian 100%, perbedaan kesiapan dan kondisi daerah binaan tetap menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kesulitan dalam pencapaian target di lapangan.

Dari sisi produktivitas terhadap target, capaian 100% perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan besaran target absolut yang ditetapkan. Sebagai contoh, Loka POM di Belitung memiliki target relatif lebih tinggi (50%) sehingga secara kuantitatif menunjukkan cakupan pendampingan yang lebih besar. Sementara itu, Loka POM di Kabupaten Bungo berada pada posisi menengah dengan target 25% yang dinilai realistis dan proporsional terhadap kapasitas sumber daya yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Bungo masih memiliki ruang untuk meningkatkan target secara bertahap pada tahun berikutnya tanpa mengurangi kualitas dan efektivitas pendampingan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Analisa Penyebab Keberhasilan program Kabupaten/Kota Pangan aman tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Advokasi kepada lintas sektor

Advokasi dilakukan secara aktif kepada perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait guna membangun komitmen, menyamakan persepsi, serta memperkuat dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan program Kabupaten/Kota Pangan Aman. Melalui koordinasi lintas sektor yang intensif, setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

2. **Program jemput bola kepada UPTD serta pengumpulan data dukung**

Loka POM di Kabupaten Bungo menerapkan pendekatan proaktif melalui program *jemput bola* kepada UPTD terkait program yang dilaksanakan. Dalam kegiatan ini, petugas tidak hanya melakukan pendampingan teknis tetapi juga memantau dan membantu pengumpulan data dukung secara langsung. Strategi ini memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian eviden dengan indikator penilaian sehingga meminimalkan kekurangan pada saat evaluasi.

3. **Monitoring dan evaluasi melalui tools pelaporan secara rutin**

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan tools pelaporan yang tersedia. Pemantauan rutin ini memungkinkan identifikasi kendala sejak dini, percepatan tindak lanjut, serta pengendalian capaian agar tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, progres pendampingan dapat terukur dan terdokumentasi dengan baik.

4. **Pembinaan dan sosialisasi sejak awal tahun berjalan**

Pembinaan dan sosialisasi telah dilaksanakan sejak awal tahun anggaran, sehingga pemerintah daerah dapat merencanakan dan menetapkan program serta laporan yang relevan untuk dimasukkan dalam penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman pada tahun berjalan. Pendekatan ini memberikan kejelasan arah pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan kesiapan daerah dalam memenuhi seluruh indikator yang dipersyaratkan.

Analisa Kegagalan atau penurunan kinerja dari program kabupaten/ kota pangan aman tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. **Rendahnya partisipasi UPTD dan pemerintah daerah**

Keinginan UPTD dan pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam program Kabupaten/Kota Pangan Aman masih relatif rendah. Hal ini disebabkan tidak adanya mekanisme *reward and punishment* yang jelas bagi pemerintah daerah, baik dalam bentuk apresiasi atas keikutsertaan maupun konsekuensi atas ketidakterlibatan. Kondisi tersebut menyebabkan program belum menjadi prioritas utama dalam agenda kerja daerah.

2. Persepsi bahwa program bukan kebutuhan daerah

Sebagian pemerintah daerah masih memandang bahwa program Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan semata, sehingga belum dianggap sebagai kebutuhan strategis daerah. Persepsi ini berdampak pada rendahnya komitmen anggaran, dukungan kebijakan, dan alokasi sumber daya untuk mendukung pemenuhan indikator penilaian.

3. Tidak adanya arahan langsung dari pimpinan daerah

Ketiadaan arahan atau instruksi langsung dari pimpinan daerah dalam forum resmi seperti rapat koordinasi menyebabkan perangkat daerah di tingkat pelaksana kurang memiliki dorongan dan motivasi untuk menginput serta melengkapi data dukung penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Dukungan kepemimpinan yang kurang kuat berdampak pada lemahnya pergerakan organisasi di tingkat bawah.

4. Kurangnya pemahaman UPTD terhadap ruang lingkup tugas dalam penilaian KKP

Pemahaman UPTD mengenai program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam penilaian KKPA masih belum merata. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam mengidentifikasi kegiatan yang relevan serta dalam mengumpulkan dokumen pendukung yang sesuai dengan indikator yang dipersyaratkan.

5. Keterbatasan dokumen administrasi sebagai data dukung

Dalam beberapa kasus, kegiatan yang sebenarnya relevan dengan indikator penilaian telah dilaksanakan, namun tidak didukung dengan dokumen administrasi yang lengkap seperti Surat Tugas (ST) dan Laporan Perjalanan Dinas (LPD/LPH). Dokumentasi yang tersedia seringkali hanya berupa foto kegiatan tanpa kelengkapan administrasi formal, sehingga menyulitkan

proses verifikasi dan pengumpulan data dukung dalam penilaian mandiri KKPA.

Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada ketiadaan kegiatan, melainkan pada aspek komitmen, persepsi kepemilikan program, penguatan kepemimpinan daerah, serta tata kelola dokumentasi administrasi yang belum optimal.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

1. Pelaksanaan advokasi dan sosialisasi sejak awal tahun

Advokasi, pemberitahuan, dan sosialisasi kepada pemerintah daerah perlu dilakukan sejak awal tahun anggaran, sehingga pemerintah daerah memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan program, mengalokasikan anggaran, serta menyiapkan data dukung yang relevan dalam menunjang penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA). Pendekatan ini juga bertujuan membangun komitmen sejak tahap perencanaan.

2. Penguatan komitmen pimpinan daerah melalui audiensi dan rapat koordinasi

Perlu dilakukan audiensi langsung dengan pimpinan daerah agar terdapat arahan dan instruksi resmi kepada seluruh perangkat daerah terkait pentingnya dukungan terhadap program KKPA. Dukungan pimpinan akan meningkatkan motivasi perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan dan penginputan data dukung.

3. Penyusunan panduan teknis dan pemetaan tugas UPTD

Diperlukan penyusunan panduan sederhana yang memuat daftar indikator, jenis kegiatan yang dapat diakui, serta contoh dokumen pendukung yang sah. Dengan adanya pemetaan tugas yang jelas, UPTD tidak lagi mengalami kebingungan dalam mengidentifikasi kegiatan yang dapat dimasukkan dalam penilaian KKPA.

4. Peningkatan kualitas dokumentasi administrasi kegiatan

Perlu dilakukan pembinaan khusus terkait pentingnya kelengkapan administrasi seperti Surat Tugas (ST), Laporan Perjalanan Dinas (LPD/LPH), daftar hadir, dan laporan kegiatan resmi. Setiap kegiatan yang berpotensi

mendukung indikator KKPA harus terdokumentasi secara lengkap agar dapat diverifikasi pada saat penilaian.

5. Penerapan monitoring berkala dan sistem pengingat (reminder)

Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala dengan sistem pengingat kepada UPTD terkait progres pengumpulan data dukung. Pendekatan ini bertujuan mencegah penumpukan pekerjaan di akhir periode serta memastikan seluruh indikator dapat dipenuhi tepat waktu.

6. Mendorong integrasi program KKPA dalam dokumen perencanaan daerah

Program Kabupaten/Kota Pangan Aman perlu diupayakan untuk masuk dalam dokumen perencanaan daerah agar tidak dipandang sebagai program eksternal semata. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki rasa kepemilikan yang lebih kuat terhadap program dan keberlanjutannya dapat lebih terjamin.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemerintah daerah, memperkuat kualitas data dukung, serta mendorong pencapaian target KKPA secara lebih optimal dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Kabupaten/Kota Pangan Aman	Rendahnya partisipasi UPTD dan pemerintah daerah	Advokasi dan sosialisasi sejak awal tahun	Melaksanakan rapat koordinasi dan penyampaian surat resmi dukungan program di awal tahun anggaran	Triwulan I	Y	Infokom 13	Rendahnya komitmen daerah dalam mendukung program
2	Kabupaten/Kota Pangan Aman	Persepsi bahwa program merupakan tugas BPOM semata	Penguatan pemahaman bahwa program merupakan kebutuhan daerah	Audiensi dengan pimpinan daerah dan integrasi program dalam dokumen perencanaan daerah	Triwulan I–II	T	-	
3	Kabupaten/Kota Pangan Aman	Tidak adanya arahan langsung dari pimpinan daerah	Penguatan komitmen pimpinan melalui audiensi	Penyampaian paparan resmi dalam rapat pimpinan daerah dan penerbitan surat dukungan	Triwulan I	T	-	
4	Kabupaten/Kota Pangan Aman	Kurangnya pemahaman UPTD terkait indikator KKPA	Penyusunan panduan teknis dan pemetaan tugas	Penyusunan dan distribusi panduan indikator serta pelaksanaan bimbingan teknis	Triwulan I–II	T	-	
5	Kabupaten/Kota Pangan Aman	Keterbatasan dokumen administrasi (ST, LPD/LPH)	Peningkatan kualitas dokumentasi administrasi	Pembinaan khusus terkait kelengkapan administrasi dan monitoring berkala	Triwulan I–IV	T	-	
6	Kabupaten/Kota Pangan Aman	Potensi keterlambatan pengumpulan data dukung	Monitoring berkala dan sistem reminder	Penerapan monitoring triwulanan dan pengingat rutin kepada UPTD	Triwulan I–IV	T	-	

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan, yaitu :

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan data dukung
Kemampuan UPTD dalam menggunakan teknologi informasi menjadi faktor pendukung utama dalam keberhasilan program. Pengumpulan data penilaian dapat dilakukan secara digital melalui platform daring, sehingga tidak harus menunggu rapat tatap muka maupun membawa dokumen dalam bentuk hard copy. Hal ini membuat proses lebih efisien, cepat, dan terdokumentasi dengan baik.
2. Koordinasi rutin secara daring dan luring
Pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala membantu menyamakan persepsi antarperangkat daerah serta memantau progres pengumpulan data dukung. Forum ini juga menjadi sarana penyelesaian kendala teknis secara langsung dan terarah.
3. Pendampingan teknis langsung kepada UPTD
Kegiatan pendampingan lapangan atau kunjungan langsung memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai indikator penilaian dan jenis dokumen yang dapat diakui sebagai data dukung. Pendekatan ini meningkatkan ketepatan dan kualitas eviden yang dikumpulkan.
4. Monitoring dan evaluasi berkala
Monitoring yang dilakukan secara periodik memungkinkan identifikasi kendala sejak dini serta percepatan tindak lanjut. Dengan demikian, risiko keterlambatan atau kekurangan data dukung dapat diminimalkan.
5. Pembinaan kelengkapan administrasi
Pembinaan terkait penyusunan dokumen administrasi seperti Surat Tugas (ST), Laporan Perjalanan Dinas (LPD/LPH), daftar hadir, dan laporan kegiatan resmi membantu memastikan bahwa setiap kegiatan terdokumentasi secara sah dan dapat diverifikasi dalam penilaian.
6. Komunikasi aktif melalui media koordinasi
Pemanfaatan grup komunikasi atau media koordinasi lainnya mempermudah penyampaian informasi, pengingat tenggat waktu, serta

klarifikasi dokumen secara cepat dan responsif, sehingga proses pengumpulan data berjalan lebih lancar.

3.1.1.2 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Capaian ini didukung dari 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada Sasaran Strategis (SS) 3 terhadap target Tahun 2025 diperoleh rata-rata 100,78 dengan kriteria **“Sangat Baik / Tercapai”** Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 66. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

Sasaran Strategis	IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun	Realisasi		Kategori Terhadap Target	
				Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	Tahun 2025	Tahun 2025
2 Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT	86,83	89,56	103,14	Sangat Baik 	Tercapai 
	15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	100,00	Baik 	Tercapai 
	16	Jumlah desa pangan aman	1	1	100,00	Baik 	Tercapai 
	17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	Baik 	Tercapai 

IKU 14. Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 67 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	86,83	89,56	103,14	Sangat Baik



Nilai tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT pada triwulan III adalah 89,56% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan III tahun 2025 sebesar 102,14% dengan kategori capaian "Sangat Baik". Tingkat efektivitas KIE diukur melalui survei yang melibatkan masyarakat sebagai sasaran yang terpapar kegiatan KIE, baik melalui tatap muka maupun KIE media pada bulan berjalan. Survei efektivitas KIE tahun 2025 terdiri atas dua jenis, yaitu survei tatap muka dan survei media. Indikator penilaian pada survei tatap muka meliputi narasumber atau petugas, konten atau informasi, pemahaman audiens, serta manfaat kegiatan. Sementara itu, indikator survei media mencakup sumber informasi, konten atau informasi, pemahaman audiens, dan manfaat dari informasi yang disampaikan.

Penentuan jumlah responden dalam survei dilakukan berdasarkan perhitungan target KIE tahunan. Untuk tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo menetapkan target peserta KIE sebanyak 95 orang, dengan target survei efektivitas sebesar 86,83 setiap triwulan.

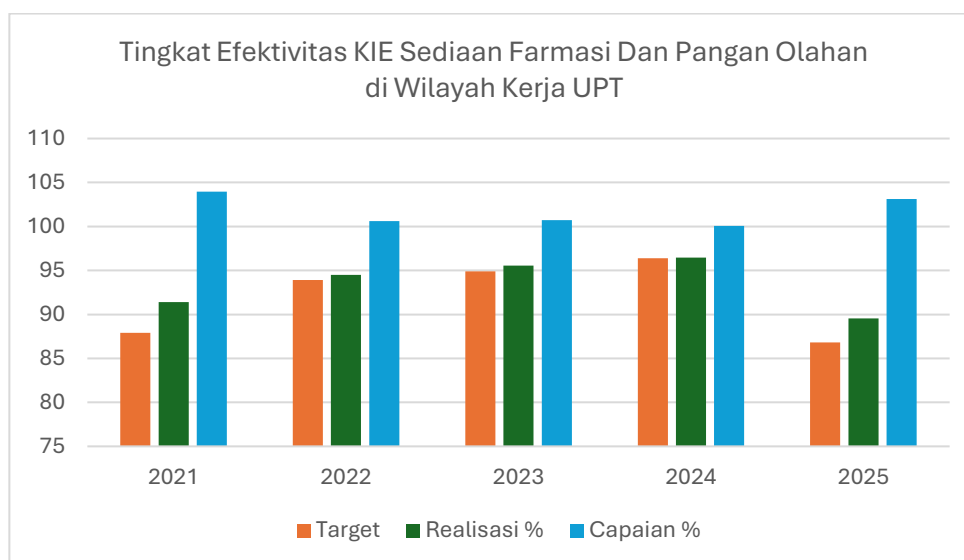
Pada TW IV Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Bungo melaksanakan KIE Pameran Obat dan Makanan, berpartisipasi dalam Pameran Pembangunan Bungo Expo 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Kabupaten Bungo. Pada kegiatan tersebut, Loka POM menyelenggarakan pameran Obat dan Makanan Aman sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih, menggunakan, dan mengonsumsi obat serta pangan yang aman dan sesuai ketentuan. Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan MTQ Baru dan berlangsung meriah selama periode 19 hingga 25 Oktober 2025.

Hasil pengukuran efektivitas menunjukkan bahwa nilai efektivitas KIE tatap muka sebesar 86,95, sedangkan efektivitas KIE media sebesar 92,17. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh rata-rata Indeks Efektivitas KIE sebesar 89,56.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 68. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT	2021	87,92	91,39	103,95	Sangat Baik	●
	2022	93,9	94,48	100,62	Sangat Baik	●
	2023	94,9	95,57	100,71	Sangat Baik	●
	2024	96,4	96,48	100,08	Sangat Baik	●
	2025	86,83	89,56	103,14	Sangat Baik	●



Grafik 15. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

Capaian tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan menunjukkan kinerja yang sangat baik sepanjang periode 2021–2025. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 103,95% (kategori Sangat Baik), tahun 2022 sebesar 100,62% (Sangat Baik), tahun 2023 sebesar 100,71% (Sangat Baik), tahun 2024 sebesar 100,08% (Sangat Baik), dan tahun 2025 meningkat menjadi 103,14%.

Data tersebut menunjukkan bahwa selama periode Renstra lima tahun, tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan secara konsisten melampaui target dengan capaian di atas 100%. Hal ini mencerminkan perencanaan yang matang, pelaksanaan kegiatan yang optimal, serta monitoring dan evaluasi yang berjalan secara berkelanjutan.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi tim dalam pelaksanaan KIE baik secara langsung maupun melalui media komunikasi. Optimalisasi metode pemanfaatan media, serta penguatan koordinasi internal dan eksternal turut mendukung tercapainya hasil yang maksimal.

Selain itu, capaian tersebut juga menunjukkan adanya efisiensi dalam pemanfaatan anggaran. Kegiatan KIE dilaksanakan secara efektif dengan pengelolaan sumber daya yang tepat, pemanfaatan metode online, sehingga target kinerja tidak hanya tercapai tetapi juga melampaui sasaran yang ditetapkan.

Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas, inovasi strategi, serta adaptasi terkait anggaran yang tetap menyesuaikan kebutuhan masyarakat tetap perlu dilakukan setiap tahun guna menjaga keberlanjutan capaian dan meningkatkan dampak program di tahun berikutnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
14	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	88,57	89,56	101,12	Tercapai/ Melampaui 

Realisasi tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT pada tahun 2025 mencapai 101,12% terhadap target jangka menengah tahun 2027, dengan kategori capaian **Sangat Baik** dan dinyatakan telah memenuhi sasaran kinerja yang ditetapkan.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program KIE telah berlangsung secara efektif dan selaras dengan perencanaan strategis

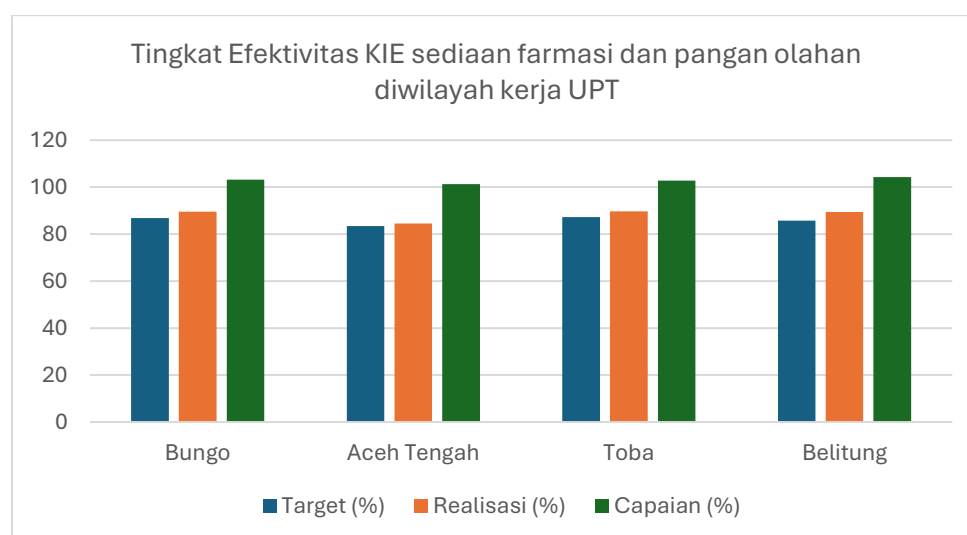
jangka menengah. Secara kuantitatif, nilai capaian di atas 100% menunjukkan kinerja yang melampaui target antara yang direncanakan menuju tahun 2027.

Meskipun indikator kinerja telah tercapai, diperlukan upaya konsistensi dan pemaksimalan strategi pelaksanaan program melalui peningkatan kualitas materi, metode penyampaian, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi. Pendekatan ini penting untuk memastikan keberlanjutan kinerja, menjaga konsistensi capaian pada tahun-tahun berikutnya, serta menjamin terpenuhinya target jangka menengah tahun 2027 secara optimal dan berkelanjutan.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 69. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Bungo	86,83	89,56	103,14	Sangat Baik	●
	Aceh Tengah	83.48	84.56	101.29	Sangat Baik	●
	Toba	87.24	89.73	102.85	Sangat Baik	●
	Belitung	85.78	89.46	104.29	Sangat Baik	●



Grafik 16. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT

Tabel tersebut menyajikan perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan antara Loka POM di Kabupaten Bungo dengan beberapa UPT lainnya, yaitu Aceh Tengah, Toba, dan Belitung. Secara umum, seluruh UPT menunjukkan kinerja yang melampaui

target dengan kategori **Sangat Baik**, karena persentase capaian berada di atas 100%.

Loka POM di Kabupaten Bungo menetapkan target sebesar 86,83 dan merealisasikan 89,56 sehingga mencapai 103,14%. Capaian ini menempatkan Bungo pada posisi kedua tertinggi setelah UPT Belitung yang mencatatkan capaian 104,29%. Sementara itu, UPT Toba mencapai 102,85% dan UPT Aceh Tengah 101,29%. Perbedaan capaian antar UPT relatif tipis, yang menunjukkan tingkat kinerja yang kompetitif dan konsisten di masing-masing wilayah kerja. Dari sisi komparatif, capaian Loka POM di Kabupaten Bungo berada di atas rata-rata sebagian besar UPT yang dibandingkan, kecuali Belitung. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan KIE di Bungo telah berjalan optimal dan mampu bersaing dengan UPT lain dalam pencapaian indikator kinerja.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan ini memperlihatkan bahwa Loka POM di Kabupaten Bungo memiliki kinerja yang sangat baik dalam implementasi KIE sediaan farmasi dan pangan olahan. Meskipun demikian, evaluasi berkelanjutan dan inovasi strategi tetap diperlukan agar capaian dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode berikutnya.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Capaian kinerja Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan yang berada pada kategori **Sangat Baik** serta melampaui target menunjukkan bahwa strategi perencanaan dan pelaksanaan program telah berjalan secara optimal. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perencanaan kegiatan yang berbasis target kinerja yang terukur, pelaksanaan KIE secara terpadu melalui metode langsung dan media, serta dukungan koordinasi internal yang solid. Selain itu, komitmen sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan sesuai standar operasional dan jadwal yang telah ditetapkan turut berkontribusi terhadap capaian yang konsisten di atas 100%.

Peningkatan kinerja juga didukung oleh optimalisasi pemanfaatan anggaran dan sumber daya, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Inovasi dalam metode penyampaian materi, perluasan

sasaran edukasi, serta pemanfaatan media komunikasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi turut memperkuat dampak pelaksanaan KIE di wilayah kerja.

Meskipun tidak terdapat penurunan signifikan dalam capaian kinerja, tetap terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, seperti keterbatasan jangkauan wilayah, variasi tingkat pemahaman masyarakat, serta dinamika perubahan regulasi dan isu strategis di bidang obat dan pangan. Tantangan ini berpotensi memengaruhi konsistensi capaian apabila tidak diantisipasi dengan strategi yang tepat.

Sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, diperlukan penguatan perencanaan berbasis analisis risiko, peningkatan kualitas materi dan metode KIE yang lebih partisipatif, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi berbasis data. Selain itu, penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih masif akan menjadi langkah strategis untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya. Dengan pendekatan tersebut, keberlanjutan dan peningkatan efektivitas KIE diharapkan dapat terus terjaga secara konsisten.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Belum terlaksananya perencanaan KIE Tatap Muka dan Media Sosial (TW I-IV)	Dilaksanakannya semua perencanaan yang sudah dibuatkan dan dimonitoring setiap ada kendala dan hambatan	Sudah terlaksana pada setiap triwulan, untuk tahun berikutnya dibuatkan perencanaan dan evaluasi kembali agar KIE yang terlaksana termonitoring	Setiap Triwulan	Y	Infokom 06	Kegiatan tidak berjalan sesuai target dan timeline
	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Adanya efisiensi anggaran KIE	Membuat kegiatan lebih bervariasi dengan pilihan daring dan memaksimalkan media sosial	Memaksimalkan anggaran yang tersedia agar capaian KIE tetap dapat memenuhi capaian	Sudah dilaksanakan yaun 2025, dengan capaian memenuhi target capaian.	Y	Infokom 07	Tidak dapat melaksanakan kegiatan Lapak POM SAPAKAT (Layanan Aktif Bergerak Pengawas Obat dan Makanan Sapa Masyarakat) diseluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Adanya Planning Of Action (PoA) pada KIE Tatap Muka dan KIE Media dan dievaluasi disetiap triwulan.
2. Kegiatan penyebaran informasi dan lapak pom sapakat di kabupaten Bungo dengan Teknik *Face to Face*
3. Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Produk Pangan Olahan Terkemas untuk UMK secara Zoom Meeting
4. Memanfaatkan alat peraga berupa Leaflet, brosur, banner, poster serta contoh produk yang mengandung bahan berbahaya atau tanpa izin edar dan video keamanan obat dan makanan untuk membantu penyampaian informasi lebih mudah dipahami masyarakat.
5. Membuat konten KIE Media Sosial dan Media Elektronik.
6. Melaksanakan kegiatan KIE “Pentingnya Gizi Seimbang dan Keamanan Pangan untuk Pencegahan Stunting” pada Daerah Lokus Stunting
7. Melaksanakan Orientasi, Pelantikan Dan Perkemahan Anggota Saka POM Cabang Kerinci Di Kantor Camat Kayu Aro, Kabupaten Kerinci
8. Melaksanakan kegiatan pameran Obat dan Makanan aman dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Kabupaten Bungo

IKU 15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanann pangan. Sekolah yang dilakukan intervensi pada tahun 2024 adalah 2 (dua) sekolah dengan 12 (dua belas) sekolah yang harus mendapatkan perluasan untuk dilakukan sosialisasi.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 70 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	100,00	Sangat Baik



Berdasarkan di atas, indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada Tahun 2025 ditargetkan sebanyak 2 (dua) sekolah. Realisasi hingga akhir tahun mencapai 2 (dua) sekolah atau sebesar 100,00% dari target yang telah ditetapkan, dengan kategori capaian **Sangat Baik**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh sekolah yang direncanakan sebagai lokus kegiatan telah melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sesuai dengan target, sehingga pelaksanaan program berjalan optimal dan sesuai perencanaan. Hal ini disebabkan karena Kerja sama yang solid antar tim internal BPOM, baik antar tim maupun antar petugas lapangan, yang saling mendukung dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Sinergi internal ini menjadi faktor kunci dalam percepatan capaian target kinerja. Dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah serta kepala sekolah turut menjadi faktor kunci keberhasilan capaian kinerja ini. Pemerintah daerah memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan dan fasilitasi kegiatan, sementara kepala sekolah secara aktif mengintegrasikan keamanan pangan ke dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Dukungan tersebut memperkuat sistem pembinaan internal sekolah serta memastikan program keamanan pangan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menjadi bagian dari budaya dan perilaku sehari-hari warga sekolah.

Efektivitas strategi pembinaan dan komunikasi yang diterapkan Loka POM melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif antara Loka POM, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah memberikan hasil yang optimal. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek penyampaian informasi, tetapi juga membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan kegiatan. Melalui koordinasi yang intens dan komunikasi dua arah, setiap pihak memiliki peran yang jelas dalam mendukung keberhasilan pembudayaan keamanan pangan di sekolah. Tingginya minat dan antusiasme sekolah dalam mengikuti program

pembudayaan keamanan pangan setelah adanya sosialisasi dan pendampingan intensif oleh Loka POM menunjukkan bahwa pesan edukasi mengenai pentingnya keamanan pangan telah tersampaikan dengan baik. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara langsung mampu meningkatkan kesadaran sekolah akan manfaat penerapan keamanan pangan di lingkungan pendidikan.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 71. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	2	2	100	Baik 

Berdasarkan data pada tabel di atas, indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan belum ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, sehingga pada periode tersebut tidak terdapat target maupun realisasi yang dapat dijadikan pembandingan.

Indikator ini mulai diimplementasikan dan diukur pada Tahun 2025 dengan target sebanyak 2 (dua) sekolah. Realisasi hingga akhir Tahun 2025 tercapai sebanyak 2 (dua) sekolah atau 100% dari target yang ditetapkan dengan kategori **Baik**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembudayaan keamanan pangan di sekolah telah berjalan sesuai dengan perencanaan, didukung oleh koordinasi yang baik dengan pihak sekolah, komitmen kepala sekolah dan guru, serta partisipasi aktif warga sekolah dalam menerapkan prinsip keamanan pangan. Selain itu, pendampingan dan

pembinaan yang dilakukan secara bertahap turut mendukung terpenuhinya seluruh tahapan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Tahun 2025 menjadi tahun awal pengukuran indikator ini dengan capaian yang optimal, sekaligus menjadi dasar untuk penguatan dan perluasan implementasi program pada tahun berikutnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	100,00	Tercapai/ Melampaui 

Dalam dokumen Renstra, indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan ditetapkan dengan target jangka menengah Tahun 2027 sebanyak 2 (dua) sekolah. Sampai dengan Tahun 2025, realisasi telah mencapai 2 (dua) sekolah atau 100,00% dari target yang direncanakan, sehingga secara kumulatif target Renstra telah terpenuhi.

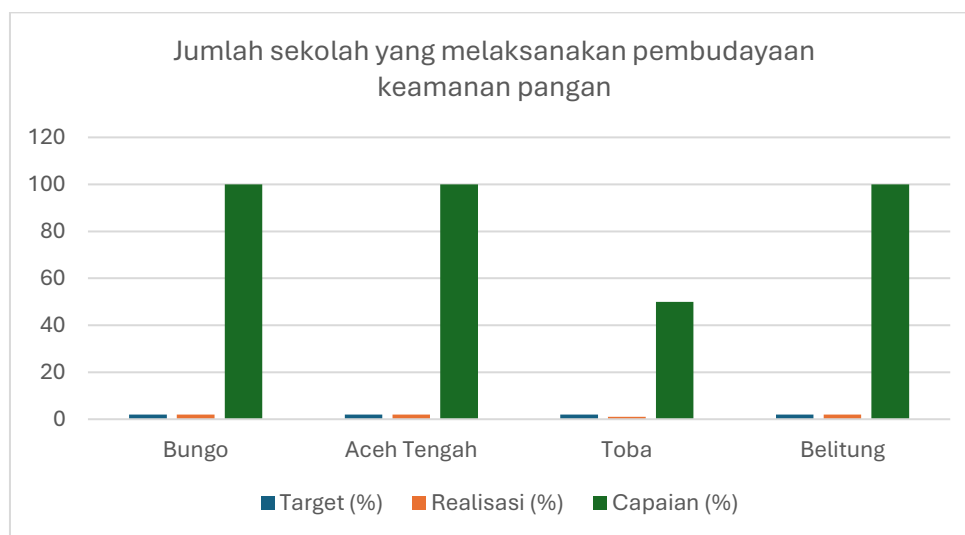
Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan lebih cepat dari tahapan waktu yang ditetapkan dalam perencanaan strategis. Capaian tersebut mencerminkan kesiapan sekolah sasaran dalam melaksanakan program, dukungan koordinasi lintas sektor, serta efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pendampingan di lapangan.

Meskipun secara kuantitatif target telah tercapai, upaya lanjutan tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program, meningkatkan kualitas implementasi, serta membuka peluang perluasan cakupan sekolah pada periode perencanaan berikutnya agar dampak pembudayaan keamanan pangan semakin luas dan berkesinambungan.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 72. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Bungo	2	2	100	Baik	●
	Aceh Tengah	2	2	100	Baik	●
	Toba	2	1	50	Kurang	●
	Belitung	2	2	100	Baik	●



Grafik 17. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Berdasarkan grafik di atas, realisasi indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025 pada Loka POM di Kabupaten Bungo mencapai 2 (dua) sekolah dari target 2 (dua) sekolah atau 100% dengan kategori Baik.

Jika dibandingkan dengan UPT dalam Cluster 3, Loka POM Aceh Tengah dan Belitung juga mencapai realisasi 100% dari target yang ditetapkan dengan kategori Baik. Sementara itu, Loka POM Toba merealisasikan 1 (satu) sekolah dari target 2 (dua) sekolah atau 50% dengan kategori Kurang.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo berada pada posisi optimal dan sejajar dengan sebagian besar UPT pembanding dalam cluster yang sama. Capaian ini mencerminkan pelaksanaan program yang berjalan sesuai perencanaan serta dukungan koordinasi yang efektif dengan pihak sekolah dan pemangku kepentingan terkait.

Adanya perbedaan capaian pada salah satu UPT dalam cluster menunjukkan bahwa implementasi program sangat dipengaruhi oleh faktor

kesiapan sekolah, dukungan daerah, serta efektivitas pendampingan di lapangan. Oleh karena itu, hasil perbandingan ini tidak hanya menggambarkan posisi capaian kinerja, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat strategi pelaksanaan program pada tingkat cluster secara keseluruhan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Program sekolah yang melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan merupakan bagian program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada tahun 2025 dilaksanakan di 1 (satu) Kabupaten di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo. Kabupaten yang akan dilakukan intervensi adalah Kabupaten Bungo.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan. Kegiatan ini merupakan Indikator kinerja baru yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo pada tahun 2025.

Pada Prinsip KAK Sekolah yang melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan akan melaksanakan tahapan Advokasi Lintas Sektor PJAS, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader PKP Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan. Capaian kinerja dengan kategori “Sangat Baik” menunjukkan bahwa program telah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas sekolah binaan. Keberhasilan ini didukung oleh program dan langkah strategis sebagai berikut:

1. Program Pembinaan dan Pendampingan Sekolah Binaan

Dilaksanakan melalui sosialisasi, asistensi teknis, dan monitoring lapangan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan kepala sekolah, guru, pengelola kantin, dan siswa untuk memastikan penerapan prinsip keamanan pangan secara berkelanjutan.

2. Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Dilakukan melalui berbagai media edukasi dan kampanye keamanan pangan guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta perubahan perilaku siswa dalam memilih jajanan yang aman dan sehat.

3. Program Sinergi Lintas Sektor dan Kemitraan Daerah

Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah untuk memperjelas peran, memperkuat dukungan kebijakan, serta menjaga keberlanjutan program.

4. Program Pengawasan dan Evaluasi PJAS

Pengawasan pangan jajanan di lingkungan sekolah sebagai dasar evaluasi dan tindak lanjut pembinaan guna memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi siswa.

5. Program Sekolah Pangan Aman dan Replikasi Praktik Baik

Sekolah yang memenuhi kriteria didorong menjadi role model agar praktik pembudayaan keamanan pangan dapat direplikasi di sekolah lain.

Selain program utama tersebut, terdapat kegiatan pendukung yang turut memperkuat capaian, yaitu:

- a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kader keamanan pangan.
- b. Rapat pembahasan awal dengan UPTD dan pemangku kepentingan terkait.
- c. Penetapan sekolah lokus sebagai percontohan (role model).
- d. Survei bersama pemerintah daerah untuk menentukan lokus kegiatan secara objektif.
- e. Advokasi peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengawalan program.
- f. Pemantauan pelaksanaan kegiatan sesuai Plan of Action (POA) secara berkala.

Rangkaian program dan kegiatan tersebut memastikan pelaksanaan berjalan terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

Upaya dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

1. Memperkuat pembinaan berkelanjutan di sekolah binaan
Melaksanakan pendampingan lanjutan secara periodik untuk memastikan pembudayaan keamanan pangan tetap konsisten dan tidak menurun setelah tahapan intervensi selesai.
2. Meningkatkan kualitas implementasi, bukan hanya kuantitas capaian
Fokus pada penguatan perubahan perilaku warga sekolah, terutama dalam pengawasan jajanan dan penerapan higiene sanitasi kantin.
3. Memperluas cakupan sekolah sasaran secara bertahap
Mengidentifikasi sekolah potensial untuk menjadi lokus baru guna meningkatkan dampak program di wilayah kerja.
4. Mengoptimalkan peran kader dan tim keamanan pangan sekolah
Memberikan penguatan kapasitas agar kader dapat menjadi penggerak internal dalam menjaga keberlanjutan program.
5. Mendorong integrasi program ke dalam kebijakan dan perencanaan daerah
Melakukan advokasi agar kegiatan pembudayaan keamanan pangan masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi berbasis risiko
Menyusun mekanisme pemantauan yang lebih terstruktur untuk mendeteksi potensi penurunan kepatuhan sejak dini.
7. Mengembangkan inovasi metode edukasi
Memanfaatkan media digital dan pendekatan kreatif agar pesan keamanan pangan lebih menarik dan mudah dipahami siswa.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjaga capaian kinerja tetap optimal sekaligus meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program pada periode berikutnya.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Potensi menurunnya konsistensi penerapan keamanan pangan di sekolah setelah	Memperkuat pembinaan berkelanjutan	Pendampingan lanjutan secara periodik ke sekolah binaan	Tahunan	T	-	

		tahapan pembinaan awal					
2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Fokus capaian hanya kuantitatif, belum optimal dari sisi perubahan perilaku	Meningkatkan kualitas implementasi	Pendekatan pembinaan menekankan perubahan perilaku siswa dan pengawasan kantin	Tahunan	T	-
3	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Cakupan sekolah terbatas	Memperluas cakupan sekolah sasaran	Identifikasi dan penetapan lokus baru untuk sekolah potensial	Tahunan	T	-
4	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Peran kader dan tim sekolah belum optimal	Mengoptimalkan peran kader dan tim keamanan pangan	Pelatihan dan pemberdayaan kader internal di masing-masing sekolah	Semester an	T	-
5	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Program belum sepenuhnya terintegrasi ke kebijakan daerah	Mendorong integrasi program ke kebijakan dan perencanaan daerah	Advokasi agar kegiatan masuk dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	Tahunan	T	-
6	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Monitoring dan evaluasi belum berbasis risiko	Meningkatkan monitoring dan evaluasi berbasis risiko	Menyusun mekanisme pemantauan yang terstruktur untuk mendeteksi penurunan kepatuhan sejak dini	Semester an	T	-
7	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Media edukasi kurang inovatif	Mengembangkan inovasi metode edukasi	Pemanfaatan media digital dan pendekatan kreatif agar materi mudah dipahami siswa	Tahunan	T	-

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja dengan kategori **“Tercapai”** pada periode ini tidak terlepas dari dukungan berbagai program penunjang yang saling bersinergi, antara lain:

1. Program Pembinaan dan Pendampingan Sekolah Binaan Pangan Aman

- Program ini berperan penting dalam membangun kapasitas sekolah melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan asistensi teknis.
- Dengan adanya pendampingan langsung oleh petugas Loka POM, sekolah memperoleh pemahaman dan keterampilan praktis untuk menerapkan prinsip keamanan pangan.
- Kegiatan ini menjadi fondasi utama keberhasilan sekolah dalam melaksanakan pembudayaan keamanan pangan secara mandiri.

2. Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan

- Melalui kegiatan KIE, informasi mengenai pangan aman disebarluaskan kepada siswa, guru, pengelola kantin, dan masyarakat sekitar sekolah.
- Pemanfaatan media edukasi seperti poster, leaflet, video edukatif, serta kampanye “Cerdas Memilih Pangan Jajanan Anak Sekolah” meningkatkan pengetahuan dan kesadaran publik.
- Kegiatan KIE yang dilakukan secara berulang turut memperkuat perilaku positif terhadap konsumsi pangan yang aman dan sehat.

3. Program Sinergi Lintas Sektor dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Daerah

- Keberhasilan PJAS juga didukung oleh koordinasi yang baik antara Loka POM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Daerah.
- Kolaborasi ini memperkuat komitmen bersama dalam pelaksanaan program serta memperluas jangkauan sekolah binaan.
- Dukungan dalam bentuk kebijakan daerah, surat edaran, maupun fasilitasi kegiatan turut memperkuat implementasi di lapangan.

4. Program Pengawasan dan Evaluasi Pangan Jajanan Anak Sekolah

- Kegiatan pengawasan terhadap pangan jajanan di lingkungan sekolah memberikan gambaran nyata mengenai tingkat keamanan pangan di lapangan.
- Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengambilan keputusan dalam pembinaan berikutnya.
- Monitoring berkala membantu memastikan keberlanjutan program dan menjaga konsistensi penerapan keamanan pangan.

5. Program Sekolah Pangan Aman dan Gerakan Nasional Pangan Aman (GNPA)

- Integrasi Program PJAS dengan kegiatan GNPA memperluas dampak dan visibilitas kegiatan keamanan pangan.
- Sekolah yang telah menunjukkan kinerja baik diusulkan menjadi **Sekolah Pangan Aman**, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk mempertahankan capaian.

Namun demikian, **masih terdapat beberapa kendala** yang menghambat optimalisasi pencapaian kinerja, antara lain:

- Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pendampingan intensif ke seluruh sekolah.
- Variasi tingkat pemahaman dan komitmen antar sekolah, terutama di wilayah dengan akses sulit.
- Belum meratanya sarana prasarana pendukung di seluruh sekolah binaan.

Oleh karena itu, **sinergi antar program perlu terus diperkuat** melalui pendekatan kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan agar hasil yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode berikutnya

IKU 16. Jumlah Desa Pangan Aman

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 73 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Jumlah desa pangan aman	1	1	100,00	Sangat Baik



Berdasarkan Tabel di atas tentang Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada indikator Jumlah Desa Pangan Aman, ditetapkan target sebanyak 1 desa pada Tahun 2025. Sampai dengan akhir periode pelaporan, realisasi yang dicapai adalah 1 desa, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 100,00%.

Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada Tahun 2025 termasuk dalam kategori **Sangat Baik**, karena telah memenuhi seluruh target yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan Desa Pangan Aman telah berjalan secara optimal sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian target tidak hanya diukur dari jumlah desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Pangan Aman, tetapi juga dari terpenuhinya seluruh kriteria sesuai pedoman yang berlaku, terlaksananya kegiatan pembinaan, edukasi, dan pendampingan secara menyeluruh, serta adanya komitmen pemerintah desa dalam menjaga keberlanjutan program. Apabila seluruh tahapan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, maka capaian sebesar 100% tidak hanya menunjukkan pemenuhan target secara kuantitatif, tetapi juga mencerminkan kualitas pelaksanaan program yang baik dan berorientasi pada keberlanjutan.

Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman pada tahun 2025 telah berjalan dengan optimal. Seluruh tahapan kegiatan, mulai dari koordinasi dengan pemerintah daerah, sosialisasi kepada desa sasaran, hingga pendampingan teknis terhadap kader keamanan pangan, terlaksana sesuai jadwal dan menghasilkan output yang signifikan terhadap peningkatan jumlah desa pangan aman.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari meningkatnya komitmen dan dukungan pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat desa dalam menerapkan prinsip keamanan pangan. Pemerintah daerah turut berperan dalam memfasilitasi kegiatan pembinaan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, sementara kader keamanan pangan di tingkat desa berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan pangan rumah tangga.

Selain itu, efektivitas koordinasi lintas sektor antara BPOM, perangkat daerah, dan instansi terkait lainnya turut mempercepat proses verifikasi dan penetapan desa pangan aman. Dengan adanya sinergi yang kuat tersebut, proses identifikasi, pembinaan, serta monitoring dapat dilakukan lebih efisien

sehingga jumlah desa yang memenuhi kriteria meningkat melebihi target triwulan.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya evaluasi dan tindak lanjut berkelanjutan dari kegiatan sebelumnya, sehingga permasalahan yang muncul di lapangan dapat segera diatasi. Penerapan strategi berbasis data dalam pemilihan lokus desa binaan serta peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan teknis juga berkontribusi terhadap pencapaian hasil yang optimal.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 74. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Jumlah desa pangan aman

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Jumlah desa pangan aman	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	1	1	100	Baik 

Berdasarkan Tabel 19 tentang Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya pada indikator Jumlah Desa Pangan Aman, diketahui bahwa pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 belum ditetapkan target maupun realisasi untuk indikator tersebut. Hal ini dikarenakan program Desa Pangan Aman belum menjadi indikator kinerja utama pada periode tersebut.

Pada Tahun 2025, indikator Jumlah Desa Pangan Aman mulai ditetapkan secara resmi dalam dokumen perencanaan kinerja dengan target sebanyak 1 (satu) desa. Realisasi yang dicapai adalah 1 (satu) desa atau sebesar 100%, dengan kategori **Baik**. Capaian ini menunjukkan bahwa pada tahun pertama pengukuran, pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan target yang direncanakan.

Keberhasilan tersebut mencerminkan kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan program baru, termasuk dari aspek perencanaan, penganggaran, koordinasi lintas sektor, serta dukungan pemerintah desa. Selain itu, penetapan desa sasaran yang tepat dan pelaksanaan pembinaan yang terstruktur turut mendukung tercapainya target secara optimal.

Meskipun belum dapat dilakukan analisis tren capaian karena tidak terdapat data pembandingan pada tahun sebelumnya, capaian Tahun 2025 dapat dijadikan sebagai baseline (data dasar) untuk pengukuran kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Dengan adanya data awal ini, evaluasi peningkatan, pengembangan cakupan desa, serta penguatan kualitas program Desa Pangan Aman dapat dilakukan secara lebih terukur dan berkelanjutan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
16	Jumlah desa pangan aman	1	1	100,00	Tercapai/ Melampaui 

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap target jangka menengah dalam dokumen Renstra, untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) 16 yaitu Jumlah Desa Pangan Aman, ditetapkan target Tahun 2027 sebanyak 1 (satu) desa. Sampai dengan Tahun 2025, realisasi yang telah dicapai adalah 1 (satu) desa atau sebesar 100,00% terhadap target akhir Renstra. Dengan demikian, capaian indikator ini termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui** karena target jangka menengah telah terpenuhi sebelum periode Renstra berakhir.

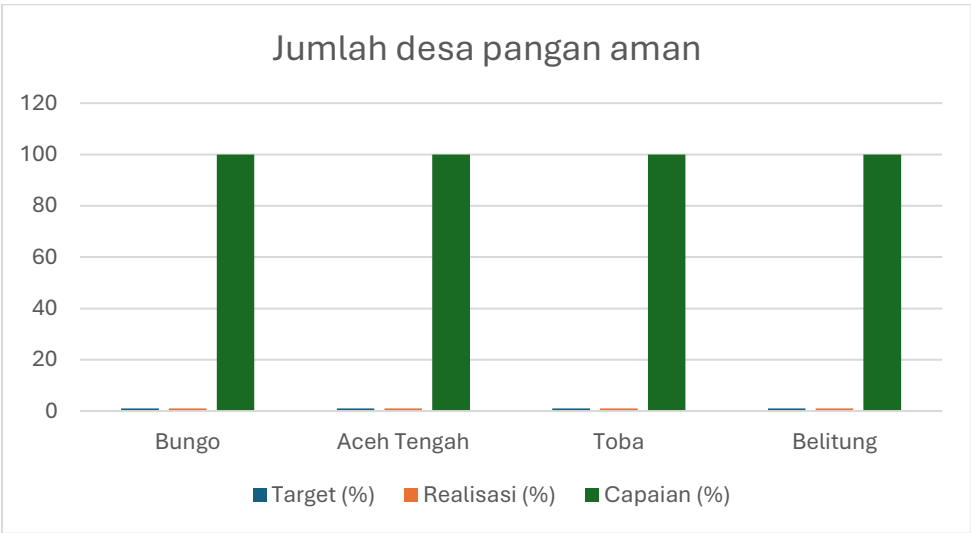
Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Desa Pangan Aman berjalan lebih cepat dari tahapan waktu yang direncanakan dalam Renstra. Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas perencanaan, dukungan sumber daya, serta sinergi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait.

Meskipun target jangka menengah telah tercapai pada Tahun 2025, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program dan menjaga kualitas desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Pangan Aman. Selain itu, ke depan dapat dipertimbangkan penyesuaian target yang lebih progresif apabila kapasitas sumber daya memungkinkan, sehingga dampak program terhadap peningkatan keamanan pangan di wilayah kerja dapat semakin luas dan berkelanjutan.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 75. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Jumlah desa pangan aman

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Jumlah desa pangan aman	Bungo	1	1	100	Baik	●
	Aceh Tengah	1	1	100	Baik	●
	Toba	1	1	100	Baik	●
	Belitung	1	1	100	Baik	●



Grafik 18. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Jumlah desa pangan aman

Berdasarkan Tabel 20 dan Grafik 18, capaian indikator Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2025 pada Loka POM di Kabupaten Bungo menunjukkan realisasi sebesar 1 (satu) desa dari target 1 (satu) desa atau sebesar 100% dengan

kategori Baik. Apabila dibandingkan dengan UPT pada Cluster 3 Loka POM pembanding, yaitu Loka POM di Aceh Tengah, Loka POM di Toba, dan Loka POM di Belitung, seluruhnya juga mencapai realisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan dengan kategori **Baik**.

Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo berada pada posisi yang setara (on track) dengan UPT pembanding dalam satu cluster. Tidak terdapat deviasi capaian antar-UTP pada indikator ini, yang menggambarkan bahwa pelaksanaan program Desa Pangan Aman di Cluster 3 secara umum berjalan efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kesetaraan capaian ini juga mengindikasikan bahwa mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring program pada masing-masing UPT telah berjalan dengan baik. Namun demikian, karena seluruh UPT telah mencapai 100%, evaluasi selanjutnya perlu difokuskan pada aspek kualitas implementasi, inovasi program, serta perluasan cakupan desa binaan agar kinerja tidak hanya stagnan pada pemenuhan target minimal, tetapi juga menunjukkan peningkatan nilai tambah dan dampak program secara lebih luas.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan **Program Desa Pangan Aman** pada tahun 2025 dengan capaian kinerja sebesar **100% dari target tahunan** menunjukkan bahwa program ini berjalan secara efektif dan terarah. Faktor utama keberhasilan antara lain adalah:

1. **Perencanaan yang terukur dan selaras dengan kebijakan pusat.** Setiap kegiatan disusun berdasarkan **Plan of Action (POA)** yang mengacu pada pedoman nasional dari BPOM. Hal ini memastikan bahwa arah pelaksanaan program di tingkat daerah tetap konsisten dengan target nasional.
2. **Konsistensi pelaksanaan kegiatan oleh petugas Loka POM.** Petugas di lapangan menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan seluruh tahapan kegiatan mulai dari sosialisasi, pembinaan, hingga verifikasi desa

pangan aman. Kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan sesuai jadwal berkontribusi besar terhadap tercapainya target.

3. Dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat desa.

Kolaborasi yang baik antara BPOM, pemerintah daerah, perangkat desa, dan kader keamanan pangan menjadi kunci sukses dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan prinsip keamanan pangan.

4. Koordinasi lintas sektor yang efektif.

Pelibatan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pendidikan, membantu memperluas jangkauan kegiatan dan memperkuat efektivitas pembinaan di tingkat desa.

Analisis Potensi Kendala atau Kelemahan

Meskipun capaian tergolong sangat baik, beberapa potensi kendala masih perlu diantisipasi agar keberlanjutan program tetap terjaga, di antaranya:

- **Keterbatasan sumber daya manusia** pada tingkat pelaksana di Loka POM yang harus menangani beberapa program sekaligus.
- **Variasi tingkat kesiapan desa** dalam mengimplementasikan prinsip keamanan pangan, terutama pada wilayah terpencil.

Keterbatasan anggaran pendampingan lanjutan, yang dapat memengaruhi kegiatan monitoring dan evaluasi keberlanjutan desa pangan aman.

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Jumlah Desa Pangan Aman	Keterbatasan SDM pelaksana karena menangani beberapa program secara bersamaan	Optimalisasi pembagian tugas dan prioritas kegiatan	Penyusunan pembagian tugas berbasis beban kerja dan usulan kebutuhan SDM pada perencanaan berikutnya	Triwulan I–II 2026	T	-	
2	Jumlah Desa Pangan Aman	Variasi tingkat kesiapan desa, khususnya wilayah terpencil	Penyusunan strategi pembinaan berbasis tingkat risiko dan kesiapan desa	Pemetaan tingkat kesiapan desa dan penyusunan modul pembinaan bertahap	Triwulan II–III 2026	T	-	
3	Jumlah Desa Pangan Aman	Keterbatasan anggaran untuk monitoring lanjutan dan pendampingan	Integrasi program dengan kegiatan lintas sektor dan pengusulan tambahan anggaran	Penyusunan usulan anggaran pada RKA tahun berikutnya dan koordinasi dengan pemerintah daerah	Perencanaan TA 2027	T	-	
4	Jumlah Desa Pangan Aman	Potensi perubahan komitmen aparatur desa akibat rotasi/pergantian perangkat	Penguatan komitmen melalui advokasi dan sosialisasi berkelanjutan	Koordinasi ulang dengan perangkat desa dan penandatanganan komitmen bersama	Semester I 2026	T	-	
5	Jumlah Desa	Dokumentasi dan pelaporan belum	Pengembangan sistem pelaporan berbasis elektronik	Penyusunan format pelaporan digital dan	Triwulan II 2026	T	-	

Pangan Aman	terdigitalisasi optimal	penyimpanan dokumen terpusat
----------------	----------------------------	---------------------------------

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

a. Program Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Keberhasilan capaian kinerja didukung oleh intensitas koordinasi antara Loka POM dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, serta perangkat desa. Melalui forum koordinasi dan rapat teknis bersama, penentuan lokus desa binaan dan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan lapangan. Kolaborasi ini memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sadar akan pentingnya keamanan pangan.

b. Program Pembinaan dan Pendampingan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)

Kegiatan pelatihan dan pendampingan kader desa menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Melalui kegiatan ini, kader mampu menjadi ujung tombak dalam mengedukasi masyarakat terkait penerapan prinsip “pangan aman dari rumah tangga hingga pasar desa”, sehingga menciptakan perubahan perilaku positif dan mendukung keberlanjutan program.

c. Program Sosialisasi dan Edukasi Keamanan Pangan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di tingkat desa, sekolah, dan komunitas masyarakat berkontribusi besar terhadap peningkatan kesadaran publik. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan bahaya pangan, cara penanganan yang higienis, serta pentingnya label dan izin edar produk. Program ini memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan pangan sehari-hari.

d. Program Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Terpadu

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh desa binaan tetap menerapkan prinsip keamanan pangan sesuai

pedoman BPOM. Program ini membantu mendeteksi dini permasalahan di lapangan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan keberlanjutan status desa pangan aman.

Analisis Kegagalan Pencapaian Kinerja

Meskipun pada Tahun 2025 indikator **Jumlah Desa Pangan Aman** telah mencapai target 100%, analisis kegagalan tetap perlu disusun sebagai langkah evaluasi dan mitigasi risiko pada periode berikutnya. Beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja antara lain:

1. Ketidaktepatan Perencanaan dan Penetapan Desa Sasaran

Apabila perencanaan tidak berbasis pada analisis kesiapan dan kebutuhan desa, maka desa sasaran berpotensi tidak mampu memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Hal ini dapat mengakibatkan target tidak tercapai atau memerlukan waktu pembinaan yang lebih panjang dari yang direncanakan.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Beban Kerja

SDM pelaksana yang terbatas dan menangani beberapa program secara bersamaan berpotensi mengurangi intensitas pendampingan dan monitoring. Apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan tidak tercapainya target.

3. Keterbatasan Anggaran Kegiatan

Keterbatasan dukungan anggaran, khususnya untuk kegiatan monitoring lanjutan dan pembinaan intensif, dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan program. Tanpa dukungan pendanaan yang memadai, tahapan kegiatan mungkin tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

4. Kurangnya Komitmen Pemerintah Desa

Perubahan kepemimpinan atau rendahnya komitmen perangkat desa terhadap program keamanan pangan dapat menyebabkan implementasi tidak berjalan konsisten. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

5. Rendahnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Apabila masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya keamanan pangan, maka penerapan prinsip higiene dan sanitasi pangan dapat kurang optimal. Kondisi ini berpotensi menyebabkan desa tidak memenuhi kriteria sebagai Desa Pangan Aman.

IKU 17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah pasar mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas dan Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 76 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	Sangat Baik



Berdasarkan Tabel 24 tentang Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, ditetapkan target Tahun 2025 sebanyak 1 (satu) pasar. Sampai dengan akhir periode pelaporan, realisasi yang dicapai adalah 1 (satu) pasar, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 100,00%. Dengan demikian, indikator ini termasuk dalam kategori **Sangat Baik** karena target yang ditetapkan telah tercapai secara penuh.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan intervensi pada pasar pangan aman berbasis komunitas telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Seluruh tahapan kegiatan, mulai dari forum advokasi komitmen pemda dan lintas sektor pasar, bimtek dan penyuluhan komintas pasar, sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar hingga pengawasan keamanan

pangan dan monitoring evaluasi, telah dilaksanakan secara sistematis dan terukur.

Keberhasilan ini juga mencerminkan efektivitas koordinasi antara Loka POM dengan pengelola pasar, pemerintah daerah, serta komunitas pedagang dalam menerapkan prinsip keamanan pangan. Meskipun target telah tercapai 100%, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan standar keamanan pangan di pasar yang telah ditetapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara konsisten.

Faktor lain yang memperkuat capaian ini adalah partisipasi aktif komunitas pasar dan pedagang. Melalui kegiatan pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan secara intensif, pedagang semakin memahami pentingnya penanganan pangan yang higienis, tidak menggunakan bahan berbahaya, dan menjaga kebersihan lingkungan pasar. Hal ini mendorong terbentuknya budaya keamanan pangan di tingkat komunitas yang berkelanjutan.

Selain itu, pendampingan intensif oleh petugas juga menjadi faktor pendukung utama. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala memastikan setiap pasar binaan tetap memenuhi kriteria pasar pangan aman berbasis komunitas. Ketersediaan anggaran dan dukungan kebijakan pusat dan daerah memperlancar seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pelatihan, supervisi, hingga pelaporan hasil capaian.

Faktor pendukung lainnya adalah tersedianya dukungan sarana dan prasarana pasar yang relatif memadai untuk dilakukan intervensi keamanan pangan, seperti adanya pengelolaan kebersihan pasar, fasilitas air bersih, dan tempat pembuangan sampah yang terorganisir. Selain itu, adanya kader atau perwakilan pedagang yang aktif dan kooperatif dalam mengikuti pembinaan turut mempercepat proses penerapan standar. Komunikasi yang intensif antara petugas Loka POM dengan pengelola pasar juga mempermudah penyelesaian kendala di lapangan, sehingga setiap tahapan kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 77. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	1	1	100	Baik 

Berdasarkan Tabel di atas, indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 belum ditetapkan sebagai indikator kinerja, sehingga tidak terdapat target maupun realisasi pada periode tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa fokus penguatan keamanan pangan di pasar berbasis komunitas baru mulai diimplementasikan secara terukur pada Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebanyak 1 (satu) pasar dan realisasi yang dicapai adalah 1 (satu) pasar atau sebesar 100% dengan kategori **Baik**. Pencapaian ini menandai dimulainya pengukuran kinerja secara spesifik pada penguatan keamanan pangan di lingkungan pasar rakyat melalui pendekatan berbasis komunitas pedagang. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa strategi intervensi yang diterapkan telah efektif dalam mendorong perubahan perilaku dan penerapan standar higiene sanitasi di pasar sasaran.

Karena indikator ini baru diukur pada Tahun 2025, maka belum tersedia data historis untuk dilakukan analisis tren capaian. Namun demikian, capaian tahun berjalan dapat menjadi titik awal evaluasi untuk perencanaan target yang lebih progresif pada periode berikutnya, sekaligus menjadi dasar dalam memperluas cakupan pembinaan pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
-----	----------------------	-------------------	----------------------	-----------	----------

17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	Tercapai/ Melampaui	
----	---	---	---	--------	------------------------	---

Mengacu pada dokumen Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU) 17 yaitu Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas ditargetkan mencapai 1 (satu) pasar sampai dengan Tahun 2027. Hingga akhir Tahun 2025, realisasi yang telah dicapai adalah 1 (satu) pasar atau sebesar 100,00% dari target jangka menengah, sehingga dikategorikan Tercapai/Melampaui.

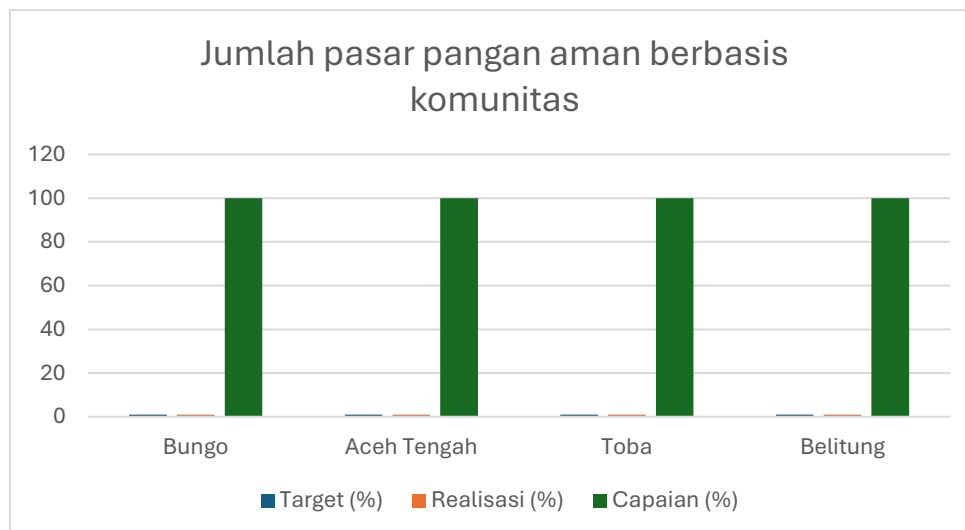
Pencapaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan intervensi keamanan pangan di pasar berbasis komunitas berjalan lebih cepat dari proyeksi waktu yang telah direncanakan dalam Renstra. Implementasi kegiatan pembinaan, penguatan peran komunitas pedagang, serta penerapan standar higiene dan sanitasi pasar telah memberikan hasil yang sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan.

Dengan terpenuhinya target jangka menengah sebelum tahun akhir Renstra, diperlukan langkah strategis untuk menjaga konsistensi penerapan standar di pasar yang telah dibina sekaligus membuka peluang pengembangan cakupan pembinaan ke pasar lainnya. Kondisi ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas program serta memperluas dampak penguatan keamanan pangan di lingkungan pasar rakyat.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 78. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Jumlah desa pangan aman

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Bungo	1	1	100	Baik	
	Aceh Tengah	1	1	100	Baik	
	Toba	1	1	100	Baik	
	Belitung	1	1	100	Baik	



Grafik 19. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Berdasarkan data di atas, realisasi indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025 pada Loka POM di Kabupaten Bungo mencapai 1 (satu) pasar dari target 1 (satu) pasar atau 100% dengan kategori **Baik**. Jika dibandingkan dengan UPT dalam Cluster 3, yaitu Aceh Tengah, Toba, dan Belitung, seluruhnya juga mencatatkan capaian 100% sesuai target yang ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo sejalan dengan UPT pembanding dalam cluster yang sama, tanpa adanya perbedaan signifikan pada indikator ini. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas di Cluster 3 telah berjalan konsisten dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan secara nasional, dengan standar pelaksanaan yang relatif seragam pada aspek pembinaan, pendampingan pedagang, dan verifikasi pemenuhan kriteria pasar pangan aman.

Walaupun tidak terdapat perbedaan capaian secara kuantitatif, upaya penguatan tetap diperlukan pada aspek kualitas perubahan perilaku pedagang, keberlanjutan sistem pengawasan internal pasar, serta inovasi strategi pembinaan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Dengan demikian, perbandingan kinerja tidak hanya menjadi ukuran pencapaian target, tetapi juga sarana evaluasi untuk meningkatkan mutu Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Analisa penyebab keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Koordinasi yang efektif antara Loka POM, pemerintah daerah, dan pengelola pasar.
3. Partisipasi aktif komunitas pedagang dan pengelola pasar dalam penerapan prinsip keamanan pangan.
4. Pendampingan teknis yang intensif oleh petugas di lapangan sehingga seluruh pasar binaan memenuhi kriteria pasar pangan aman berbasis komunitas.
5. Adanya dukungan positif dari pemerintah daerah terhadap keberlanjutan program, termasuk dukungan kebijakan dan fasilitas pendukung

Penyebab Potensial Kegagalan (yang perlu diantisipasi):

1. Potensi menurunnya komitmen komunitas pasar jika tidak dilakukan pembinaan lanjutan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan monitoring rutin di semua pasar binaan.
3. Perbedaan tingkat pemahaman dan kepatuhan antar pelaku pasar terhadap standar keamanan pangan.
4. Keterbatasan dukungan anggaran daerah di beberapa wilayah untuk mendukung keberlanjutan kegiatan.

Upaya dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

1. Meningkatkan pengawalan pasar intervensi untuk memastikan konsistensi penerapan keamanan pangan di pasar binaan.
2. Memperluas jangkauan pembinaan ke pasar lain yang berpotensi menjadi lokus baru program pasar pangan aman.
3. Mengoptimalkan peran kader keamanan pangan dan komunitas pasar sebagai motor penggerak penerapan prinsip keamanan pangan.

4. Mendorong pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan alokasi anggaran rutin untuk mendukung keberlanjutan pasar pangan aman.
5. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas metode pembinaan dan menyesuaikannya dengan kondisi lokal masing-masing pasar.
6. Meningkatkan kolaborasi dengan dinas teknis dan lembaga terkait untuk memperkuat dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan program.

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timelin e	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Potensi menurunnya komitmen komunitas pasar tanpa pembinaan lanjutan	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan pada pasar intervensi	Penyusunan jadwal monitoring rutin dan supervisi berkala ke pasar binaan	Triwulan an	T		
2	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Keterbatasan SDM dalam monitoring seluruh pasar binaan	Optimalisasi peran kader keamanan pangan dan pengelola pasar	Pelatihan kader keamanan pangan serta pembagian wilayah pengawasan	Semeste r I–II	T		
3	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Perbedaan tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku pasar	Evaluasi dan penyesuaian metode pembinaan sesuai karakteristik pasar	Penyusunan modul pembinaan berbasis kebutuhan lokal dan sosialisasi ulang standar keamanan pangan	Semeste r I	T		
4	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Keterbatasan dukungan anggaran daerah untuk pemahaman dan keberlanjutan program	Mendorong komitmen kebijakan dan alokasi anggaran rutin dari pemerintah daerah	Koordinasi dan advokasi kepada pemda untuk integrasi program dalam dokumen perencanaan daerah	Tahunan (perencanaan anggaran)	T		
5	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Terbatasnya perluasan pasar intervensi baru	Memperluas jangkauan pembinaan ke pasar potensial lainnya	Identifikasi dan pemetaan pasar prioritas untuk intervensi tahun berikutnya	Semeste r II	T		

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berikut program penunjang disusun dalam bentuk poin:

1. **Sinergi dengan program pemerintah lainnya**, seperti kegiatan pemeriksaan pangan pada saat hari besar keagamaan dan kerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan. Integrasi kegiatan ini mendukung penguatan inovasi serta memperluas dampak pembinaan dalam program pasar pangan aman.
2. **Pemanfaatan media publikasi di lingkungan pasar**, antara lain melalui pemasangan poster, spanduk, leaflet, dan papan informasi keamanan

pangan. Media ini berperan dalam meningkatkan minat masyarakat untuk membaca informasi serta mendukung pemenuhan aspek higiene dan sanitasi di pasar.

3. **Pelaksanaan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) secara tatap muka kepada sarana distribusi dan ritel pangan**, sebagai bentuk pembinaan langsung kepada pelaku usaha terkait faktor-faktor yang belum memenuhi kriteria higiene dan sanitasi di pasar maupun sarana ritel.
4. **Pengawasan rutin pasca pelaksanaan tahapan program**, guna memastikan penerapan prinsip keamanan pangan berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga program pasar pangan aman tidak hanya bersifat pemenuhan tahapan kegiatan, tetapi benar-benar terimplementasi dalam operasional pasar sehari-hari.

Analisa kegagalan pencapaian kinerja dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menghambat atau menyebabkan tidak tercapainya target indikator *Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas*. Meskipun capaian telah memenuhi target, evaluasi terhadap potensi kegagalan tetap diperlukan sebagai langkah mitigasi risiko ke depan.

Beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja antara lain:

1. **Menurunnya komitmen dan partisipasi pelaku pasar**, terutama apabila pembinaan lanjutan dan pengawasan tidak dilakukan secara konsisten.
2. **Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan**, yang dapat mempengaruhi intensitas pendampingan, monitoring, serta verifikasi pemenuhan kriteria pasar pangan aman.
3. **Kurangnya dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah**, yang dapat berdampak pada keberlanjutan program setelah tahapan intervensi selesai.
4. **Rendahnya tingkat pemahaman atau kepatuhan sebagian pedagang terhadap prinsip higiene dan sanitasi**, sehingga membutuhkan pembinaan berulang dan pendekatan yang lebih intensif.

5. **Kendala teknis di lapangan**, seperti kondisi sarana dan prasarana pasar yang belum memadai, yang memerlukan dukungan lintas sektor untuk perbaikannya.

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, langkah antisipatif dapat disusun melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas pelaku pasar, optimalisasi pengawasan rutin, serta advokasi berkelanjutan kepada pemerintah daerah guna menjaga konsistensi dan keberlanjutan capaian kinerja.

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

Capaian ini didukung dari 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada Sasaran Strategis (SS) 3 terhadap target Tahun 2025 diperoleh rata-rata 100 dengan kriteria **“Cukup / Perlu Upaya Keras”** Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 79. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 3 Tahun 2025

Sasaran Strategis	IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun	Realisasi		Kategori Terhadap Target	
				Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	Tahun 2025	Tahun 2025
3 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17,24	17,24	100,00	Baik 	Tercapai 

IKU 18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 80 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17,24	17,24	100,00	Sangat Baik



Nilai persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada tahun 2025 adalah 5 Sertifikat IP CPPOB dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 17,24% dengan kategori capaian **"Sangat Baik"**.

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada tahun 2025 mengalami pergantian definisi Operasional, yang sebelumnya sebagai berikut :

Persentase UMKM yang memenuhi rekomendasi sertifikat = $(A + B + C) / 3$

$$A = \left(\frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

$$C = \left(\frac{\text{Jumlah UMKM kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

Menjadi

Cara Perhitungan Dan : **Perhitungan target tahunan (B12):**

Formula

((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%

Perhitungan target B1 - B11:

((Jumlah pemenuhan tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan) x 100%

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA

Loka POM Kabupaten Bungo memiliki target pendampingan pada komoditi Pangan Olahan sebanyak 5 sarana. Adapun berikut tahapan pendampingan produk pangan olahan:

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Sosialisasi / KIE Keamanan Pangan	Jan – Feb	5
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30
4	Fasilitasi Pendampingan	April – Okt	50
5	Monev dan Pelaporan	Nov - Des	5

Seluruh sudah dilaksanakan mulai dari perencanaan penetapan SK UMKM yang akan diterbitkan, hingga laporan akhir pendampingan umkm tahun 2025, dimana ada lima UMKM yang sudah terbit sertifikat IP CPPOB yaitu, New Kopi Bubuk Nur, PT.Alko Sumatra Kopi, Perumda Air Minum Tirta Sakti Kab.Kerinci, PT.Talang Lindung Sakti, dan Dapur AKS.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 81. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	2021	-	-	-	-
	2022	77	80	103,90	Sangat Baik 
	2023	79	100	126,58	Sangat Baik 
	2024	100	100	100,00	Baik 
	2025	17,24	17,24	100	Baik 

Capaian persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), dan/atau Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) selama periode lima tahun (2021–2025) menunjukkan hasil yang optimal. Seluruh UMKM yang ditargetkan pada masing-masing tahun berjalan berhasil memperoleh sertifikat atau rekomendasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa proses pendampingan, pembinaan, serta fasilitasi yang dilakukan telah berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Keberhasilan tersebut juga mencerminkan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu dan keamanan produk, serta efektivitas koordinasi antara tim pendamping dan UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.

Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan bahwa target kinerja pada indikator tersebut telah tercapai secara konsisten selama lima tahun berturut-turut, sekaligus menunjukkan keberlanjutan program pembinaan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing dan kepatuhan terhadap regulasi di bidang obat, kosmetik, dan pangan olahan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori	
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	51,72	17,24	33,33	Perlu Upaya Keras	

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), dan/atau Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) pada tahun 2025 tercatat sebesar 17,24%. Capaian ini menunjukkan adanya pelaksanaan pendampingan yang berjalan, namun apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Renstra, masih diperlukan upaya yang lebih terstruktur dan intensif. Target tahun 2027 ditetapkan sebanyak 7 UMKM yang

didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikasi, sehingga strategi percepatan perlu disiapkan sejak awal periode berikutnya.

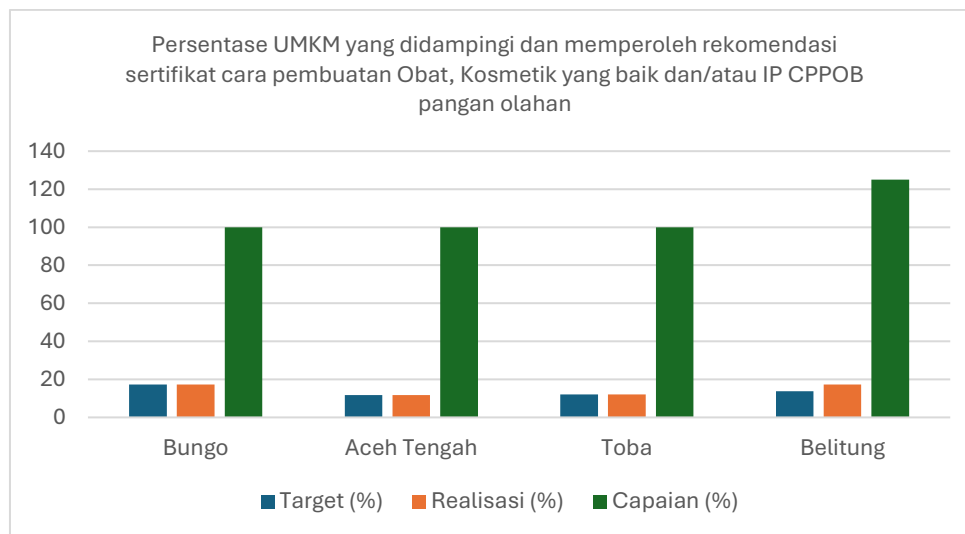
Dalam rangka mendukung ketercapaian target tersebut, diperlukan pemetaan UMKM potensial yang memiliki kesiapan administratif, teknis, dan komitmen untuk memenuhi standar CPOB, CPKB, dan/atau IP CPPOB. Pemetaan ini penting untuk memastikan proses pendampingan lebih terarah, efektif, dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam memperoleh rekomendasi sertifikat.

Selain itu, peningkatan kompetensi petugas pendamping menjadi faktor kunci dalam mendukung kualitas pelaksanaan program. Penguatan kapasitas teknis, pemahaman regulasi, serta keterampilan asistensi dan evaluasi akan meningkatkan efektivitas pembinaan dan mempercepat pemenuhan persyaratan oleh UMKM. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan target Renstra tahun 2027 dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 82. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Bungo	17,24	17,24	100	Baik	
	Aceh	11.76	11.76	100.00	Baik	
	Tengah	12.00	12	100.00	Baik	
	Toba	13.79	17.24	125.02	Sangat Baik	



Grafik 20. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Loka POM di Kabupaten Bungo menetapkan target sebesar 17,24 dan dengan realisasi sebesar 17,24 sehingga mencapai 100% dengan kategori **Baik**. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh UMKM yang direncanakan untuk didampingi pada tahun berjalan berhasil memperoleh rekomendasi sertifikat sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara kinerja, Bungo telah memenuhi komitmen perencanaan.

Jika dibandingkan dengan Loka POM lain, Aceh Tengah dan Toba juga mencatatkan capaian 100% dengan kategori **Baik**, yang menunjukkan bahwa ketiga Loka tersebut sama-sama mampu memenuhi target yang telah direncanakan. Namun demikian, Loka POM Belitung menunjukkan performa yang lebih tinggi dengan capaian 125,02% (kategori **Sangat Baik**), karena realisasi melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya perluasan sasaran pendampingan atau efektivitas strategi yang memungkinkan jumlah UMKM tersertifikasi melebihi rencana awal.

Loka POM di Kabupaten Bungo berada pada kelompok kinerja yang stabil dan sesuai target, namun belum termasuk yang melampaui target seperti Belitung. Dengan demikian, meskipun capaian Bungo sudah mencapai target, masih terdapat peluang peningkatan melalui strategi identifikasi UMKM potensial yang lebih luas, percepatan proses pendampingan, serta optimalisasi pembinaan agar pada periode berikutnya tidak hanya mencapai target, tetapi juga berpotensi melampaui target yang ditetapkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Berdasarkan Capaian kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat CPOB, CPKB, dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada tahun 2025 yang mencapai 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh perencanaan yang terukur, penetapan sasaran UMKM yang memiliki kesiapan awal, serta pelaksanaan pendampingan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, koordinasi internal tim yang efektif serta komunikasi yang intensif dengan pelaku usaha turut mendukung kelancaran proses pemenuhan persyaratan sertifikasi.

Meskipun kinerja telah mencapai target, tetap terdapat tantangan dalam pelaksanaan di lapangan, seperti variasi tingkat pemahaman UMKM terhadap standar yang dipersyaratkan, keterbatasan sumber daya, serta kendala administratif dalam proses pengajuan rekomendasi. Faktor-faktor tersebut memerlukan perhatian agar tidak memengaruhi stabilitas capaian pada periode berikutnya.

Sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, diperlukan pemetaan UMKM potensial secara lebih awal dan komprehensif untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif sebelum proses pendampingan dimulai. Selain itu, peningkatan kompetensi petugas pendamping melalui penguatan kapasitas teknis dan pemahaman regulasi perlu terus dilakukan agar kualitas asistensi tetap terjaga. Penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala juga menjadi langkah penting untuk memastikan proses pendampingan berjalan efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan langkah tersebut, diharapkan kinerja dapat dipertahankan secara konsisten sesuai target yang telah direncanakan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
----	-----------	--------------------------	-------------	--------------------------	----------	--	----------------	------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan (DJANGKI OM)	Blokir anggaran yang telah dibuka tidak pada indikator ini, sehingga tetap masih ada efisiensi anggaran sebesar 87,94% pada indikator kegiatan ini, kegiatan 80% dialihkan secara daring, sedangkan pendampingan UMKM dimana mayoritas pelaku usaha tidak paham teknologi sehingga pendampingan UMKM tidak efektif	Mengusulkan penambahan anggaran / pembukaan blokir untuk indikator ini	Maksimal kegiatan secara daring dan pendampingan UMKM secara daring, serta memanfaatkan layanan MPP di Kabupaten Bungo	Sudah dilaksanakan	Y	Infokom 08	terbatasnya jangkauan UMKM yang divisitasi pada program DJANGKI OM

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program pendampingan Berdasarkan hasil capaian Tahun 2025, pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM Pangan Olahan menunjukkan progres yang berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pada Triwulan III, capaian tahapan telah mencapai 85%, dan hingga akhir tahun seluruh tahapan kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan sesuai target kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program pendampingan dilaksanakan secara konsisten dan terkontrol berdasarkan timeline kegiatan yang telah disusun.

Tahapan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun meliputi Sosialisasi atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan, penetapan UMKM sasaran, Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), serta pendampingan pemenuhan aspek sarana dan dokumen. Kegiatan sosialisasi sebagian besar dilaksanakan secara daring untuk menjangkau pelaku usaha secara lebih luas dan efisien. Sementara itu, Bimbingan Teknis CPPOB diselenggarakan secara hybrid guna menjaga efektivitas penyampaian materi sekaligus mempertimbangkan efisiensi anggaran. Pendampingan teknis dilakukan melalui kombinasi metode *onsite*

dan online, menyesuaikan dengan tingkat kesiapan dan kebutuhan masing-masing UMKM.

Sepanjang tahun 2025, minat pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya ke BPOM menunjukkan tren yang positif. Hal ini mengindikasikan meningkatnya kesadaran akan pentingnya legalitas dan jaminan keamanan produk dalam rangka meningkatkan daya saing usaha. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah tantangan, antara lain rendahnya tingkat komitmen sebagian pelaku usaha dalam menindaklanjuti perbaikan yang direkomendasikan, keterbatasan pemahaman terhadap regulasi dan alur pendaftaran, serta kemampuan yang masih terbatas dalam pemanfaatan sistem digital.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar pelaku UMKM masih membutuhkan pendampingan intensif dari petugas Loka POM. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan alokasi anggaran menjadi faktor yang memengaruhi intensitas pendampingan secara menyeluruh. Meskipun metode pendampingan langsung (onsite) dinilai lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha, pendekatan kombinasi daring dan luring tetap menjadi strategi yang dipilih untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas pelaksanaan dan efisiensi sumber daya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program pendampingan UMKM Pangan Olahan Tahun 2025 dapat dinilai berjalan efektif dan sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan berbagai tantangan sebagai bahan evaluasi untuk penguatan pelaksanaan program pada periode berikutnya.

3.1.1.4 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 4 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Capaian ini didukung dari 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari realisasi pada Sasaran Strategis 4 terhadap target Tahun 2025 diperoleh rata-rata 107,53% dengan kriteria **“Tercapai/ Melampaui”** Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis Tahun 2025

Sasaran Strategis	IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun	Realisasi		Kategori Terhadap Target	
				Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	Tahun 2025	Tahun 2025
4 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	100	107,53	Sangat Baik 	Tercapai 

IKU 19. Persentase Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 83 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	100	107,53	Sangat Baik 

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Penilaian Tingkat Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut sebagai berikut :

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai realisasi Tingkat persentase keberhasilan penyidikan kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah 100. Capaian nilai terhadap target Triwulan IV Tahun 2025 adalah 107,53%. Hal ini dikarenakan pada Triwulan IV Tahun 2025 targetnya adalah 93 namun realisasinya adalah 100 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“Sangat Baik”**. Hal ini terjadi karena hingga Triwulan III Tahun 2025 terdapat kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia yang sudah selesai seluruh tahapannya hingga Tahap II.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 84. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	2021	80	110	137,50	Sangat Baik	
	2022	52	100	192,31	Sangat Baik	
	2023	55	100	181,82	Sangat Baik	
	2024	90	100	111,11	Sangat Baik	
	2025	93	100	107,53	Sangat Baik	

Pada Tahun 2021 memiliki target 80% dengan capaian keberhasilan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan pada tahun 2021 diperoleh realisasi yang memenuhi target sebesar 110% dan % capaian pada tahun 2021 sebesar 137.50% sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik. Pada tahun 2022 memiliki target sebesar 52% diperoleh realisasi sebesar 100% sehingga capaian pada tahun 2022 sebesar 192.31% dan masuk pada kategori Sangat

Baik. Pada tahun 2023 memiliki target sebesar 55% diperoleh realisasi sebesar 100% dan capaian pada tahun 2023 sebesar 181.82% masuk pada kategori Sangat Baik. Pada tahun 2024 memiliki target sebesar 90% diperoleh realisasi sebesar 100% dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 111.11% masuk pada kategori Sangat Baik. Pada tahun 2025 memiliki target sebesar 93% dan diperoleh realisasi sebesar 100% sehingga capaian pada tahun 2025 adalah 107,53% masuk pada kategori Sangat Baik. Hasil ini merupakan tren positif yang menunjukkan bahwa kinerja Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT selalu konsisten dan berhasil menyelesaikan kasus hingga tuntas.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95	100	107,53	Tercapai/ Melampaui 

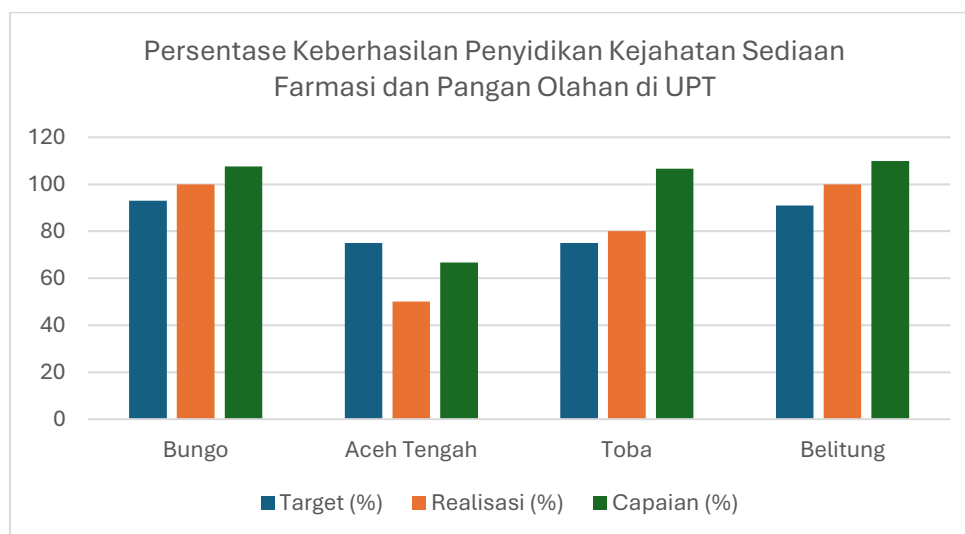
Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT tahun 2025 memiliki capaian 105,26% terhadap target jangka menengah tahun 2025 dengan kategori capaian sangat baik dan tercapai. Kinerja ini sudah mencapai target namun tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga target jangka menengah tahun 2027 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 85. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Bungo	93	100	107,53	Sangat Baik 
	Aceh Tengah	75	50	66.67	Cukup 
	Toba	75.00	80	106.67	Sangat Baik 

Belitung	91	100	109.89	Sangat Baik
----------	----	-----	--------	-------------



Grafik 21. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Berdasarkan grafik diatas, realisasi Loka POM di Kabupaten Belitung dengan dan Loka POM di Kabupaten Bungo sama-sama 100% yang artinya penyidikan selesai hingga Tahap 2 sehingga capaian Loka POM di Kabupaten Belitung tertinggi yaitu 109,89 sedangkan Loka POM di Kabupaten Bungo adalah 107,53 yang sehingga keduanya masuk dalam kategori Sangat Baik. Perbedaan nilai capaian terjadi karena target Loka POM di Kabupaten Bungo lebih tinggi dibandingkan Loka POM di Kabupaten Belitung. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Toba dengan realisasi 80% dan target 75% sehingga capaian 106,67% dengan kategori Sangat Baik, sementara Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah capaian dibawah 100% dengan kategori Cukup.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo terjadi karena:

- Kegiatan ini dapat berhasil karena memiliki petugas yang di fungsi penindakan yang masih muda dan cekatan. Saat ini Loka POM Kabupaten Bungo memiliki 2 orang PPNS yang baru dilantik di Tahun 2023.

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang semakin profesional dalam melakukan serangkaian kegiatan dari pengumpulan bahan keterangan hingga dilakukannya penindakan.
5. Koordinasi yang terjalin baik dengan *Criminal Justice System* seperti Kepolisian setempat yaitu Polres Bungo, Polres Merangin dan Polres Kerinci selaku korwas PPNS yang memberikan bantuan teknis dan taktis di lapangan maupun proses penyidikan. Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Setempat seperti Kejaksaan Negeri Bungo, Kejaksaan Negeri Merangin dan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh terkait proses pemberkasan perkara. Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Bungo, Pengadilan Negeri Bangko, Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Bea Cukai Jambi dan lintas sektor terkait.
6. Telah dilakukan penanganan perkara secara *pro justitia* terhadap 1 (satu) kasus obat-obat tertentu dengan tersangka sebanyak 3 (tiga) orang yang saat ini sudah pada tahap Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan (Tahap II) dengan hasil putusan masing masing dikenai hukuman Penjara 1 Tahun 8 Bulan, Denda Rp. 250.000.000 (subsider kurungan 2 bulan).

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Belum optimalnya pengalaman dan kapasitas PPNS Loka POM Bungo yang baru dilantik dalam melaksanakan penyidikan secara mandiri.	Memberikan peningkatan kompetensi kepada PPNS dan meminta pendampingan PPNS Balai Koordinator saat melakukan penyidikan	Memberikan peningkatan kompetensi kepada PPNS dan meminta pendampingan PPNS Balai Koordinator saat melakukan penyidikan	-	Ya	Dak 1	Keterbatasan kemampuan petugas Loka POM di Bungo dalam melakukan penyidikan mandiri
	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Adanya potensi perlawanan dari pelaku usaha dalam upaya menghindari penyitaan barang bukti dan proses projustitia.	Bekerja sama dengan pihak kepolisian dan keamanan setempat	Bekerja sama dengan pihak kepolisian dan keamanan setempat	-	Ya	Dak 2	Ancaman atau kekerasan fisik oleh pelaku usaha dan masyarakat terhadap petugas
	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan	Belum optimalnya pengendalian dan pembatasan	Meminimalisir petugas yang mengetahui informasi Target	Meminimalisir petugas yang mengetahui informasi Target	-	Ya	Dak 3	Kebocoran informasi terkait kedatangan petugas pada

Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	akses informasi terkait rencana pelaksanaan operasi penindakan.	Operasi sesuai surat tugas	Operasi sesuai surat tugas				saat operasi penindakan
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Keterbatasan sarana dan prasarana penyimpanan barang bukti yang memenuhi standar keamanan dan administrasi.	7. Pengusulan sarana/prasarana bangunan gudang dan pemenuhan fasilitas Gudang Barang Bukti kepada PPK/KPA Loka POM di Kabupaten Bungo 8. Memasang CCTV dan ada Security Kantor	9. Pengusulan sarana/prasarana bangunan gudang dan pemenuhan fasilitas Gudang Barang Bukti kepada PPK/KPA Loka POM di Kabupaten Bungo Memasang CCTV dan ada Security Kantor	-	Ya	Dak 4	Kehilangan Barang Bukti
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Adanya upaya hukum dari tersangka untuk menguji aspek formil maupun materiil proses penyidikan.	10. Melakukan gelar kasus/perkara 11. Membuat administrasi dengan lengkap	12. Melakukan gelar kasus/perkara Membuat administrasi dengan lengkap	-	Ya	Dak 5	Adanya tuntutan pra peradilan dari tersangka

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tindak pidana obat dan makanan merupakan tindak kejahatan terorganisir sehingga merupakan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pengawasan yang paripurna dan berkelanjutan agar masyarakat terlindungi dari obat dan makanan ilegal yang beresiko terhadap kesehatan. Loka POM di Kabupaten Bungo terus berupaya melakukan pengawasan terhadap penjualan offline maupun online, melakukan penelusuran dan pendalaman informasi terhadap produk obat dan makanan yang tren peredarannya mulai beralih ke arah digital.

3.1.1.5 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 5 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Capaian ini didukung dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada SS 5 terhadap target diperoleh hasil rata-rata 106,48 dengan kriteria **“Sangat Baik/ Tercapai/ Melampaui”** Hasil tersebut disajikan pada table berikut ini :

Tabel 86. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2025

Sasaran Strategis		IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun an	Realisasi		Kategori Terhadap Target	
					Realis asi	%Capai an thd Target bulan n	Tahun 2025	Tahun 2025
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	95,83	106,48	Sangat Baik 	Tercapai 

IKU 20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 87 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	95,83	106,48	Sangat Baik 

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor

HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**

Untuk penilaian tingkat keberhasilan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Dengan pertimbangan keterangan sebagai berikut:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Nilai realisasi Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Tahun 2025 adalah 95,83. Capaian nilai terhadap target Tahun 2025 adalah 106,48% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“Sangat Baik”**.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 88. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	90	95,83	106,48	Sangat Baik 

Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar merupakan Indikator Kinerja Baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Akan tetapi pada Tahun 2025 capaian persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar terhadap target adalah 106,48% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“Sangat Baik”**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

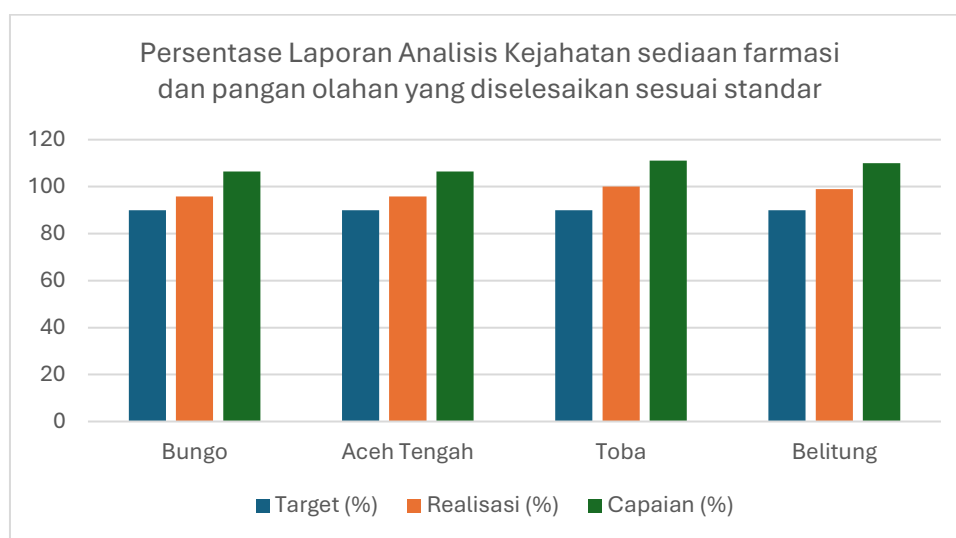
IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	92	95,83	106,48	Tercapai/Melampaui 

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 memiliki capaian 104,16% terhadap target jangka menengah tahun 2027 dengan kategori Tercapai/Melampaui. Kinerja ini sudah mencapai target namun tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga target tahun 2027 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 89. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	Bungo	90	95,83	106,48	Sangat Baik	●
	Aceh Tengah	90	95.83	106.48	Sangat Baik	●
	Toba	90.00	100	111.11	Sangat Baik	●
	Belitung	90	99	110.00	Sangat Baik	●



Grafik 22. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Berdasarkan grafik diatas, capaian tertinggi diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Toba dengan nilai 111,11% kategori Sangat Baik. Begitu juga dengan ketiga Loka POM lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Belitung , Loka POM di Kabupaten Bungo dan Loka POM di Kabupaten Toba ketiganya dengan capaian di atas 100% yaitu masing-masing dengan nilai 110,00 ; 106,48 ; 106, 48 dengan kategori Sangat Baik.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo tentu saja terjadi karena:

13. Tren masyarakat saat ini mulai beralih ke arah digital, sehingga staf penindakan secara aktif melakukan pemantauan peredaran obat dan

makanan di media online melalui pelaksanaan kegiatan patroli siber. Kegiatan ini dapat berhasil karena memiliki petugas yang di fungsi penindakan yang masih muda dan cekatan meskipun kompetensi SDM masih belum memadai karena belum seluruhnya pernah mengikuti diklat intelijen dasar, analisis, penggalangan maupun siber.

14. Penyesuaian system kerja karena adanya perubahan susunan anggota tim fungsi penindakan.
15. Pelaporan patrol siber Bulan Januari-Desember 2025 seluruhnya tepat waktu. Sedangkan pelaporan profiling pelaku kejahatan Bulan Januari-September 2025 yang tepat waktu kecuali pelaporan NIHIL pada bulan Maret dan September 2025 yang dinilai terlambat. Hal ini terjadi karena pada pertengahan Bulan Maret 2025 sedang dilakukan Operasi Penindakan yang berlanjut ke proses pro justitia, sehingga dengan keterbatasan personal yang ada terjadi kelalaian dalam penyampaian laporan.
16. Pelaksanaan kegiatan Penggalangan Masyarakat dan Instansi Terkait dengan Tema Tolak Bahaya Penyalahgunaan Obat untuk Masyarakat Sehat pada tanggal 27 Agustus 2025 di Sungai Penuh yang dihadiri oleh Dinas kesehatan Kota Sungai Penuh dan Kab. Kerinci, Dinas Pendidikan, Para Camat di Kota Sungai Penuh, Perwakilan Karang Taruna setiap kecamatan di Kota Sungai Penuh, jasa pengiriman/ekspedisi, Kepala Sekolah SMP dan SMA di Kota Sungai Penuh serta Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Polres Kerinci, dan Kodim 0417/Kerinci
17. Penyusunan Laporan analisis kejahatan dengan judul “Analisis Tren Kerawanan Kejahatan Peredaran Obat-Obat Tertentu Ilegal di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2023–2025” yang disusun dan dilaporkan tepat waktu.
18. Aktif melaksanakan Tidak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis yang Disusun oleh Direktorat Cegah Tangkal dan berhasil mendapatkan penghargaan dari Direktur Cegah Tangkal sebagai **Loka Terbaik 2** pada kategori **“Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan.”**

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
----	-----------	--------------------------	-------------	--------------------------	----------	-----------------	----------------	---------------------

						dikelola sebagai risiko (Y/T)*		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses perdagangan secara daring yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pengawasan siber yang optimal.	19. Melakukan Patroli siber 20. Melakukan Penggalangan	21. Melakukan Patroli siber Melakukan Penggalangan	-	Ya	Dak 6	Maraknya kejahatan siber terkait obat dan makanan

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Upaya pencapaian kinerja pada tahun 2025 ditunjang melalui pelaksanaan program Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, antara lain melalui kegiatan:
2. Kegiatan Peningkatan kompetensi petugas. Pelatihan terhadap penjejukan digital dan anailisis kejahatan yang diadakan oleh BPOM RI secara daring maupun luring.
3. Adaptif terhadap sistem pelaporan baru laporan siber dan laporan profiling kejahatan meskipun aplikasi seringkali bermasalah dan eror.

3.1.1.6 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 6 Layanan Publik UPT yang prima

Capaian ini didukung dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada SS 6 terhadap target diperoleh hasil rata-rata 109,55 dengan kriteria **“Baik/ Tercapai/ Melampaui”** Hasil tersebut disajikan pada table berikut ini :

Tabel 90. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2024

Sasaran Strategis	IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun an	Realisasi		Kategori Terhadap Target	
				Realis asi	%Capai an thd	Tahun 2025	Tahun 2025

						Target bulan n		
6	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4	4,82	109,55	Sangat Baik	Tercapai
								

IKU 21. Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 91 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indeks Pelayanan Publik UPT

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4	4,82	109,55	Sangat Baik
				

Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2025 mencapai 4,82 dari target 4,4 atau 109,55%, sehingga termasuk kategori **Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa UPT telah memberikan layanan yang melebihi ekspektasi yang ditetapkan, baik dari sisi efektivitas, ketepatan waktu, maupun kepuasan pengguna layanan. Secara keseluruhan, capaian ini tidak hanya menunjukkan target kuantitatif terpenuhi, tetapi juga mencerminkan kualitas layanan yang unggul dan berorientasi pada kepuasan publik.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 92. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Indeks Pelayanan Publik UPT

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	4,4	4,82	109,55	Sangat Baik 

Berdasarkan Tabel 19, *Indeks Pelayanan Publik UPT* Tahun 2025 mencapai 4,82 dari target 4,4 atau 109,55%, sehingga masuk kategori **Sangat Baik**. Data realisasi pada tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia, sehingga perbandingan kuantitatif secara historis belum dapat dilakukan.

Namun, capaian 2025 ini menunjukkan bahwa UPT telah berhasil memberikan layanan publik yang melebihi ekspektasi target. Peningkatan kinerja ini kemungkinan dipengaruhi oleh optimalisasi prosedur layanan, peningkatan kapasitas petugas, serta penerapan sistem administrasi dan dokumentasi yang baik. Responsivitas petugas dan mekanisme tindak lanjut keluhan masyarakat juga menjadi faktor kunci yang mendukung tercapainya indeks pelayanan tinggi.

Kondisi ini menegaskan bahwa pelayanan publik di UPT telah berjalan efektif, terstruktur, dan berorientasi pada kepuasan pengguna. Ke depan, meskipun capaian kuantitatif sudah melebihi target, fokus perlu diarahkan pada inovasi layanan, konsistensi kualitas, dan penguatan mekanisme monitoring agar capaian kinerja tetap terjaga secara berkelanjutan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,5	4,82	107,11	Tercapai/ Melampaui 

Berdasarkan data Renstra, target jangka menengah Tahun 2027 untuk *Indeks Pelayanan Publik UPT* ditetapkan sebesar 4,5. Sampai dengan Tahun 2025, realisasi indeks telah mencapai 4,82, atau 107,11% dari target, sehingga capaian ini dikategorikan **Tercapai/Melampaui**.

Capaian ini terjadi lebih cepat dari yang direncanakan karena adanya pendampingan dari BPOM Pusat terkait pemenuhan aspek pelayanan publik prima, serta kegiatan sharing pengalaman dan praktik terbaik dari UPT lain yang telah memenuhi seluruh target capaian. Dengan dukungan tersebut, target yang

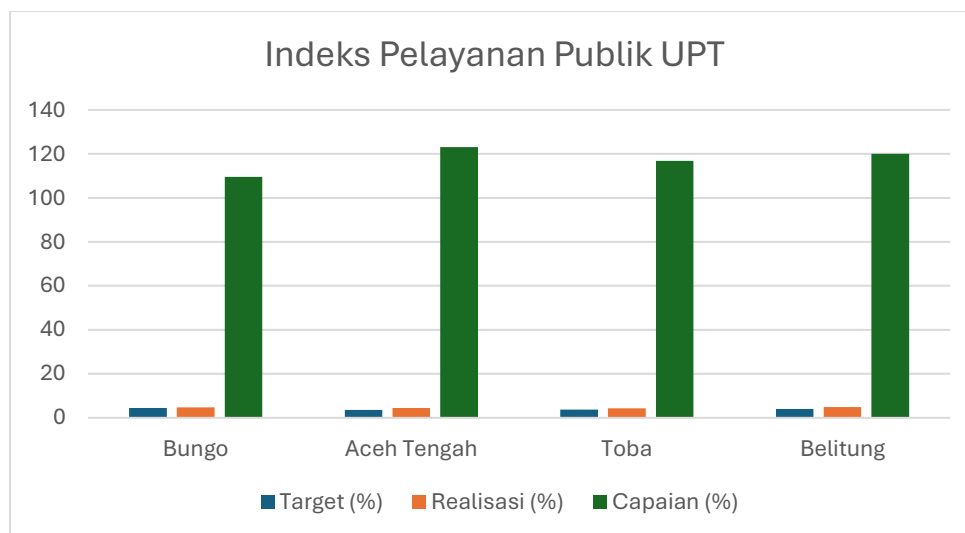
awalnya direncanakan untuk dicapai pada Tahun 2027 sudah berhasil direalisasikan pada Tahun 2025.

Hasil ini menunjukkan bahwa UPT telah mampu memberikan layanan publik yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Realisasi yang melebihi target menandakan bahwa pelaksanaan pelayanan telah berjalan sesuai dengan rencana strategis dan memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan publik di tingkat UPT.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 93. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Indeks Pelayanan Publik UPT	Bungo	4,4	4,82	109,55	Sangat Baik	●
	Aceh Tengah	3,6	4,43	123,06	Sangat Baik	●
	Toba	3,75	4,38	116,80	Sangat Baik	●
	Belitung	4,05	4,86	120,00	Sangat Baik	●



Grafik 23. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Berdasarkan Tabel 20 dan Grafik 23, realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2025 pada Loka POM di Kabupaten Bungo mencapai 4,82 dari target 4,4 atau 109,55%, termasuk kategori Sangat Baik. Apabila dibandingkan dengan UPT lain dalam Cluster 3, yaitu Aceh Tengah (4,43/3,6), Toba (4,38/3,75), dan Belitung (4,86/4,05), seluruhnya juga menunjukkan capaian di atas target dan

masuk kategori Sangat Baik, dengan persentase capaian tertinggi dicapai oleh Belitung sebesar 120%.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo berada pada tingkat yang seimbang dengan UPT pembanding dalam cluster. Seluruh UPT berhasil melampaui target yang ditetapkan, menandakan bahwa standar pelayanan publik prima telah diterapkan secara konsisten di masing-masing wilayah. Keberhasilan ini juga didukung oleh pertukaran praktik baik antar UPT dan pendampingan dari BPOM Pusat, sehingga meskipun target berbeda-beda, kualitas pelayanan publik tetap terjaga dan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan.

Dengan capaian yang seragam dan melampaui target, perbandingan kinerja antar UPT dalam Cluster 3 dapat dijadikan tolok ukur untuk penguatan standar pelayanan, inovasi metode layanan, serta upaya berkelanjutan dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Berbagai upaya dilakukan Loka POM di Kabupaten Bungo untuk mendapat kategori penilaian “Pelayanan Prima”, yaitu pemenuhan persyaratan/klausul penilaian secara maksimal untuk seluruh 6 (enam) aspek penilaian. Berdasarkan penilaian/evaluasi mandiri, seluruh aspek mendapatkan nilai maksimal. Upaya yang dilakukan untuk mendukung penilaian maksimal, antara lain:

1. Membentuk SK Tim Penilaian Indeks Pelayanan Publik
2. Melakukan pembagian jobdesk untuk masing-masing point penilaian pada aplikasi sapa apip
3. Melaksanakan persiapan pada awal tahun sehingga pada saat penilaian, hanya tinggal mengumpulkan data dukunganya saja.

4. Melakukan reviu Standar Pelayanan Publik secara berkala setiap tahun, dan mengadakan Forum Konsultasi Publik dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik untuk mendapatkan masukan/saran dari berbagai unsur masyarakat.
5. Melakukan SKM setiap bulan untuk mengukur kualitas pelayanan publik di mata pelanggan.
6. Melakukan publikasi tentang Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, dan SKM di berbagai media elektronik/non elektronik.
7. Upaya menunjukkan profesionalisme SDM yaitu adanya SK pelaksanaan tugas Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional, pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja, dll
8. Untuk mempertahankan profesionalisme SDM petugas pelayanan publik, secara kontinu dilakukan pendidikan/pelatihan untuk peningkatan kompetensi, pemberian beasiswa, coaching/mentoring, capacity building dan mekanisme lainnya untuk memotivasi, meningkatkan kualitas petugas layanan publik, dan konsistensi penerapan budaya pelayanan prima.
9. Pemberian reward dan punishment untuk petugas pelayanan publik
10. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk kelompok rentan. Fasilitas yang disiapkan sesuai dengan SE Menteri PANRB No. 66/2020 tentang Penyediaan
11. Sarana Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ada 14 fasilitas yang harus disediakan bagi kelompok rentan. Keempat belas sarana prasarana tersebut meliputi kursi roda/tongkat/krek; pintu masuk yang mudah diakses; jalan landai dan pegangan rambat; lift khusus kelompok rentan disertai huruf braille; selasar yang menghubungkan semua ruang; toilet khusus; loket khusus; ruang tunggu khusus; serta guiding block dan parkir khusus. Kemudian, alat bantu tunanetra dan tunarungu; arena bermain anak; ruang laktasi/menyusui; serta fasilitas lain pendukung layanan seperti petugas pemandu ataupun petugas yang mampu berbahasa isyarat.

12. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti perubahan dekorasi, penambahan fasilitas coffee corner, penyediaan minuman dan kue tradisional, dll.
13. Memastikan sistem antrian di ruang layanan publik berfungsi dengan baik
14. Melakukan pemuktahiran system informasi pelayanan publik yang dilakukan setiap hari, mengoptimalkan sistem informasi yang terhubung ke SIPPN, dll.
15. Memastikan pengaduan ditindaklanjuti sesuai timeline, mengoptimalkan penggunaan kanal pengaduan nasional SP4N Lapor, penyusunan laporan dan monev pengaduan secara berkala, dll.
16. Pengembangan inovasi yang berkelanjutan dengan dukungan SDM, Sarana dan Prasarana, serta anggaran.

Meskipun terdapat sejumlah keberhasilan, beberapa kendala masih menjadi faktor penghambat pencapaian target indeks pelayanan publik. Faktor penyebab kegagalan/kendala meliputi:

- 1 Keterbatasan waktu pengisian e-Vortal karena beban kerja staf yang bersifat multitugas.
- 2 Tingkat pemahaman SDM terhadap sistem digital dan indikator penilaian pelayanan publik yang belum merata, menyebabkan kesalahan penginputan data.
- 3 Infrastruktur teknologi informasi yang belum optimal karena keterbatasan jaringan.

Berdasarkan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan, beberapa upaya perbaikan disarankan untuk meningkatkan kinerja indeks pelayanan publik:

- 1 Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan terkait pengisian e-Vortal, pengelolaan data, serta pemahaman indikator pelayanan publik bagi seluruh SDM.
- 2 Menyusun dan mendistribusikan panduan teknis penginputan data dan prosedur pelayanan publik secara digital maupun cetak.

- 3 Memperkuat mekanisme koordinasi internal melalui rapat rutin, komunikasi daring, dan sistem monitoring terpadu antar unit kerja.
- 4 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi informasi, khususnya peningkatan kualitas internet.
- 5 Melakukan sosialisasi rutin terkait SOP dan standar pelayanan publik untuk memastikan keseragaman pemahaman dan kepatuhan di seluruh unit kerja.

Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala berbasis indikator kinerja untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dan peningkatan akuntabilitas pelayanan publik.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Keterbatasan waktu pengisian e-Vortal karena staf multitugas	Menyelenggarakan pelatihan pengisian e-Vortal dan manajemen waktu	Melakukan pelatihan rutin dan pembagian tugas lebih efisien	2026	T	-	
2	Indeks Pelayanan Publik UPT	Pemahaman SDM terhadap sistem digital dan indikator pelayanan publik belum merata	Sosialisasi rutin SOP dan indikator pelayanan publik	Membuat panduan teknis digital & cetak, melakukan workshop internal	2026	T	-	
3	Indeks Pelayanan Publik UPT	Infrastruktur TI belum optimal (koneksi internet terbatas)	Peningkatan kualitas infrastruktur TI	Upgrade jaringan internet, optimalkan sistem e-Vortal dan SIPPN	2026	T	-	
4	Indeks Pelayanan Publik UPT	Pengelolaan pengaduan yang belum maksimal	Pemantauan pengaduan dan tindak lanjut sesuai timeline	Optimalkan penggunaan SP4N Lapor, susun laporan dan monev berkala	2026	T	-	
5	Indeks Pelayanan Publik UPT	Variasi pemahaman SDM terhadap standar pelayanan	Sosialisasi berkala terkait SOP & Standar Pelayanan	Forum konsultasi publik, review Standar Pelayanan setiap tahun	2026	T	-	
6	Indeks Pelayanan Publik UPT	Kualitas sarana/prasarana belum optimal di beberapa lokasi	Pemutakhiran sarana/prasarana pelayanan publik	Penambahan fasilitas kelompok rentan, coffee corner, ruang tunggu, dsb.	2026	Y	Infokom 11	Pelayanan tidak nyaman dan tidak inklusif untuk semua pengguna
7	Indeks Pelayanan Publik UPT	Profesionalisme SDM perlu dipertahankan	Pengembangan SDM berkelanjutan	Pendidikan, pelatihan, mentoring, reward & punishment, capacity building	2026	T	-	
8	Indeks Pelayanan Publik UPT	Pengawasan & evaluasi layanan belum optimal	Monitoring & evaluasi berbasis indikator	Pemantauan rutin POA, survei kepuasan, evaluasi berkala	2026	T	-	

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pelayanan Publik :

1. **Komitmen Tim dan Pelaksanaan Jobdesk**

Seluruh tim wajib menjalankan jobdesk masing-masing secara konsisten serta mengumpulkan data dukung tepat waktu, sehingga pengunduhan data ke aplikasi e-Vortal dapat dilakukan sesuai jadwal penilaian.

2. **Pemenuhan Sarana dan Prasarana**

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk memenuhi setiap kriteria indeks pelayanan publik, termasuk fasilitas bagi kelompok rentan, ruang tunggu, sistem antrian, dan dukungan TI.

3. **Inovasi Pelayanan Publik**

Pengembangan inovasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, menjaga integritas pegawai, profesionalisme, fairness, serta akuntabilitas.

4. **Program LAPAK POM SAPAKAT**

Layanan ini menghadirkan *Unit Layanan Pengaduan Konsumen* (ULPK) lebih dekat ke masyarakat, mempermudah akses informasi dan pengaduan secara langsung.

5. **Program Djangki OM**

Inovasi ini mempercepat pelayanan bagi UMKM yang mengajukan izin edar, sehingga proses administratif lebih efisien dan waktu tunggu lebih singkat.

6. **Program Kanti Cedik**

Memanfaatkan aplikasi *WhatsApp*, video call, dan Zoom untuk memberikan kemudahan informasi dan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus datang langsung ke kantor.

7. **Dokumentasi Lengkap sebagai Kunci Keberhasilan**

Program pelayanan publik harus disertai dokumentasi lengkap agar pada saat penilaian dan evaluasi, data yang dinilai mencerminkan kinerja yang sebenarnya.

8. **Konsistensi Pelayanan**

Pelayanan publik yang tidak konsisten dapat menurunkan indeks kepuasan masyarakat dan berdampak negatif terhadap indeks pelayanan publik secara keseluruhan.

Analisis Kegagalan Pencapaian Kinerja

Meskipun capaian Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2025 tergolong Sangat Baik, beberapa faktor potensial dapat menjadi penyebab kegagalan atau penurunan kinerja jika tidak ditangani secara tepat:

1. Keterbatasan waktu dan beban kerja staf

Staf yang menangani banyak tugas sekaligus berpotensi mengalami keterlambatan pengumpulan data dan pengisian e-Vortal, sehingga berdampak pada akurasi dan ketepatan penilaian.

2. Variasi pemahaman SDM terhadap sistem digital dan indikator penilaian

Tingkat pemahaman yang tidak merata dapat menyebabkan kesalahan penginputan data, ketidaksesuaian pelaporan, dan kesalahan dokumentasi pendukung penilaian.

3. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi

Gangguan jaringan atau keterbatasan fasilitas TI dapat menghambat proses pemutakhiran data, pengelolaan sistem antrian, dan pengelolaan aplikasi pelayanan publik.

4. Dokumentasi pelayanan yang tidak lengkap atau tidak konsisten

Kegiatan pelayanan yang tidak tercatat secara sistematis berisiko menurunkan skor indeks saat evaluasi, karena data pendukung menjadi tidak lengkap.

5. Konsistensi layanan publik yang belum optimal

Pelayanan yang tidak rutin dan bervariasi kualitasnya dapat menurunkan tingkat kepuasan masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan indeks pelayanan publik.

6. Keterbatasan pengawasan dan evaluasi internal

Jika pemantauan pelaksanaan POA dan indikator kinerja tidak dilakukan secara berkala, potensi kesalahan dan ketidaksesuaian prosedur tidak dapat dideteksi lebih awal.

7. Keterbatasan dalam pelayanan kelompok rentan

Baik sarana/prasarana maupun SDM yang mampu memberikan layanan khusus untuk kelompok rentan masih terbatas. Hal ini dapat menurunkan kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu menyusui, dan kelompok lain yang membutuhkan perlakuan khusus.

Faktor-faktor di atas menjadi perhatian strategis untuk menjaga keberlanjutan capaian indeks pelayanan publik. Penanganan melalui pelatihan SDM, peningkatan infrastruktur, penyediaan fasilitas ramah kelompok rentan, konsistensi dokumentasi, dan monitoring rutin sangat diperlukan agar kinerja pelayanan publik tetap optimal dan skor indeks tidak menurun di masa mendatang.

3.1.1.7 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 7 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Capaian ini didukung dari 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari realisasi pada Sasaran Strategis 7 terhadap target Tahun 2025 diperoleh rata-rata 99,90% dengan kriteria **“Baik / Akan Tercapai”** Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 94. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7 Tahun 2025

Sasaran Strategis	IKU	Indikator Kinerja	Target Tahun an	Realisasi		Kategori Terhadap Target	
				Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	Tahun 2025	Tahun 2025
7 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai AKIP UPT BPOM	78,39	75,76	96,64	Baik 	Akan Tercapai 
	23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100,00	Baik 	Tercapai 
	24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55	2,625	102,94	Sangat Baik 	Tercapai 

25	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100,00	Baik	Tercapai
----	---	-----	-----	--------	------	----------



IKU 22. Nilai AKIP UPT BPOM

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 95 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indeks Pelayanan Publik UPT

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Nilai AKIP UPT BPOM	78,39	75,76	96,64	Baik



Realisasi Nilai AKIP UPT pada Loka POM di Kabupaten bungo tahun 2025 adalah 75,76 dari target sebesar 78,39 sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2024 sebesar 96,64% dengan kriteria **“Baik”**

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100;

- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90;
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80;
- 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70;
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60;
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50;
- 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

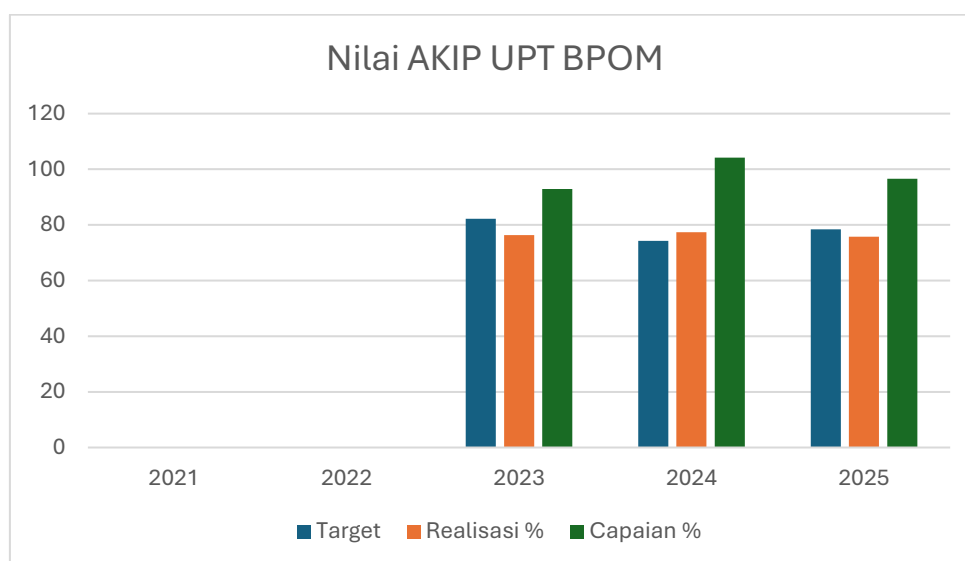
b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 96. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Indeks Pelayanan Publik UPT

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Nilai AKIP UPT BPOM	2021	-	-	-	-	
	2022	-	-	-	-	
	2023	82,2	76,35	92,88	Baik	
	2024	74,29	77,39	104,17	Sangat Baik	
	2025	78,39	75,76	96,64	Baik	

Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa Nilai AKIP UPT menjadi Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Bungo sejak tahun 2023. Pada tahun 2023 diperoleh capaian 92,88% dengan kategori **“Cukup”**. Sedangkan pada tahun

2024 diperoleh capaian sebesar 104,17% dengan kategori **“Sangat Baik”**. Pada tahun 2025 diperoleh capaian sebesar 96,64 dengan kategori **“Baik”**.



Grafik 24. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

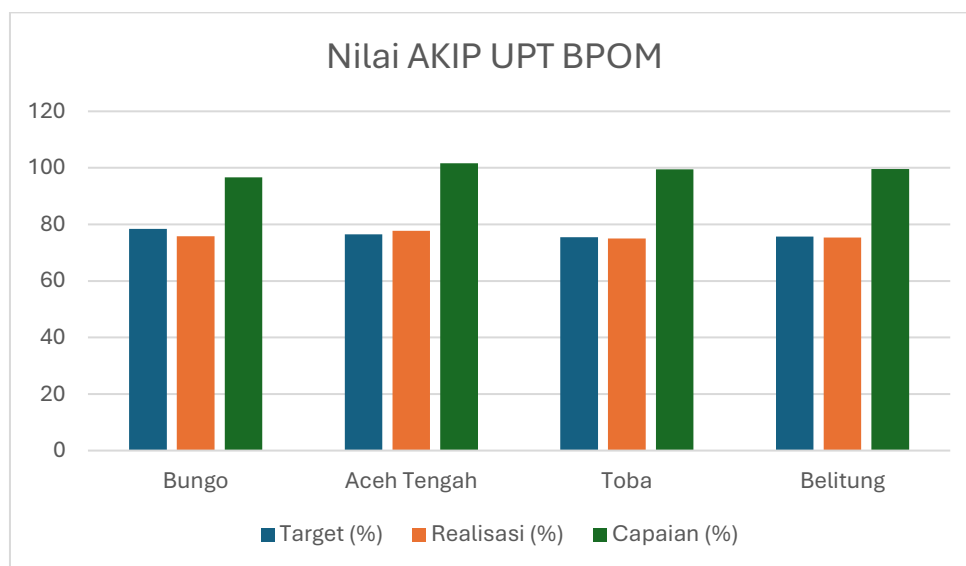
IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
22	Nilai AKIP UPT BPOM	80,39	75,76	94,24	Akan Tercapai 

Realisasi Nilai AKIP tahun 2025 memiliki capaian 92,24% terhadap target jangka menengah tahun 2027 dengan kategori “Akan Tercapai”. Kinerja ini belum mencapai target dan diharapkan dapat ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga target tahun 2027 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 97. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Nilai AKIP UPT BPOM	Bungo	78,39	75,76	96,64	Baik	●
	Aceh Tengah	76.5	77.7	101.57	Sangat Baik	●
	Toba	75.44	75	99.42	Baik	●
	Belitung	75.7	75.41	99.62	Baik	●



Grafik 25. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Berdasarkan grafik diatas, capaian tertinggi diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dengan nilai 101,57% kategori Sangat Baik. Sedangkan ketiga Loka POM lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Belitung, Loka POM di Kabupaten Toba, dan Loka POM di Kabupaten Bungo, capaian dibawah 100% dengan kategori Baik, yaitu masing-masing memiliki nilai 99,62 ; 99,42 dan 96,64.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Berdasarkan pada hasil evaluasi tahun 2025 nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Bungo dengan nilai 75,76 kategori “Baik”. Penyebab penurunan tersebut dikarenakan terdapat capaian kinerja output dan outcome yang belum maksimal, sehingga Loka POM di Kabupaten Bungo berkomitmen untuk melaksanakan dengan maksimal target yang akan dicapai pada setiap sasaran strategis dan indikator kinerja.

Loka POM di Kabupaten Bungo berkomitmen melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja TW, tahunan, dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan kesimpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta memanfaatkan hasil monev tersebut untuk perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Capaian kinerja ditingkatkan keandalannya yang dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang didapat dipercaya (kompeten) serta mampu telusur.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai AKIP UPT BPOM	Terdapat capaian kinerja output dan outcome yang belum maksimal	Melaksanakan dengan maksimal target yang akan dicapai pada setiap sasaran strategis dan indikator kinerja	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala	2026	Y	TU 11	Capaian kinerja pada komponen nilai AKIP tidak tercapai

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja nilai AKIP ditentukan oleh adanya perencanaan kinerja (bobotnya = 24), pengukuran kinerja (bobotnya = 24), pelaporan kinerja (bobotnya = 12), monitoring dan evaluasi kinerja (bobotnya = 20) yang baik serta adanya peningkatan pencapaian indikator kinerja dari tahun sebelumnya (bobotnya = 20).

Sebagai upaya untuk pencapaian target indikator Nilai AKIP pada periode penilaian pada periode berikutnya, langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain:

- 1) Penyusunan dokumen pendukung penyelenggaraan SAKIP yang lengkap dan terdokumentasi sehingga memudahkan penilaian kinerja dan verifikasi data

- 2) Komitmen pegawai di loka POM di Kabupaten Bungo dalam melaksanakan implementasi sakip sehingga laporan/data yang dikirimkan tepat waktu dan melaksanakan dengan maksimal target yang akan dicapai disetiap sasaran strategis dan indikator kerjanya
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala baik secara internal maupun lintas unit kerja
- 4) Membuat perencanaan pengembangan kompetensi personil Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan terkait implementasi SAKIP
- 5) Mereviu SOP Monitoring dan Evaluasi

IKU 23. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 indikator pembentuk IKPA antara lain:

- 1) Revisi DIPA (bobot 10%)
- 2) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
- 3) Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
- 4) Belanja Kontraktual (bobot 10%)
- 5) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
- 6) Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
- 7) Capaian Output (bobot 25%)
- 8) Dispensasi SPM (pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektivitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)

2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Perhitungan dari Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%). Kategori konversi Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut,

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d 100	Sangat Baik	5

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 98 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100,00	Baik



Sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan penyederhanaan interpretasi hasil evaluasi, terdapat perubahan dalam metode penilaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang sebelumnya hasil penilaian disajikan dalam bentuk angka berubah menjadi skala penilaian kualitatif.

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT pada Loka POM di Kabupaten bungo tahun 2025 adalah 92,50 dengan Konversi Nilai adalah 5 dari target sebesar 5 sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2025 sebesar 100% dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 99. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	2021	-	-	-	-

2022	90,6	90,52	99,91	Baik	
2023	91,8	89,65	97,66	Baik	
2024	92,47	91,94	99,43	Baik	
2025	5	5	100	Baik	

Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Bungo sejak tahun 2022. Pada tahun 2022 diperoleh capaian 99,91% dengan kategori **“Baik”**. Sedangkan pada tahun 2025 diperoleh capaian sebesar 100% dengan kategori **“Sangat Baik”**.

Pada tahun 2022 sampai dengan 2024 metode penilaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) disajikan dalam bentuk numerik absolut (angka). Namun, pada tahun 2025 terdapat perubahan metode penilaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi skala penilaian kualitatif.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100,00	Tercapai/ Melampaui 

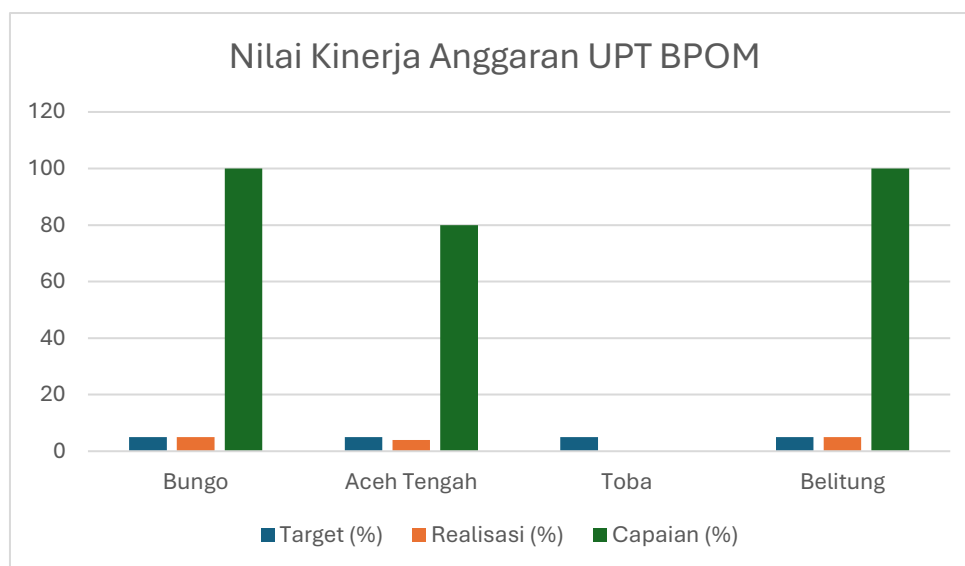
Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tahun 2025 memiliki capaian 100% terhadap target jangka menengah tahun 2027 dengan kategori tercapai. Kinerja ini sudah mencapai target namun tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga target tahun 2027 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 100. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
-------------------------	-----	--------	-------------	-----------	----------

Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Bungo	5	5	100	Baik	●
	Aceh Tengah	5	4	80.00	Cukup	●
	Toba	5	-	-	Baik	●
	Belitung	5	5	100	Baik	●



Grafik 26. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Berdasarkan grafik diatas, capaian tertinggi diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Bungo dan Loka POM di Kabupaten Belitung dengan nilai 100% kategori Baik. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah capaian di bawah 100% dengan kategori cukup. Untuk Loka POM di Kabupaten Toba belum terdapat realisasi dikarenakan Loka POM di Kabupaten Toba baru terbentuk di tahun 2025.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Berikut adalah langkah yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan secara akuntabel pada TW berikutnya:

- 1) Melakukan penyesuaian RPD berdasarkan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan SE dari Kementerian Keuangan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan

- 3) Melakukan koordinasi antar bidang/fungsi dalam perumusan rencana kegiatan
- 4) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis, bimtek, workshop, sosialisasi atau pelatihan sejenisnya.
- 5) Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pihak *stakeholder* terkait, yaitu KPPN Muaro Bungo dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Kinerja Anggaran	Adanya blokir anggaran dalam rangka efisiensi	Melakukan revisi terhadap anggaran yang diblokir	Melakukan efisiensi pemanfaatan anggaran efektif, menyusun perubahan strategi pelaksanaan kegiatan	2025	Y	TU 09	Adanya temuan BPK terkait pelaksanaan pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Meningkatkan kualitas perencanaan penyesuaian RPD maksimal tanggal 10 di awal TW berikutnya atau sesuai dengan Surat Edaran dari Kementerian Keuangan mengenai batas waktu yang ditetapkan dalam melaksanakan revisi Hal III DIPA, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, melakukan monitoring secara berkala, melakukan rapat evaluasi kegiatan setiap awal bulan serta melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pihak KPPN Muaro Bungo dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi selaku pihak stakeholder eksternal.

IKU 24. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 101 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55	2,625	102,94	Sangat Baik 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi, antara lain:

- a) *Risk Naïve* : Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
- b) *Risk Aware* : Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
- c) *Risk Defined* : Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
- d) *Risk Managed* : Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
- e) *Risk Enabled* : Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan

kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko. Serta menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko.

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17- 32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33- 48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49- 64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65- 80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Pada Tahun 2025 nilai maturitas manajemen risiko diperoleh sebesar 2,625 sehingga capaian indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM terhadap target adalah 102,94% dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 102. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2021	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	2,55	2,625	102,94	Sangat Baik 

Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa Indeks manajemen risiko Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Bungo baru. Pada tahun 2025 diperoleh nilai maturitas manajemen risiko diperoleh sebesar 2,625 sehingga capaian terhadap target Adalah 102,94% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan nilai maturitas penerapan manajemen risiko pada Loka POM di Kabupaten Bungo di Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 2,55 dan 2023 sebesar 1,906.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,65	2,625	99,06	Akan Tercapai 

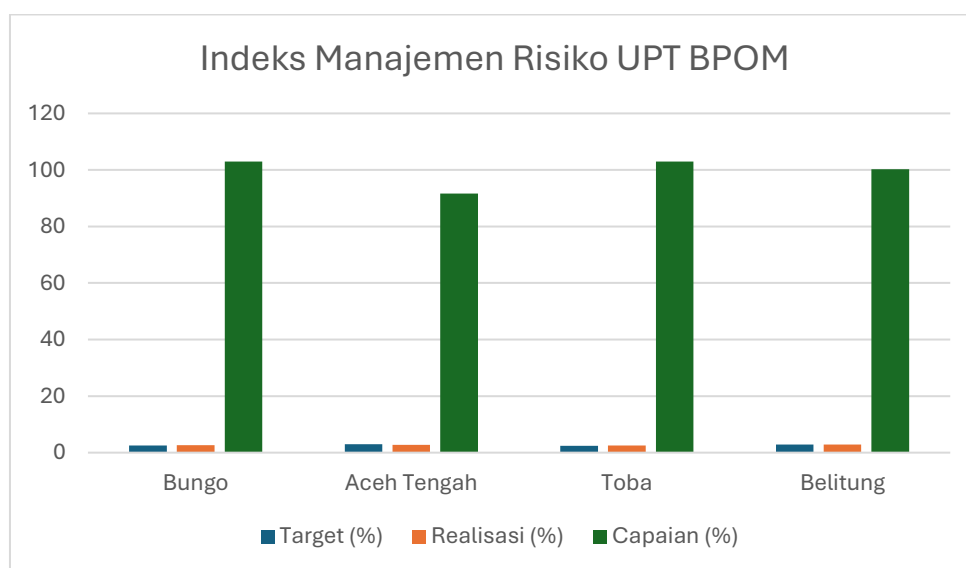
Realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM tahun 2025 adalah 2,625 sehingga memiliki capaian terhadap target jangka menengah tahun 2027 sebesar 99,06 dengan kategori capaian akan tercapai. Kinerja ini menunjukkan

bahwa hasil sudah baik dan menunjukkan tren positif tetapi harus ditingkatkan di tahun berikutnya sehingga target tahun 2027 dapat terpenuhi.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 103. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Bungo	2,55	2,625	102,94	Sangat Baik	●
	Aceh Tengah	3	2.75	91.67	Baik	●
	Toba	2.40	2.47	102.92	Sangat Baik	●
	Belitung	2.9	2.906	100.21	Sangat Baik	●



Grafik 27. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Berdasarkan grafik diatas, capaian tertinggi diperoleh oleh Loka POM di Kabupaten Bungo dengan nilai 102,94% kategori Sangat Baik. Sedangkan kedua Loka POM lainnya yaitu Loka POM di Kabupaten Belitung dan Loka POM di Kabupaten Toba menyusul dengan capaian di atas 100% dengan kategori Sngat Baik, yaitu masing-masing memiliki nilai 100,1 dan 102,92. Sedangkan Loka POM di Aceh Tengan dengan capaian di bawah 100% dengan kategori Cukup.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

- a. Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Badan POM Nomor PI.06.07.71.7.01.26.02 tentang Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo memperoleh kategori Risk Aware dengan nilai 2,625. Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 sebesar 2,500 dan Tahun 2023 sebesar 1,906.
- b. Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh semakin kuatnya komitmen pimpinan dan Tim Manajemen Risiko dalam menerapkan manajemen risiko secara konsisten, meningkatnya koordinasi internal, serta perbaikan kualitas dokumentasi dan pelaporan risiko. Selain itu, penyelarasan manajemen risiko dengan perencanaan dan indikator kinerja turut meningkatkan kualitas penerapan dan pengendalian risiko.
- c. Ke depan, upaya perbaikan diarahkan pada penguatan budaya sadar risiko di seluruh lini organisasi, peningkatan kapasitas SDM dalam analisis dan pengendalian risiko, serta integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis secara lebih sistematis agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari pengambilan keputusan strategis.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-	-	-	-	-	-	-	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan peningkatan Indeks Manajemen Risiko didukung oleh pelaksanaan beberapa program dan kegiatan, antara lain:

22. Penyusunan dan pemutakhiran dokumen manajemen risiko secara berkala;

23. Pelaksanaan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko pada level strategis dan operasional;
24. Monitoring dan reuiu berkala atas risiko serta tindak lanjut pengendalian;
25. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi Tim Manajemen Risiko dalam penyusunan laporan;
26. Penyempurnaan kualitas data dukung dan dasar perhitungan indikator agar lebih valid, andal, dan mampu telusur.

Program dan kegiatan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan tingkat maturitas manajemen risiko serta memperkuat keandalan capaian kinerja.

IKU 25. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 104 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Kategori Terhadap Target
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100,00	Baik



Capaian kinerja Tahun 2025 untuk Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup UPT menunjukkan bahwa target sebesar 100% telah berhasil direalisasikan sepenuhnya dengan capaian 100% dan kategori **Baik**. Hasil ini menandakan bahwa seluruh tahapan implementasi rencana aksi RB berjalan sesuai perencanaan, mencakup koordinasi internal, penyusunan dokumen aksi, pemantauan progres, serta pelaporan capaian secara berkala.

Keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen kuat seluruh unit kerja, konsistensi pelaksanaan, serta koordinasi efektif antara staf UPT dan pimpinan, sehingga program Reformasi Birokrasi dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan tepat waktu. Pelaksanaan kegiatan RB berjalan efektif, terarah, dan berkesinambungan, didukung oleh monitoring dan evaluasi rutin yang memastikan setiap deviasi segera diperbaiki, serta koordinasi lintas bidang yang

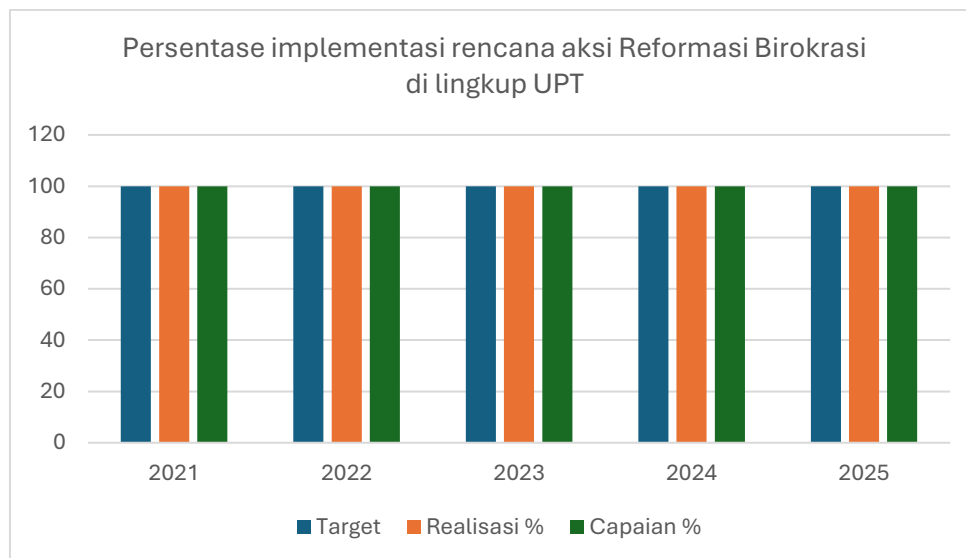
mempercepat penyelesaian target kegiatan. Pemanfaatan teknologi informasi turut meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan, sementara bimbingan teknis dan asistensi dari instansi pusat maupun tim RB daerah memperkuat implementasi di lapangan.

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa UPT telah berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi tidak hanya dari sisi kuantitatif, tetapi juga memperlihatkan peningkatan kualitas tata kelola organisasi, budaya kerja, dan mutu pelayanan. Hasil capaian 100% ini menegaskan bahwa seluruh rencana aksi RB telah dilaksanakan sesuai target tahunan, serta menandai kesiapan UPT dalam mendukung Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

b. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 105. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	2021	100	100	100,00	Baik	
	2022	100	100	100,00	Baik	
	2023	100	100	100,00	Baik	
	2024	100	100	100,00	Baik	
	2025	100	100	100,00	Baik	



Grafik 28. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Tabel di atas, realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup UPT selama lima tahun terakhir (2021–2025) menunjukkan pencapaian yang konsisten sebesar 100% dengan kategori Baik. Hasil ini menegaskan bahwa seluruh tahapan rencana aksi RB telah dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan setiap tahunnya.

Capaian yang stabil ini mencerminkan komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh staf UPT dalam menjalankan program Reformasi Birokrasi, termasuk pemenuhan dokumen aksi, koordinasi internal, pemantauan progres, dan pelaporan berkala. Konsistensi pelaksanaan program dari tahun ke tahun juga menunjukkan efektivitas sistem monitoring dan evaluasi, keberhasilan dalam menjaga disiplin pelaksanaan, serta adanya budaya kerja yang mendukung keberlanjutan Reformasi Birokrasi.

Dengan pencapaian yang stabil dan maksimal ini, UPT tidak hanya berhasil memenuhi target kuantitatif tahunan, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola organisasi, profesionalisme pegawai, serta integritas dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik secara berkesinambungan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

IKU	Indeks Kinerja Utama	Target Tahun 2027	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Kategori
25	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100,00	Tercapai/ Melampaui 

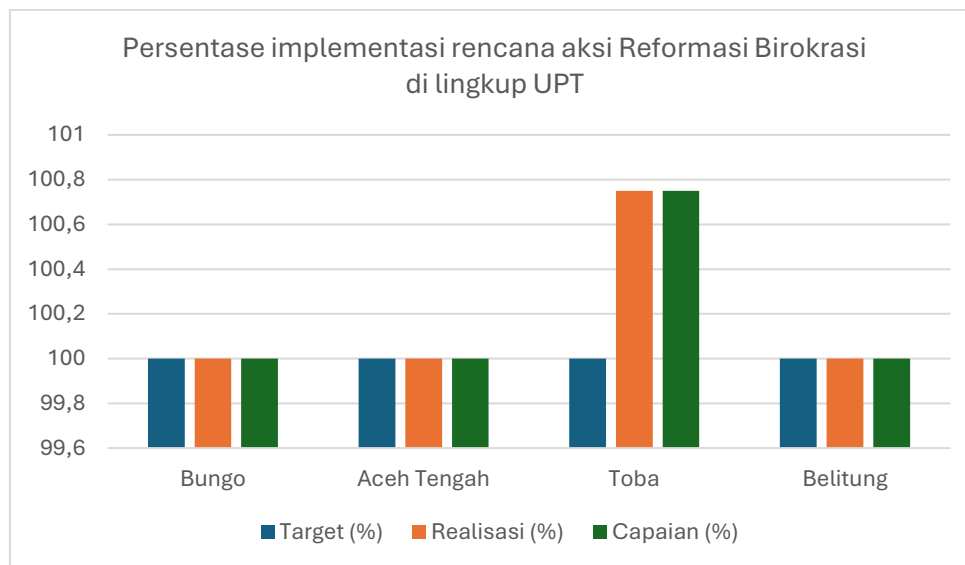
Realisasi kinerja Tahun 2025 untuk Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup UPT telah mencapai 100% dari target jangka menengah 2027, sehingga kategori capaian dinyatakan **Tercapai/Melampaui**. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh rencana aksi RB telah dilaksanakan secara menyeluruh dan tepat waktu, termasuk penyusunan dokumen aksi, pemantauan progres, koordinasi internal, serta pelaporan capaian.

Pencapaian yang melebihi target jangka menengah ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program, komitmen seluruh unit kerja, serta keberhasilan dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola organisasi yang baik. Dengan demikian, UPT telah siap mendukung implementasi Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan sebelum waktu target jangka menengah berakhir.

d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Tabel 106. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Indikator Kinerja Utama	UPT	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Bungo	100	100	100,00	Baik 
	Aceh Tengah	100	100	100,00	Baik 
	Toba	100.00	100.75	100.75	Sangat Baik 
	Belitung	100	100	100,00	Baik 



Grafik 29. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Cluster 3 Loka POM Pembanding

Berdasarkan Tabel 20 dan Grafik 23, realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup UPT Tahun 2025 pada Loka POM di Kabupaten Bungo mencapai 100% dari target, dengan **kategori Baik**. Apabila dibandingkan dengan UPT dalam Cluster 3, yaitu Aceh Tengah, Toba, dan Belitung, seluruh UPT juga menunjukkan capaian yang setara atau bahkan sedikit melebihi target, dengan Toba mencapai 100,75% dan kategori Sangat Baik.

Hasil ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Bungo berada pada tingkat capaian yang seimbang dengan UPT pembanding dalam satu cluster, menandakan konsistensi dan keseragaman pelaksanaan rencana aksi RB. Tidak terdapat kesenjangan signifikan antar satuan kerja pada indikator ini, yang mencerminkan bahwa implementasi program reformasi birokrasi secara umum berjalan sesuai target, efektif, dan berkesinambungan.

Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara unit kerja, komitmen pimpinan dan staf dalam melaksanakan seluruh tahapan aksi RB, serta pemanfaatan monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis dari pusat yang mendukung pencapaian target secara menyeluruh.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Analisa Penyebab Keberhasilan Program Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Tingginya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan setiap target yang telah ditetapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Manajemen Perubahan, sehingga mendukung keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT.
2. Perencanaan kegiatan yang terukur dan terstruktur, di mana seluruh kegiatan telah diintegrasikan ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masing-masing pegawai, sehingga memudahkan proses pelaksanaan, pemantauan, dan pengukuran capaian target Reformasi Birokrasi.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala yang efektif, antara lain melalui pemantauan terhadap Rencana Hasil Pemantauan Kinerja (RHPK), Rencana Aksi Pemantauan Kinerja (RAPK), dan Capaian Output UPT, yang berfungsi untuk mengidentifikasi hambatan serta mempercepat proses tindak lanjut perbaikan.
4. Koordinasi lintas bidang dan unit kerja yang berjalan optimal, yang berkontribusi dalam memperlancar pelaksanaan kegiatan, meningkatkan sinergi antarunit, serta memastikan keterpaduan dalam pencapaian indikator kinerja Reformasi Birokrasi.
5. Pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dalam mendukung proses pelaporan, dokumentasi, dan pemantauan capaian Reformasi Birokrasi, antara lain melalui platform digital (<https://bit.ly/rblokabungo2025new>) yang memudahkan akses data dan transparansi kinerja.
6. Dukungan pembinaan dan asistensi teknis dari unit pusat serta tim Reformasi Birokrasi daerah, yang turut memberikan arahan strategis dan pendampingan dalam implementasi kegiatan, sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT dapat berjalan lebih terarah dan konsisten.

Analisa Faktor Kendala / Penyebab Kegagalan Kinerja (agar dapat dihindari) :

- 1 Belum Optimalnya pemahaman terhadap penerapan konsep dan prinsip Reformasi Birokrasi (RB) di tingkat Loka POM, akibat belum adanya target yang terukur dan terstandar, sehingga pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya seragam dan terarah.
- 2 Belum meratanya pemahaman dan konsistensi pelaksanaan RB di seluruh pegawai, khususnya dalam penerapan nilai-nilai dasar dan indikator kinerja yang terkait dengan area perubahan.
- 3 Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga beberapa kegiatan pendukung Reformasi Birokrasi tidak dapat diselesaikan secara optimal dalam periode triwulan berjalan.
- 4 Proses dokumentasi dan pelaporan capaian Reformasi Birokrasi yang masih perlu disempurnakan, baik dari sisi ketepatan waktu maupun kelengkapan bukti pendukung, agar hasil capaian dapat terukur secara akurat.
- 5 Koordinasi antarbidang yang belum sepenuhnya optimal, terutama pada kegiatan lintas fungsi yang membutuhkan kolaborasi lebih intensif dan kesamaan persepsi antar pelaksana.

Keterbatasan fasilitas dan dukungan teknis, khususnya dalam pengelolaan sistem informasi pendukung pelaksanaan dan pelaporan Reformasi Birokrasi di tingkat Loka. Hal ini dikarenakan pelaporan RB Loka masih disesuaikan dengan target internal Loka masing-masing, sehingga belum sepenuhnya terintegrasi dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang ada dalam sistem pusat.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	Belum optimalnya pemahaman terhadap konsep dan prinsip RB, belum adanya target terukur yang seragam	Sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan terkait konsep, prinsip, dan target RB	Mengadakan workshop dan pembinaan internal untuk seluruh pegawai	Triwulan 1–2	T	-	
2	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	Pemahaman dan konsistensi pelaksanaan RB belum merata di seluruh pegawai	Pendampingan dan mentoring dari Pokja Manajemen Perubahan	Membentuk tim mentor internal untuk mendampingi pegawai	Triwulan 1–4	T	-	
3	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	Keterbatasan SDM dan waktu, sehingga beberapa kegiatan pendukung tidak optimal	Penjadwalan ulang dan redistribusi tugas, optimalisasi SDM	Menyusun jadwal kegiatan RB dan alokasi SDM sesuai kapasitas	Setiap triwulan	T	-	

4	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	Proses dokumentasi dan pelaporan capaian RB belum lengkap atau tepat waktu	Standarisasi prosedur dokumentasi dan pelaporan	Menyusun SOP dokumentasi RB dan pelatihan penggunaan platform digital	Triwulan 1–4	T	-
5	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	Koordinasi antarbidang belum optimal, terutama lintas fungsi	Memperkuat rapat koordinasi rutin dan mekanisme komunikasi internal	Menjadwalkan rapat koordinasi lintas bidang setiap bulan dan membuat notulen	Bulanan	T	-
6	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	Keterbatasan fasilitas dan dukungan teknis, khususnya IT	Peningkatan sarana/prasarana pendukung dan integrasi sistem	Meng-upgrade infrastruktur IT dan integrasi data RB ke sistem pusat	Semesteran	T	-

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berikut analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Reformasi Birokrasi (RB) di UPT Loka POM Kabupaten Bungo:

1. Pembentukan Tim Pokja Manajemen Perubahan

Tim ini bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi, membagi jobdesk, dan memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai rencana.

2. Integrasi Kegiatan RB ke Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Setiap pegawai memiliki target RB yang terukur di SKP masing-masing, sehingga pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi capaian menjadi lebih sistematis.

3. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Dilaksanakan melalui Rencana Hasil Pemantauan Kinerja (RHPK), Rencana Aksi Pemantauan Kinerja (RAPK), dan Capaian Output UPT untuk mendeteksi hambatan dan melakukan perbaikan tepat waktu.

4. Koordinasi Lintas Bidang dan Unit Kerja

Optimalisasi komunikasi dan sinergi antarunit kerja untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan RB dan pencapaian indikator kinerja.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan platform digital (misal: <https://bit.ly/rblokabungo2025new>) untuk dokumentasi, pelaporan, dan pemantauan capaian RB secara real-time dan transparan.

6. Pendampingan dan Asistensi Teknis dari Pusat dan Tim RB Daerah

Memberikan arahan strategis, mentoring, dan bimbingan teknis agar implementasi RB berjalan lebih terarah dan konsisten di lapangan.

7. **Pelatihan dan Capacity Building Pegawai**

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan meningkatkan kompetensi pegawai terkait RB, baik dari sisi manajemen perubahan, budaya kerja, maupun pengelolaan dokumen dan data.

8. **Standarisasi Prosedur Dokumentasi dan Pelaporan**

Penyusunan SOP dokumentasi, panduan teknis, dan alur pelaporan yang jelas untuk memastikan setiap bukti capaian RB lengkap dan tepat waktu.

9. **Penguatan Infrastruktur dan Sarana Pendukung**

Upgrade fasilitas IT dan akses sistem digital, agar pelaporan, evaluasi, dan koordinasi antarunit tidak terhambat.

10. **Reward dan Punishment Pegawai**

Sistem penghargaan dan konsekuensi diterapkan untuk memotivasi pegawai dalam konsistensi pelaksanaan program RB.

11. **Forum Konsultasi dan Sosialisasi**

Forum internal dan konsultasi publik digunakan untuk memperoleh masukan, meningkatkan kesadaran pegawai, serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan RB.

12. **Inovasi Proses dan Pendekatan Kerja**

Pengembangan metode baru dalam manajemen RB, termasuk pemanfaatan digitalisasi, workflow terintegrasi, dan mekanisme monitoring berbasis indikator kinerja.

13. **Pemantauan dan Evaluasi Berbasis Risiko**

Deteksi potensi kegagalan dan hambatan secara dini, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan sebelum berdampak pada capaian kinerja.

Analisis Kegagalan Pencapaian Kinerja RB

1. **Pemahaman Konsep dan Prinsip RB Belum Merata**

Beberapa pegawai belum sepenuhnya memahami nilai dasar, area perubahan, dan indikator kinerja RB sehingga pelaksanaan tidak selalu seragam.

2. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

SDM yang ada harus menangani tugas rutin selain RB, sehingga beberapa kegiatan pendukung tidak dapat dilakukan secara optimal.

3. Beban Waktu Pelaksanaan yang Padat

Beberapa kegiatan RB terkendala waktu, terutama bagi pegawai multitugas, sehingga penyelesaian target tahunan bisa terhambat.

4. Dokumentasi dan Pelaporan Tidak Lengkap

Beberapa bukti pendukung capaian belum tersusun rapi atau belum terunggah tepat waktu, berpotensi menurunkan nilai evaluasi meskipun kegiatan telah dilaksanakan.

5. Koordinasi Antarunit Belum Optimal

Pada kegiatan lintas fungsi, komunikasi dan sinkronisasi antarbidang belum sepenuhnya efektif, sehingga menghambat alur pelaksanaan kegiatan.

6. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi

Sistem digital (platform monitoring RB) belum ada untuk unit Loka POM di Kabupaten Bungo

7. Standarisasi dan Konsistensi Pelaksanaan Masih Perlu Ditingkatkan

Beberapa kegiatan dilakukan secara berbeda antarunit kerja karena belum ada panduan atau SOP yang diterapkan secara menyeluruh.

8. Kurangnya Pemantauan Berbasis Risiko

Mekanisme deteksi dini terhadap potensi kegagalan belum maksimal, sehingga beberapa hambatan baru diketahui saat evaluasi rutin.

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

No	Indikator	Kendala/Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Terdapat sampel yang tidak dapat disampling yang disebabkan karena tidak tersedianya kategori sampel yang ditargetkan	Melakukan pengajuan revisi proporsi ke unit pusat sampel yang sesuai dengan tersedia di wilayah unit kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Telah dilaksanakan pengajuan revisi proporsi sampel sediaan farmasi ke unit pusat dengan bersurat melalui SRIKANDI	Selesai	Target sampel telah dilakukan penyesuaian sesuai rekomendasi dari pusat atas surat yang telah dikirimkan Loka POM di Kabupaten Bungo		T	-	-
2	IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Belum dilakukan penyesuaian jadwal pengujian sampel regional	Melaksanakan sampling sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2025 (note: pengujian dilaksanakan di BPOM di Jambi dan pengujian Regional yang di koordinir oleh BBPOM Pekanbaru	Sampel disampling sesuai dengan perencanaan sampling yang sudah sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2024, serta menyesuaikan jadwal pengujian untuk sampel regional	Selesai	Jadwal pengujian sampel regional sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan		T	-	-

3	IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Kurangnya koordinasi dengan BPOM Regionalisasi	Meningkatkan koordinasi dengan BPOM Regionalisasi	Aktif berkomunikasi dengan Balai bersangkutan mengenai kemampuan uji serta ketersediaan reagen untuk pengujian jika terjadi perubahan	Selesai	Koordinasi yang berkesinambungan antar sesama regional	T	-	-
4	IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Pelaporan monitoring belum dilakukan secara rutin	Melakukan monitoring surat tindak lanjut yang dikirimkan pusat secara intensif di sarana sediaan farmasi yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Melakukan rekapitulasi surat tindak lanjut	Selesai	Monitoring telah dilaksanakan sesuai rekapitulasi surat tindak lanjut	T	-	-
5	IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	tidak dilakukan sampling pada bulan februari dan maret dikarenakan adanya efisiensi. total target pangan olahan dan pirt seluruhnya diusulkan menjadi 5 sampel (10% dari target awal). target Pangan Olahan 4 sampel.	mengusulkan penurunan target sampel menjadi 10%	Pengajuan TOR dan KAK untuk efisiensi anggaran dan pengajuan penurunan target output	Selesai	Telah diusulkan penurunan target sesuai anggaran efisiensi. Namun, anggaran sudah pulih pagu dan jumlah sampel telah disesuaikan kembali	T	-	-

6	IKU 2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum dilakukan penyesuaian jadwal pengujian sampel regional	Melaksanakansampling sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2025	Sampel disampling sesuai dengan perencanaan sampling yang sudah sesuai dengan (note: pengujian dilaksanakan di BPOM di Jambi dan pengujian Regional yang di koordinir oleh BBPOM Pekanbaru	Selesai	Jadwal pengujian sampel regional sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan	T	-	-
7	IKU 2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kurangnya koordinasi dengan BPOM Regionalisasi	Meningkatkan koordinasi dengan BPOM Regionalisasi	Aktif berkomunikasi dengan Balai bersangkutan mengenai kemampuan uji serta ketersediaan reagen untuk pengujian jika terjadi perubahan terhadap perencanaan sampling	Selesai	Koordinasi yang berkesinambungan antar sesama regional	T	-	-
8	IKU 2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaporan belum dilakukan secara rutin	Melaporkan produk TMS pengujian dan label ke Badan POM pusat	Telah melaporkan produk TMS pengujian dan label ke Badan POM pusat secara rutin	Selesai	Pelaporan sesuai timeline dan rutin	T	-	-

9	IKU 4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	tidak dilakukan sampling pada bulan februari dan maret dikarenakan adanya efisiensi. total target pangan olahan dan pirt seluruhnya diusulkan menjadi 5 sampel (10% dari target awal). target PIRT 1 sampel.	mengusulkan penurunan target sampel menjadi 10%	Pengajuan TOR dan KAK untuk efisiensi anggaran dan pengajuan penurunan target output	Selesai	Telah diusulkan penurunan target sesuai anggaran efisiensi. Namun, anggaran sudah pulih pagu dan jumlah sampel telah disesuaikan kembali	T	-	-	
10	IKU 5. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	Masih sedikit pelaku usaha yang mengirimkan laporan perbaikan terhadap surat tindak lanjut yang diberikan, terutama untuk sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian	Melakukan monitoring dan evaluasi CAPA sesuai dengan timeline yang diberikan.	Membuat laporan monitoring dan evaluasi CAPA dari pelaku usaha untuk TW I	Selesai	- Terdapat 57 rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dari total 89 rekomendasi yang diberikan. Realisasi IKU pada TW IV yaitu 75,77% sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 72%	Sudah dievaluasi diakhir TW IV	Y	PEM 03	Rendahny a feedback tindaklanj t hasil pemeriksa an sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dari pemangku kepenting an
11	IKU 5. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	Feedback dari lintas sektor seperti Dinas Kesehatan terkait hasil pengawasan yang diberikan belum optimal	Koordinasi dengan dinas kesehatan setempat	Membuat sharing folder yang berisi rekapan surat tindak lanjut hasil pengawasan	selesai	Terdapat 21 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh lintas sektor dari total 24 rekomendasi yang diberikan. Realisasi IKU pada TW IV yaitu 75,77% sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 72%	Sudah dievaluasi diakhir TW IV	Y	PEM 03	Rendahny a feedback tindaklanj t hasil pemeriksa an sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dari pemangku kepenting an

12	IKU 6. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan menggunakan data monev menggunakan bit.ly	Penarikan data melalui SIPT dengan	Sinkronisasi penggunaan data SIPT untuk melakukan monev telah dilaksanakan menyesuaikan pengisian monev di bit.ly		Monev dilakukan telah sesuai Realisasi IKU pada TW III yaitu 95,83%, sudah mencapai target yang ditetapkan	Sudah dilaksanakan	T	-	-
13	IKU 7. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Masih terdapat laporan SIPT yang diinput tidak lengkap (tidak dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Tindak Lanjut) akibatnya pelaporan SIPT melewati timeline	Supervisor independent melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan laporan pada setiap laporan yang masuk	Melakukan monitoring dan evaluasi	selesai	Realisasi sudah melewati target yaitu 90,76% dari target 86,75%	Sudah dievaluasi diakhir TW IV	Y	PEM 04	Perbedaan penilaian petugas dalam penentuan kategori temuan dan tindak lanjut sarana
14	IKU 8. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Masih banyak ditemukan sarana distribusi pangan olahan terutama sarana ritel tradisional (grosir, warung, toko, dll) dan distributor pangan yang belum menerapkan Cara Ritel Pangan Olahan yang Baik serta masih banyak ditemukan pangan TMS terutama pangan rusak dan kadaluarsa.	Kegiatan intensifikasi pengawasan pangan dengan melibatkan lintas sektor, seperti intensifikasi Ramadhan dan menjelang Idul Fitri dan intensifikasi menjelang Natal dan Tahun Baru	Kegiatan Intensifikasi Pangan Ramadhan dan Menjelang Idul Fitri 1446 H sudah dilaksanakan di Bulan Maret 2025	Selesai	Realisasi sudah melewati target yaitu 96,60% dari target 90%	Sudah dilaksanakan	Y	Pem 05	Pelaku Usaha memberikan gratifikasi kepada petugas

15	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Tidak ada kejadian KLB Keracunan Pangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Melakukan koordinasi secara langsung dengan pembentukan tim Penanganan KLB	Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Selesai	-	Sudah dilaksanakan	Y	PEM 13	Pengambilan Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar
16	IKU 9. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Belum melakukan penyesuaian jadwal pengawasan iklan	Membuat jadwal pelaksanaan pengawasan iklan sesuai target yang telah ditentukan	Pengawasan iklan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ditentukan	Selesai	-	Sudah dilaksanakan	Y	PEM 11	Ketidaksuaian pemilihan kategori pengawasan iklan
17	IKU 9. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pelaksanaan belum sesuai pedoman/juknis	Melaksanakan pengawasan iklan sesuai pedoman/ juknis yang telah disediakan pada <i>database</i> iklan	Pengawasan iklan sesuai dengan pedoman/juknis yang telah disediakan pada <i>database</i> iklan	Selesai	-	Sudah dilaksanakan	Y	PEM 11	Ketidaksuaian pemilihan kategori pengawasan iklan
18	IKU 10. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Pelaporan Label Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang belum dilakukan tepat waktu	Melaksanakan pengawasan label tembakau dengan tepat waktu dengan memberikan <i>reminder</i> petugas agar tidak lewat <i>timeline</i>	Telah dilakukan <i>reminder</i> kepada petugas agar melaksanakan pelaporan spt penandaan label tembakau dengan tepat waktu		Pengawasan label tembakau dan/atau rokok elektronik telah dilaporkan tepat waktu	Sudah dievaluasi diakhir TW IV	T		
19	IKU 12. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Ketidaksesuaian rencana zat aktif yang dilakukan pemenuhan ruang lingkup	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan	Monitoring dan evaluasi berkelanjutan rencana kegiatan pelaksanaan	Selesai	-	Sudah dilaksanakan	Y	Pengujian 5	Ketidakmampuan pemenuhan komponen SRL Obat yang telah ditetapkan

20	IKU 14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Belum terlaksananya perencanaan KIE Tatap Muka dan Media Sosial (TW I-IV)	Dilaksanakannya semua perencanaan yang sudah dibuatkan dan dimonitoring setiap ada kendala dan hambatan	Melaksanakan KIE Pameran dalam rangka HUT Kab.Bungo dan Pelantikan SAKA Kab.Kerinci dan Media social TW II-IV		Terselenggaranya semua perencanaan KIE Tatap Muka dan Media tahun 2025 serta adanya monitoring dan evaluasi berkala.	Sudah terlaksana	Y	Infokom 06	Kegiatan tidak berjalan sesuai target dan timeline
21	IKU 15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Efisiensi anggaran pada program ini, pada awal tahun hanya diberikan anggaran kurang lebih 1 juta, sehingga tidak mungkin untuk dijalankan dengan optimal mengingat kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak masyarakat dan lintas sektor. Selain itu, keterbatasan teknologi dan sinyal untuk sekolah yang berada di kabupaten juga menjadi kendala yang sangat besar untuk program ini dijalankan secara daring	- Pelaksanaan kegiatan secara daring dengan risiko efektifitas kegiatan yang belum optimal - Pengajuan penambahan anggaran	1. Pelaksanaan kegiatan secara daring dengan risiko efektifitas kegiatan yang belum optimal 2. Pengajuan pembukaan blokir 3. Pelaksanaan akan dilakukan pada gedung Tidak melakukan pengadaan barang konsumsi		Penambahan anggaran total 3 kegiatan Desa, Pasar dan Sekolah yang di intervensi Keamanan Pangan kurang lebih sekitar 90 juta	Sudah Terlaksana	Y	Infokom 07	Tidak dapat melaksanakan kegiatan Lapak POM Saoajat diseluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo
22	IKU 15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Penundaan jadwal kegiatan dikarenakan adanya PSU Kepala Daerah	Pelaksanaan kegiatan segera setelah Penetapan Kepala Daerah pada bulan Mei 2025	Koordinasi / Rapat awal pembahasan kegiatan dengan perangkat daerah	selesai	Pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan dengan arahan dari sekda Pemda Kabupaten Bungo	Sudah dilaksanakan	T	-	

23	IKU 16. Jumlah Desa Pangan Aman	Efisiensi anggaran pada program ini, pada awal tahun hanya diberikan anggaran kurang lebih 6 juta, sehingga tidak mungkin untuk dijalankan dengan optimal mengingat kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak masyarakat dan lintas sektor. Selain itu, keterbatasan teknologi dan sinyal untuk Desa yang berada di kabupaten juga menjadi kendala yang sangat besar untuk program ini dijalankan secara daring	- Pelaksanaan kegiatan secara daring dengan risiko efektifitas kegiatan yang belum optimal - Pengajuan penambahan anggaran	Penambahan anggaran untuk optimailsasi anggaran	Selesai	-Pelaksanaan akan dilakukan pada gedung UPTD Pasar terdekat yang tidak membutuhkan biaya transport - Tidak melakukan pengadaan barang konsumsi	Sudah dilaksanakan	T	-
24	IKU 16. Jumlah Desa Pangan Aman	Penundaan jadwal kegiatan dikarenakan adanya PSU Kepala Daerah	Pelaksanaan kegiatan segera setelah Penetapan Kepala Daerah pada bulan Mei 2025	Koordinasi / Rapat awal pembahasan kegiatan dengan perangkat daerah	Selesai	Pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan dengan arahan dari sekda Pemda Kabupaten Bungo	Sudah dilaksanakan	T	-

25	IKU 17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Efisiensi anggaran pada program ini, pada awal tahun hanya diberikan anggaran kurang lebih 3 juta, sehingga tidak mungkin untuk dijalankan dengan optimal mengingat kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak masyarakat dan lintas sektor. Selain itu, keterbatasan teknologi dan sinyal untuk Pasar yang berada di kabupaten juga menjadi kendala yang sangat besar untuk program ini dijalankan secara daring	- Pelaksanaan kegiatan secara daring dengan risiko efektifitas kegiatan yang belum optimal - Pengajuan penambahan anggaran	Penambahan anggaran untuk optimailsasi anggaran	Selesai	-Pelaksanaan akan dilakukan pada gedung UPTD Pasar terdekat yang tidak membutuhkan biaya transport - Tidak melakukan pengadaan barang konsumsi	Sudah dilaksanakan	T	-	
26	IKU 17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Efisiensi anggaran pada program ini, pada awal tahun hanya diberikan anggaran kurang lebih 3 juta, sehingga tidak mungkin untuk dijalankan dengan optimal mengingat kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak masyarakat dan lintas sektor. Selain itu, keterbatasan teknologi dan sinyal untuk Pasar yang berada di kabupaten juga menjadi kendala yang sangat	- Pelaksanaan kegiatan secara daring dengan risiko efektifitas kegiatan yang belum optimal - Pengajuan penambahan anggaran	Koordinasi / Rapat awal pembahasan kegiatan dengan perangkat daerah	Selesai	Pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan dengan arahan dari sekda Pemda Kabupaten Bungo	Sudah dilaksanakan	T	-	-

besar untuk program ini
dijalankan
secara daring

27	IKU 18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik	Blokir anggran yang telah dibuka tidak pada indikator ini, sehingga tetap masih ada efisiensi anggaran sebesar 87,94% pada indikator kegiatan ini, kegiatan 80% dialihkan secara daring, sedangkan	Mengusulkan penambahan anggaran / pembukaan blokir untuk indikator ini	Maksimal kegiatan secara daring dan pendampingan UMKM secara daring, serta memanfaatkan layanan MPP di Kabupaten Bungo	- Memaksimalkan kegiatan dengan pendampingan melalui daring (Online) dan keluarga 1 IP CPPOB pada TW IV	Sudah dilaksanakan	Y	Infokom 08	Terbatasan ya jangkauan UMKM yang divisitasi pada program DJANGKI OM
28	IKU 19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Anggaran SBK penindakan diblokir	Pengajuan penambahan anggaran	Penyusunan TOR dan KAK pembukaan blokir RO QCD	Anggaran SBK QCD sudah dibuka secara keseluruhan	Sudah dilaksanakan	T		

29	IKU 19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Terbit SPDP tanggal 14 Maret 2025	Penyerahan SPDP kepada Terlapor/Tersangka, Korwas PPNS dan Kejaksaan Negeri secepatnya	Penyampaian SPDP kepada pihak terkait sebelum timeline habis	SPDP disampaikan sesuai dengan timeline	20 Maret 2025	T
30	IKU 19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Telah koordinasi aktif dengan CJS tetapi belum maksimal ekspos melalui media	Melakukan ekspos melalui media atau konferensi pers terhadap kasus yang ditangani	Melakukan Konferensi Pers terkait kasus Obat-Obat Tertentu di Wilayah Kabupaten Merangin bertempat di Polres	Konferensi Pers kasus yang ditangani sudah dilaksanakan	Triwulan I Tahun 2025	T
31	IKU 19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Penanganan perkara oleh Loka POM di Kabupaten Bungo yang menjadi target output	Melakukan penyelesaian berkas perkara sesuai tahapan dengan cermat dan tepat	Terbit SPDP	Terbit SPDP	Triwulan II	T

32	IKU 19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Peningkatan kompetensi staff penindakan terkait operasi penindakan dan penanganan berkas perkara	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring jika anggaran memungkinkan	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring jika anggaran memungkinkan	Hingga akhir Tahun 2025	Y	DAK 1	Keterbatasan kemampuan petugas Loka POM di Bungo dalam melakukan penyidikan mandiri	
33	IKU 20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Peningkatan kompetensi staff penindakan terkait Deteksi Kejahatan Di Bidang Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring jika anggaran memungkinkan	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring jika anggaran memungkinkan	Hingga akhir Tahun 2025	Y	DAK 1	Keterbatasan kemampuan petugas Loka POM di Bungo dalam melakukan penyidikan mandiri	
34	IKU 20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Adanya penggalangan komitmen terkait Deteksi Kejahatan Di Bidang Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Mengadakan kegiatan penggalangan terkait Deteksi Kejahatan Di Bidang Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Menjalin Komunikasi dengan CJS terkait rencana pelaksanaan Penggalangan	Mengadakan kegiatan penggalangan terkait Deteksi Kejahatan Di Bidang Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Triwulan III Tahun 2025	T			
35	IKU 21. Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun	Belum dilaksanakan penilaian IPP sesuai dengan arahan pusat	Pemenuhan bertahap data dukung IPP berdasarkan penilaian tahun sebelumnya	-Membentuk TIM Penilaian IPP periode tahun 2025	Selesai	Telah dibentuk TIM Penilaian IPP dan telah dilaksanakan penilaian IPP dengan nilai yang optimal	Triwulan III	T	-	-

36	IKU 22. Nilai AKIP UPT BPOM	Renstra tahun 2020-2024 belum menjelaskan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan diukur dengan pencapaian indikator	Memastikan Renstra telah menyajikan penjelasan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan diukur dengan pencapaian sasaran (belum didukung Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan dan Strategi);	Sudah mencantumkan matriks pemetaan misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, kebijakan dan startegi pada indikator sasaran dan didukung dengan Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan dan Strategi; renstra Loka POM Kabupaten Bungo 2025-2029	selesai	Revisi Ke-3 Renstra 2025-2029	Desember 2025	Y	TU 11	Capaian kinerja pada komponen nilai AKIP tidak tercapai
37	IKU 22. Nilai AKIP UPT BPOM	Matriks reviu target tahun 2024 belum diformalkan dan belum mencantumkan justifikasi yang memadai untuk target yang lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya	Melakukan penyusunan review target indikator dilengkapi dengan jsutifikasi yang memadai terkait target lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan diformalkan oleh Kepala Loka	Melakukan penyusunan review target indikator dilengkapi dengan jsutifikasi yang memadai terkait target lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan diformalkan oleh Kepala Loka	selesai	Matriks review target tahun 2024 telah diformalkan dan telah menyajikan justifikasi yang memadai	Triwulan II 2025	Y	TU 11	Capaian kinerja pada komponen nilai AKIP tidak tercapai
38	IKU 22. Nilai AKIP UPT BPOM	Perbedaan penyajian target triwulan II tahun 2024 pada SIMETRIS, SKP Pimpinan, RAPK, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan	Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	selesai	Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja INterim	Desember 2025	Y	TU 11	Capaian kinerja pada komponen nilai AKIP tidak tercapai

Kinerja
Interim

39	IKU 22. Nilai AKIP UPT BPOM	RKT Tahun 2024 belum dipublikasikan pada subsite Satuan Kerja	Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan SAKIP pada subsite Satuan Kerja	Melakukan publikasi seluruh dokumen perencanaan SAKIP pada subsite bungo.pom.go.id	Selesai	seluruh dokumen perencanaan SAKIP telah diipublikasikan pada subsite bungo.pom.go.id	April 2025	Y	TU 11	Capaian kinerja pada komponen nilai AKIP tidak tercapai
40	IKU 22. Nilai AKIP UPT BPOM	Penyusunan SOP Mikro Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran	Menyempurnakan SOP Mikro Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran	Melakukan revisi untuk menyempurnakan SOP Mikro Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran terkait data kinerja	Selesai	SOP POM-12.01/CFM.02/SOP.01/IK.8B.01	5 Mei 2025	Y	TU 11	Capaian kinerja pada komponen nilai AKIP tidak tercapai
41	IKU 22. Nilai AKIP UPT BPOM	Notulen rapat evaluasi internal pada Laporan Evaluasi Internal Triwulan I s.d III Tahun 2024 belum menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja	Menyusun notulen rapat evaluasi internal dengan menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja;	Memperbaiki notulensi rapat evaluasi internal dengan menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja	Selesai	Laporan Evaluasi Internal	Triwulan IV	Y	TU 11	Capaian kinerja pada komponen nilai AKIP tidak tercapai

42	IKU 22. Nilai AKIP UPT BPOM	Perbedaan penyajian realisasi pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan,	Memastikan keselarasan penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada aplikasi SIMETRIS,	Membuat satu data internal pelaporan sebagai sumber data dalam pelaporan simetris, SKP, laporan evaluasi internal		Link RAPK Internal	April 2025	Y	TU 11	Capaian kinerja pada komponen nilai AKIP tidak tercapai
43	IKU 22. Nilai AKIP UPT BPOM	SK Program Peningkatan Kinerja, Penerapan Budaya Pelayanan Prima dan Perilaku Hidup Sehat di Lingkungan Loka POM sebagai dasar pemberian reward belum memuat kriteria/parameter penilaian dan pembobotan	Menyempurnakan SK Program Peningkatan Kinerja, Penerapan Budaya Pelayanan Prima dan Perilaku Hidup Sehat di Lingkungan Loka POM dengan memuat kriteria/parameter penilaian dan pembobotan pemberian penghargaan/reward	Membuat pembaruan SK dengan melengkapi kriteria dan parameter penilaian pembobotan pemberian penghargaan/reward	selesai	Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo Nomor HK.02.02.5C.09.25.49 tentang Mekanisme Pemberian Reward dan Punishment kepada Pegawai di Lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo	September 2025	T	-	-
44	IKU 22. Nilai AKIP UPT BPOM	Kendala dan Rencana Tindak Lanjut pada aplikasi SIMETRIS tidak diisi secara tertib	Melakukan pengisian Kendala dan Rencana Tindak Lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	Telah melakukan pengisian Kendala dan Rencana Tindak Lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	selesai	Link RAPK Internal	Desember 2025	Y	TU 11	Capaian kinerja pada komponen nilai AKIP tidak tercapai
45	IKU 22. Nilai AKIP UPT BPOM	Laporan Kinerja Interim triwulan I s.d III tahun 2024 (Bab II Perencanaan Kinerja) belum menyajikan informasi terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2024	Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan terkait dengan penambahan indikator	telah menyusun laporan kinerja tahun 2024 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja selama tahun 2024	selesai	Laporan Kinerja interim	Desember 2025	Y	TU 11	Capaian kinerja pada komponen nilai AKIP tidak tercapai

46	IKU 22. Nilai AKIP UPT BPOM	Laporan Kinerja Interim triwulan I s.d III tahun 2024 (Bab II Perencanaan Kinerja) belum menyajikan informasi terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2024	Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan terkait dengan penambahan indikator	elah menyusun laporan kinerja tahun 2024 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja selama tahun 2024	selesai	Laporan Kinerja interim	Desember 2025	Y	TU 11	Capaian kinerja pada komponen nilai AKIP tidak tercapai
47	IKU 22. Nilai AKIP UPT BPOM	Beberapa personil Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan belum mengikuti pelatihan terkait implementasi SAKIP	Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan terkait implementasi SAKIP	Membuat perencanaan dan melakukan monitoring pengembangan kompetensi personil Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan terkait implementasi SAKIP	selesai	Laporan Monitoring Pengembangan Kompetensi Tim SAKIP	Triwulan II 2025	T	-	-
48	IKU 23. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Adanya blokir anggaran dalam rangka efisiensi	Melakukan revisi terhadap anggaran yang diblokir	Melakukan efisiensi pemanfaatan anggaran efektif, menyusun perubahan strategi pelaksanaan kegiatan	selesai	Revisi POK Terakhir	Desember 2025	T		

49	IKU 25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Nilai Indeks Manajemen Risiko Tahun 2024 adalah 2,5	Melakukan identifikasi risiko secara komprehensif dengan mempertimbangkan capaian target kinerja tahun sebelumnya serta mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal dan Mengidentifikasi risiko atas seluruh program/inovasi baru yang dilaksanakan Unit Kerja dan melaporkan Manajemen Risiko tepat waktu	Pelaporan manajemen risiko tepat waktu di aplikasi SAPA APIP	selesai	Desember 2025	T	-	-
50	IKU 24. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Nilai Indeks Manajemen Risiko Tahun 2024 adalah 2,5	Menyusun uraian tugas pada SKP dan MPH untuk seluruh pegawai yang menangani manajemen risiko	Penetapan SKP masing- masing pegawai yang terlibat dengan menambahkan RHK Manajemen Risiko	selesai	Desember 2025	T	-	-
51	IKU 25. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Telah dilaksanakan Pembuatan Rencana Aksi RB, tetapi karena penetapan awal tahun terdapat pembulatan angka sehingga hasil target capaian cukup besar	Belum dilaksanakan penetapan target RB Tahun 2025	Pembentukan Tim RB dan Target Kegiatan RB Tahun 2025	1. Membentuk SK Tim RB 2. Menetapkan Target Rencana Aksi Pada Tahun 2025 3. Membagi Target dalam SKP masingmasing pegawai	Triwulan IV 2025	T	-	-

52	IKU 22. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Telah dilaksanakan Pembuatan Rencana Aksi RB, tetapi karena penetapan awal tahun terdapat pembulatan angka sehingga hasil target capaian cukup besar	Belum dilaksanakan penetapan target RB Tahun 2025	Pembentukan Tim RB dan Target Kegiatan RB Tahun 2025	Monitoring dan Evaluasi pencapaian program setiap masing-masing POKJA dengan Pimpinan Unit Kerja 2. Membuat link untuk pengumpulan data setiap POKJA 3. Melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan reformasi birokrasi	Triwulan IV 2025	T	-	-
----	---	--	---	--	---	------------------	---	---	---

3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Laporan kinerja yang disusun secara periodik merupakan hasil analisis terhadap monitoring dan evaluasi, baik terkait kinerja dan pemanfaatan sumber daya. Hasil analisis yang disajikan dapat menjadi basis data untuk penentuan strategi dalam mengatasi kendala maupun meningkatkan kinerja dan sebagai dasar penyusunan perencanaan di periode berikutnya.

1. Dengan laporan kinerja ini dapat diketahui target kinerja yang sudah ditetapkan diawal tahun berupa Perjanjian Kinerja dapat tercapai/melampaui target, akan tercapai target yang ditetapkan atau perlu upaya keras untuk mencapai target. Untuk Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo telah menyelesaikan 7 sasaran strategis dengan nilai kinerja organisasi mencapai 94,13% dengan kategori Baik.
2. Pada laporan kinerja ini terdapat rekomendasi perbaikan sistem, usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya.
3. Laporan kinerja ini dapat memberikan kemanfaatan baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja, sedangkan penerima manfaat eksternal dalam hal ini adalah Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.
4. Dalam laporan kinerja ini juga tergambarkan capaian kinerja berupa Nilai Kinerja Anggaran yang menentukan capaian Loka POM di Kabupaten Bungo secara keseluruhan, sehingga strategi pencapaiannya harus berdasarkan data yang akurat.
5. Laporan kinerja yang disusun secara periodik merupakan hasil analisis terhadap monitoring dan evaluasi, baik terkait kinerja dan pemanfaatan sumber daya. Hasil

analisis yang disajikan dapat menjadi basis data untuk penentuan strategi dalam mengatasi kendala maupun meningkatkan kinerja di periode berikutnya.

6. Dengan adanya laporan kinerja ini terdapat rekomendasi usulan program kegiatan, dalam rangka perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo serta sebagai dasar perencanaan kinerja pada periode berikutnya.

3.4 REALISASI ANGGARAN

A. Realisasi Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2025 No. 063.01.2.690923/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan Pagu Awal sebesar Rp. 3.572.436.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pada Triwulan I dilaksanakan revisi DIPA sebanyak 3 (tiga) kali dengan dilakukan revisi DJA yang pertama pada tanggal 14 Februari 2025 melakukan pemblokiran secara mandiri dengan mencantumkan kode blokir "A" (Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya) pada Aplikasi SAKTI sebesar Rp. 1.644.940.000,-, selanjutnya revisi DJA yang kedua Realokasi Penambahan Anggaran dari satker lain untuk PPNPN pada tanggal 12 Maret 2025 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta rupiah) sehingga pagu Loka POM Bungo menjadi Rp. 3.602.436.000 (Tiga Miliar Enam Ratus Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan pada tanggal 26 Maret 2025 melakukan revisi DIPA DJA Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 dapat Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 sebesar Rp. 425.038.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 30 juni 2025 pengajuan Revisi DIPA DJA perihal Usulan Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025 sebesar 137.277.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo sampai dengan triwulan III tahun 2025 mencapai Rp 2,128,880,073 (dua milyar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh puluh tiga rupiah) atau mencapai **74.97 %** dari total pagu **anggaran tidak termasuk** anggaran blokir Rp.2,839,571,000 (dua milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan mencapai **56.93 %** dari total pagu **anggaran termasuk anggran blokir** Rp. 3,739,713,000 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

Pengelolaan anggaran Loka POM di Bungo senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Bungo dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Percepatan pengadaan barang dan jasa
- Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD.

Pada akhir tahun 2025, total anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo sebesar Rp. 3.739.713.000 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan rincian pagu untuk belanja 51 sebesar Rp. 1.159.074.000 (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan realisasi untuk belanja 51 sebanyak Rp. 1.158.785.441 (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) dan mencapai **(99,98%)** dari total pagu anggaran dengan sisa belanja 51 sebesar Rp. 288.559 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah). Pada belanja 52 terdapat pagu sebanyak Rp. 2.423.742.000 (Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) terdapat realisasi sebesar Rp. 1.535.892.533 (Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dengan jumlah blokir Rp. 887.692.000 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) sehingga persentase realisasi terhadap seluruh anggaran termasuk anggaran blokir mencapai (63,37%), namun realisasi terhadap anggaran yang tersedia (di luar blokir anggaran) **realisasi belanja 52 mencapai 99,99%** dan untuk belanja 53 diperoleh pagu sebesar Rp. 156.897.000 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan realisasi **100%** terhadap anggaran tersedia di luar blokir anggaran belanja modal sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Loka POM di Kabupaten Bungo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program *Automatic Adjustment* dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut sebagai berikut:

1. Revisi DIPA pada tanggal 14 Februari 2025

Perihal : Penyampaian Revisi Efisiensi Belanja BPOM Tahun Anggaran 2025

- Jenis Revisi :
- 306 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)
2. Revisi Dipa DJA pada tanggal 18 Maret 2025
- Perihal : Usulan Revisi DIPA Satuan Kerja Badan POM ke-2 Kewenangan Direktorat Jenderal anggaran TA 2025
- Jenis Revisi
- 211 Pemenuhan Belanja Operasional
- 221 Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja
- 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya
- 306 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)
- 315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
3. Revisi Dipa DJA pada tanggal 26 Maret 2025
- Perihal : Usulan Revisi DIPA Satuan Kerja Badan POM ke-3 Kewenangan Direktorat Jenderal anggaran TA 2025
- Jenis Revisi
- 306 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)
4. Revisi Dipa Kanwil pada tanggal 22 April 2025
- Perihal : Usulan Revisi Anggaran
- Jenis Revisi
- 315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
- 325 Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
5. Revisi Dipa KPA pada tanggal 2 Mei 2025
- Perihal : Usulan Revisi Anggaran
- Jenis Revisi
- Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
6. Revisi Dipa KPA pada tanggal 6 Mei 2025
- Perihal : Usulan Revisi Anggaran
- Jenis Revisi
- Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
7. Revisi Dipa KPA pada tanggal 12 Juni 2025
- Perihal : Usulan Revisi Anggaran
- Jenis Revisi
- Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
8. Revisi Dipa KPA pada tanggal 20 Juni 2025

Perihal : Usulan Revisi Anggaran

Jenis Revisi

Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK

9. Revisi Dipa DJA pada tanggal 4 Juli 2025

Perihal : Usulan Revisi Anggaran

Jenis Revisi

211 Pemenuhan Belanja Operasional

221 Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja

306 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)

315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPa

10. Revisi Dipa Kanwil pada tanggal 11 Juli 2025

Perihal : Usulan Revisi Anggaran

Jenis Revisi

315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPa

325 Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK

11. Revisi Dipa KPA pada tanggal 11 Agustus 2025

Perihal : Usulan Revisi Anggaran

Jenis Revisi

Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK

12. Revisi Dipa KPA pada tanggal 11 September 2025

Perihal : Usulan Revisi Anggaran

Jenis Revisi

Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK

13. Revisi Dipa Kanwil pada tanggal 10 Oktober 2025

Jenis Revisi :

224 Pergeseran Anggaran dalam 1 (satu) RO Prioritas Nasional

315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III Dipa

325 Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK

14. Revisi Dipa KPA pada tanggal 16 Oktober 2025

Jenis Revisi :

Usulan Revisi Anggaran

15. Revisi Dipa DJA pada tanggal 28 Oktober 2025

Jenis Revisi :

- 211 Pemenuhan Belanja Operasional
- 221 Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja
16. Revisi Dipa DJA pada tanggal 06 November 2025
- Jenis Revisi :
- 306 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV. A (Blokir)
17. Revisi Dipa pada tanggal 21 November 2025
- Jenis Revisi :
- Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan
18. Revisi Dipa KPA pada tanggal 11 Desember 2025
- Jenis Revisi :
- Revisi Pemutakhiran Data KPA
19. Revisi Dipa KPA pada tanggal 15 Desember 2025
- Jenis Revisi :
- Revisi Pemutakhiran Data KPA

B. Realisasi Anggaran per Sasaran

Berikut ini tabel rincian realisasi anggaran tiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja :

Tabel 107. Rincian realisasi anggaran tiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Volume			Anggaran Per Sasaran Strategis				
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT			106,58			100,11		
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	83,23	106,03	66.997.000	66.994.370	100,00
		2	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	94,8	126,40	14.255.100	14.254.608	100,00
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT	100	0	0,00	9.503.400	9.503.072	100,00
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92,5	108,82	19.006.800	19.006.144	100,00

	5	Persentase keputusan/rekomen dari hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	75,77	105,24	8.271.700	8.296.355	100,30	
	6	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	96,08	117,17 110	5.267.000	5.267.000	100,00	
	7	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	90,76	104,62	33.086.800	33.185.421	100,30	
	8	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	96,6	108,54	41.358.500	41.481.777	100,30	
	9	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,39	98,93	115,86 110	46.625.500	46.748.777	100,26	
	10	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	95,24	119,05 110	47.503.000	47.502.459	100,00	
	11	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	101,61	41.358.500	41.481.777	100,30	
	12	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Labotratorium	11,5	11,97	104,09	113.037.000	113.034.493	100,00	
	13	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Koya Pangan Aman	25	25	100,00	4.751.700	4.751.536	100,00	
2	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT				100,78			99,98	
2	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT	86,83	89,56	103,14	22.372.000	22.357.000	99,94
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	100,00	15.856.000	15.855.000	99,99

	16	Jumlah desa pangan aman	1	1	100,00	45.174.000	45.173.140	100,00	
	17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	30.874.000	30.872.000	99,99	
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT				100,00			100,00	
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17,24	17,24	100,00	4.760.000	4.760.000	100,00
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT				107,53			100,00	
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan ssediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	93	100	107,53	103.303.000	103.303.000	100,00
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT				106,48			99,99	
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	95,83	106,48	11.100.000	11.099.015	99,99
6	Layanan Publik UPT yang prima				109,55			99,65	
6	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4	4,82	109,55	17.862.000	17.800.000	99,65
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal				99,90			99,98	
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai AKIP UPT BPOM	78,39	75,76	96,64	13.927.750	13.934.396	99,98
		23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100,00	989.048.750	988.880.077	99,98
		24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55	2,625	102,94	1.067.538.000	988.880.077	99,98
		25	Persentase implementasi rencana aksi	100	100,00	100,00	78.223.500	78.223.500	100,00

Reformasi Birokrasi
di lingkup UPT

Realisasi anggaran berdasarkan Sasaran Strategis tersaji pada tabel di atas dengan capaian anggaran telah mencapai 99,94%. Dapat terlihat bahwa pada masing-masing sasaran strategis persentase realisasi anggaran paling tinggi pada 100% terkait terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT. Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah tabel realisasi anggaran terhadap kegiatan

No	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Kinerja/Fisik			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Target
a	b	c	d	e	f (e/d*100)	g	h	i (h/g*100)
1	3165.AEA - Koordinasi	001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00%	58.000.000	11.099.015	19,14
2	3165.BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	7	7	100,00%	17.862.000	17.800.000	99,65
3	3165.BDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	95	100,00%	66.204.000	12.546.500	18,95
4	3165.BKB - Pemantauan produk	001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00%	141.000.000	37.718.768	26,75
5	3165.BMB - Komunikasi Publik	001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	24	24	100,00%	35.500.000	9.811.400	27,64
6	3165.CAB - Sarana Bidang Kesehatan	001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00%	100.000.000	91.897.000	91,90
7	3165.CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	4	4	100,00%	65.000.000	64.550.000	99,31
8	3165.PDD - Standarisasi Lembaga	001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	1	100,00%	113.037.000	113.034.493	100,00
9	3165.QCD - Perkara Hukum Badan Usaha	U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	1	1	100,00%	103.303.000	103.303.000	100,00
10	3165.QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	2	100,00%	90.970.000	15.855.000	17,43
11	3165.QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002 - Desa Pangan Aman	1	1	100,00%	146.795.000	45.173.140	30,77

12	3165.QDB - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100,00%	94.865.000	30.872.000	32,54
13	3165.QDG - Fasilitas dan Pembinaan UMKM	001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	5	5	100,00%	39.475.000	4.760.000	12,06
14	3165.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	54	54	100,00%	47.517.000	47.515.361	100,00
15	3165.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	250	250	100,00%	114.500.000	114.500.000	100,00
16	3165.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	17	17	100,00%	10.534.000	10.534.000	100,00
17	3165.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	230	230	100,00%	165.944.000	165.927.106	99,99
18	6384.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	1	0	0,00%	8.000.000	-	0,00
19	6384.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	1	1	100,00%	2.329.310.000	1.954.231.362	83,90

C. Efisiensi dan Efektivitas atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja per Sasaran

Berikut tabel Analisis Efisiensi Kegiatan pada tiap Sasaran Strategis dan Indikator Utama Kinerja:

Tabel 108. Nilai Indeks Efisiensi

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Output (Kinerja)			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori Capaian
				Target	Realisasi TW IV	Capaian (%)	Target	Realisasi TW IV	Capaian (%)			
1	Meningkatnya Efektivitas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT				106,58							
					110				100,11	1,01	0,01	100% Efisien
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	83,23	106,03	66.997.000	66.994.370	100,00	1,06	0,06	100% Efisien

Wilayah Kerja UPT	2	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	94,8	126,40 110	14.255.100	14.254.608	100,00	1,26	0,26	95% Efisien
	3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT	100	0	0,00	9.503.400	9.503.072	100,00	0,00	-1,00	Tidak Efisien
	4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92,5	108,82	19.006.800	19.006.144	100,00	1,09	0,09	100% Efisien
	5	Persentase keputusan/reko mendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	75,77	105,24	8.271.700	8.296.355	100,30	1,05	0,05	100% Efisien
	6	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	96,08	117,17 110	5.267.000	5.267.000	100,00	1,17	0,17	100% Efisien
	7	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	90,76	104,62	33.086.800	33.185.421	100,30	1,04	0,04	100% Efisien
	8	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	96,6	108,54	41.358.500	41.481.777	100,30	1,08	0,08	100% Efisien
	9	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,39	98,93	115,86 110	46.625.500	46.748.777	100,26	1,16	0,16	100% Efisien
	10	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	95,24	119,05 110	47.503.000	47.502.459	100,00	1,19	0,19	100% Efisien
	11	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	101,61	101,61	41.358.500	41.481.777	100,30	1,01	0,01	100% Efisien
	12	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar	11,5	11,97	104,09	113.037.000	113.034.493	100,00	1,04	0,04	100% Efisien

Kemampuan Labotatorium										
13	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	25	25	100,00	4.751.700	4.751.536	100,00	1,00	0,00	100% Efisien
Efektivitas KIE di wilayah kerja UPT				100,78			99,97	1,01	0,01	100% Efisien
14	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT	86,83	89,56	103,14	22.372.000	22.357.000	99,93	1,03	0,03	100% Efisien
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	2	100,00	15.856.000	15.855.000	99,99	1,00	0,00	100% Efisien
16	Jumlah desa pangan aman	1	1	100,00	45.174.000	45.173.140	100,00	1,00	0,00	100% Efisien
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	30.874.000	30.872.000	99,99	1,00	0,00	100% Efisien
pendampingan UMKM dalam standar keamanan				100,00			100,00	1,00	0,00	100% Efisien
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17,24	17,24	100,00	4.760.000	4.760.000	100,00	1,00	0,00	100% Efisien
Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT				107,53			100,00	1,08	0,08	100% Efisien
19	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	93	100	107,53	103.303.000	103.303.000	100,00	1,08	0,08	100% Efisien
kegiatan deteksi kejahatan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT				106,48			99,99	1,06	0,06	100% Efisien

5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	95,83	106,48	11.100.000	11.099.015	99,99	1,06	0,06	100% Efisien
6	Layanan Publik UPT yang prima					109,55			99,65	1,10	0,10	100% Efisien
6	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4	4,82	109,55	17.862.000	17.800.000	99,65	1,10	0,10	100% Efisien
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal					99,90			99,99	1,00	0,00	100% Efisien
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai AKIP UPT BPOM	78,39	75,76	96,64	13.927.750	13.924.396	99,98	0,97	-0,03	Tidak Efisien
		23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100,00	989.048.750	988.880.077	99,98	1,00	0,00	100% Efisien
		24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55	2,625	102,94	1.067.538.000	1.067.369.157	99,98	1,03	0,03	100% Efisien
		25	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100,00	78.223.500	78.223.500	100,00	1,00	0,00	100% Efisien

Pada Tahun 2025 seluruh 7 (tujuh) Sasaran Strategis 100% Efisien. Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

- I. Sasaran Strategis “Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo” dengan capaian anggaran sebesar 100,11% sedangkan capaian kinerja sebesar 109,78 maka hasil TE 0,01 dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini 100% Efisien, hal ini dikarenakan penggunaan anggaran sesuai dengan kinerja yang dilakukan.
1. IKU 1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 106,03% dan %capaian anggaran yaitu 100% dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini sudah Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 1,06 dengan tingkat efisiensi (TE) 0,06 dengan kategori capaian 100%. Hal ini menandakan kegiatan sudah berjalan dengan efektif dan sesuai proporsinya

2. IKU 2. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 126,40% dan % capaian anggaran yaitu 95 % dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini 95% Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 1,26 dengan tingkat efisiensi (TE) 0,26. Hal ini disebabkan karena adanya relaksasi anggaran, sehingga kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang telah disusun kembali. total target pangan olahan dan pirt seluruhnya dikembalikan menjadi 54 sampel.
3. IKU 3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT tidak meperoleh capaian, dikarenakan tidak ada kasus KLB. Pada indikator ini tidak termasuk dilakukan perhitungan NKO. Penggunaan anggaran pada tabel tidak efisien.
4. IKU 4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa % capaian output 108,82% dan %capaian anggaran yaitu 100% dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini 100% Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 1,09 dengan tingkat efisiensi (TE) 0,09. Hal ini disebabkan karena adanya relaksasi anggaran, sehingga kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang telah disusun kembali.
5. IKU 5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 105,24% dan %capaian anggaran yaitu 100,30% dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yang dilaksanakan 100% Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 1,05 dengan tingkat efisiensi (TE) 0,05 dengan kategori capaian efisien.
6. IKU 6. Persentase Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian output 117,17% dan capaian anggaran yaitu

100%, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini “Efisien” dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 1,17 dengan tingkat efisiensi (TE) 0,17.

7. IKU 7. Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 104,62 % dan %capaian anggaran yaitu 100,30% dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yang dilaksanakan 100% Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 1,04 dengan tingkat efisiensi (TE) 0,04 dengan kategori capaian efisien.
8. IKU 8. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 104,62% dan %capaian anggaran yaitu 100,30% dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yang dilaksanakan 100% Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 1,08 dengan tingkat efisiensi (TE) 0,08. dengan kategori capaian efisien.
9. IKU 9. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 115,86% dan %capaian anggaran yaitu 100,26% dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini sudah Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 1,16 dengan tingkat efisiensi (TE) 0,16 dengan kategori capaian 100%. Hal ini menandakan bahwa kegiatan dan penggunaan anggaran telah terlaksana sesuai target dan sudah berjalan dengan efisien.
10. IKU 10. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output sebesar 119,05% dan capaian anggaran yaitu 100% yang dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini sudah Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 1,19 dengan tingkat

efisiensi (TE) 0,19 dengan kategori capaian 100% efisien. Hal ini menandakan bahwa kegiatan telah berjalan dengan efisien.

11. IKU 11 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 101,61% dan %capaian anggaran yaitu 100,30% dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 100% Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 1,01 dengan tingkat efisiensi (TE) 0,01 dengan kategori capaian efisien.
12. IKU 12 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 104,09% dan %capaian anggaran yaitu 100% dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini sudah Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 1,04 dengan tingkat efisiensi (TE) 0,04 dengan kategori capaian 100% Efisien. Hal ini menandakan bahwa kegiatan capaian pemenuhan nilai laboratorium Loka POM di Kabupaten Bungo dengan penggunaan anggaran telah terlaksana sesuai target dan sudah berjalan dengan efisien. Penggunaan anggaran yang dilakukan dalam pemenuhan cara melakukan pembelian alat gelas, reagen, dan keperluan laboratorium lainnya, melakukan pemeliharaan seperti kalibrasi alat dalam mendukung terlaksananya pengujian ruang lingkup obat dan pangan dengan akurat yang telah direncanakan. Kemudian anggaran digunakan untuk peningkatan kompetensi petugas yang mana mendukung kompetensi laboratorium.
13. KU 13 indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman ditargetkan sebanyak 25 kabupaten/kota dan hingga akhir periode pelaporan (TW IV) terealisasi seluruhnya sebanyak 25 kabupaten/kota atau mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan ketepatan perencanaan kegiatan dalam mendukung sasaran strategis organisasi. Dari sisi anggaran, dialokasikan sebesar Rp4.751.700 dengan realisasi Rp4.751.536 atau sebesar 100% dari pagu, yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang cermat dan terkendali. Perbandingan antara

capaian output dan realisasi input menghasilkan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,00 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,00 dengan kategori 100% Efisien, sehingga secara keseluruhan pelaksanaan indikator ini dapat dinilai efektif, efisien, dan akuntabel karena target kinerja tercapai secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang proporsional.

- II. Sasaran Strategis “Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo” dengan capaian anggaran sebesar 99,97% sedangkan capaian kinerja sebesar 100,78 dengan hasil TE 0,01 dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini 100% Efisien

14. IKU 14. Meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo pada Tahun 2025 telah terealisasi sebesar 99,93% dengan kategori **100% efisien**. Penggunaan sumber anggaran pada IKU ini memiliki capaian indeks efisiensi (IE) sebesar 1,03 dengan tingkat efisiensi (TE) 0,03. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan KIE berjalan sangat optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Optimalisasi anggaran dilakukan secara efektif, termasuk dengan memaksimalkan pemanfaatan media sosial dan platform daring sebagai strategi efisiensi tanpa mengurangi kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Adapun pagu anggaran KIE Tahun 2025 sebesar Rp22.357.000 dengan realisasi sebesar Rp22.372.000. Realisasi anggaran tersebut sejalan dengan capaian indeks efektivitas KIE yang memenuhi target sasaran.

15. IKU 15. Sasaran Strategis “*Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT*” diukur melalui indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada sasaran meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT ditargetkan sebanyak 2 sekolah dan hingga TW IV terealisasi seluruhnya sebanyak 2 sekolah atau mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dalam mendorong pembudayaan keamanan pangan di lingkungan sekolah telah dilaksanakan secara optimal sesuai perencanaan. Dari sisi anggaran, dialokasikan

sebesar Rp15.856.000 dengan realisasi Rp15.855.000 atau sebesar 99,99%, yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien dan terkendali tanpa mengurangi capaian output. Perbandingan antara output dan input menghasilkan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,00 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,00 dengan kategori 100% Efisien, sehingga secara keseluruhan pelaksanaan indikator ini dapat dinilai efektif, efisien, dan akuntabel.

16. IKU 16 indikator Jumlah Desa Pangan Aman dalam rangka meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT ditargetkan sebanyak 1 desa dan hingga TW IV terealisasi sebanyak 1 desa atau mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam mewujudkan desa pangan aman telah dilaksanakan sesuai perencanaan serta mendukung penguatan pemberdayaan masyarakat dalam aspek keamanan pangan. Dari sisi anggaran, dialokasikan sebesar Rp45.174.000 dengan realisasi sebesar Rp45.173.140 atau mencapai 100%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang tertib, tepat guna, dan terkendali. Perbandingan antara capaian output dan penggunaan input menghasilkan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,00 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,00 dengan kategori 100% Efisien, sehingga pelaksanaan indikator ini secara keseluruhan dapat dinilai efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.
17. IKU 17 Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas ditetapkan dengan target 1 pasar dan hingga akhir periode pelaporan (TW IV) telah terealisasi 1 pasar atau mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembinaan, pendampingan, serta implementasi prinsip keamanan pangan pada pasar berbasis komunitas telah dilaksanakan secara menyeluruh sesuai tahapan perencanaan, mulai dari koordinasi dengan pengelola pasar, edukasi kepada pelaku usaha, hingga pemenuhan komponen keamanan pangan. Dari sisi anggaran, kegiatan ini didukung alokasi sebesar Rp30.874.000 dengan realisasi Rp30.872.000 atau 99,99%, yang menandakan adanya efisiensi dalam penggunaan dana tanpa mengurangi kualitas maupun ruang lingkup kegiatan. Perbandingan antara capaian output dan penggunaan input menghasilkan Indeks Efisiensi

(IE) sebesar 1,00 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,00 dengan kategori 100% Efisien, yang berarti pelaksanaan kegiatan berjalan seimbang antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang diperoleh. Secara keseluruhan, indikator ini mencerminkan pelaksanaan program yang efektif, efisien, dan akuntabel serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan penerapan keamanan pangan di tingkat komunitas.

III. Sasaran Strategis “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”, terdapat 1 IKU yaitu,

18. IKU 18 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan. Berdasarkan data capaian kinerja Tahun 2025, persentase UMKM yang didampingi dan berhasil memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat/Kosmetik yang Baik dan/atau Izin Penerapan CPPOB (IP CPPOB) pangan olahan mencapai **107,53%**, melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara itu, capaian realisasi anggaran mencapai **100%** dengan kategori “**Efisien**”, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dihasilkan melebihi target dengan penyerapan anggaran yang optimal. Nilai **Indeks Efektivitas (IE) sebesar 1,00** dengan **Tingkat Efektivitas (TE) sebesar 0,00** menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan, tanpa deviasi yang signifikan antara output dan sumber daya yang digunakan. Strategi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara adaptif melalui kombinasi metode **daring dan hybrid**, antara lain melalui Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis (Bimtek) IP CPPOB bagi UMK secara hybrid, pendampingan UMKM secara daring, serta optimalisasi layanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin. Pendekatan ini memungkinkan perluasan jangkauan pembinaan, peningkatan efektivitas waktu, serta efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pendampingan kepada pelaku usaha.

- IV. Sasaran Strategis Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT yang terdiri dari 1 Indikator yaitu
 19. IKU 19 Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan ssediaan farmasi dan pangan olahan di UPT memiliki total anggaran sebesar Rp 103.303.000 yang sudah terealisasi sebesar Rp 103.303.000 sampai dengan Tahun 2025. Berdasarkan data yang telah tersaji diatas capaian output kinerja sebesar 107,53% sedangkan capaian anggaran sebesar 100% dengan kategori capaian “Efisien”. Hal ini karena penanganan perkara sudah selesai dilakukan hingga Tahap II.
- V. Sasaran Strategis Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT yang terdiri dari 1 Indikator yaitu
 20. IKU 20 Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan ssediaan farmasi dan pangan olahan di UPT memiliki total anggaran sebesar Rp 11.100.000 yang sudah terealisasi sebesar Rp 11.099.015 sampai dengan Tahun 2025. Berdasarkan data yang telah tersaji diatas capaian output kinerja sebesar 106,48% sedangkan capaian anggaran sebesar 99,99% dengan kategori capaian “Efisien”. IKU ini akan berlanjut dan bersifat akumulatif karena penilai direktorat cegah tangkal akan dilakukan di akhir tahun.
- VI. Sasaran Strategis “Layanan Publik UPT yang Prima” dengan indikator
 21. IKU 21 indikator Indeks Pelayanan Publik UPT ditetapkan dengan target sebesar 4,4 dan hingga TW IV terealisasi sebesar 4,82 atau mencapai 109,55%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang melampaui target, yang mencerminkan perbaikan pada aspek standar pelayanan, kecepatan layanan, transparansi, serta tingkat kepuasan pengguna layanan. Dari sisi anggaran, kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp17.862.000 dengan realisasi sebesar Rp17.800.000 atau 99,65%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien dan terkendali. Perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran menghasilkan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,10 dan Tingkat Efisiensi (TE)

sebesar 0,10 dengan kategori 100% Efisien, yang berarti peningkatan kinerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang proporsional bahkan lebih optimal dari yang direncanakan. Secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan pelaksanaan program yang sangat efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan publik.

VII. Sasaran Strategis 7 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, terdiri dari 4 indikator kinerja, secara keseluruhan pada sasaran strategis realisasi anggaran 99,65%, dapat disimpulkan 100% Efisien.

22. IKU 22. Nilai AKIP UPT BPOM Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 terdapat capaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat BPOM. Evaluasi SAKIP Loka POM di Kabupaten Bungo untuk di tahun 2025 dilaksanakan pada September 2025. Capaian Anggaran pada Tahun 2025 mencapai Rp. 13.924.396 atau sebesar 99,98% sehingga dapat disimpulkan penggunaan sumber daya pada IKU Nilai AKIP UPT BPOM tidak efisien dengan indeks efisiensi (IE) sebesar 0,97 dan Tingkat efisiensi (TE) sebesar -0,03.

23. IKU 23. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 terdapat capaian kinerja saat Akhir Tahun berjalan. Capaian Anggaran pada Tahun 2025 mencapai Rp. 988.880.077 atau sebesar 99,96% sehingga dapat disimpulkan penggunaan sumber daya pada IKU Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM efisien dengan indeks efisiensi (IE) sebesar 0 dan Tingkat efisiensi (TE) sebesar 1. Hal ini disebabkan karena berdasarkan tagging anggaran pada IKU Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, terdapat realisasi anggaran berdasarkan komponen Gaji dan Tunjangan, serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor dari bulan Januari s.d. Desember 2025.

24. IKU 24. Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM realisasi capaian kinerja 102,94 dengan realisasi anggaran sebesar 99,98%. Nilai TE 0,03 sehingga dapat disimpulkan kegiatan 100% efisien.

25. IKU 25 ndikator Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT ditetapkan sebesar 100% dan hingga TW IV terealisasi 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan target yang ditetapkan, mencerminkan komitmen organisasi dalam memperkuat sistem tata kelola, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas manajemen internal. Dari sisi anggaran, dialokasikan sebesar Rp78.223.500 dengan realisasi sebesar Rp78.223.500 atau 100%, yang menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan tepat dan terkendali. Hasil perbandingan antara capaian output dan realisasi input menghasilkan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,00 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,00 dengan kategori 100% Efisien, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung seimbang antara penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai. Secara keseluruhan, indikator ini mencerminkan kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal. Pencapaian tersebut didukung oleh koordinasi antar-subtim RB, pemantauan capaian secara berkala, serta pemanfaatan sumber daya internal secara optimal. Efisiensi anggaran juga diperoleh melalui penggunaan fasilitas kantor untuk kegiatan monitoring dan digitalisasi pelaporan. Dengan demikian, kegiatan reformasi birokrasi dapat terlaksana efektif, efisien, dan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Kendala

4.3 Rekomendasi



BAB IV PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 mengukur pencapaian kinerja tahun 2025 berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2025. Secara umum Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun berhasil mencapai target kinerja tahunan yang telah ditetapkan. Berikut rincian nilai kategori yang diperoleh oleh masing masing IKU pada 7 Sasaran Strategis:

1. Capaian Indikator pada sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dengan capaian sebesar 106,58% Sangat Baik. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target pada sasaran strategis ini dengan berkelanjutan melakukan koordinasi secara rutin kepada Balai Penguji Regional serta melakukan penyusunan target sampling dan pengujian berdasarkan pedoman sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA).
2. Secara keseluruhan, capaian efektivitas KIE pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai kinerja mencapai 100,78%. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi pelaksanaan kegiatan KIE yang adaptif dan terencana, baik melalui metode daring maupun tatap muka langsung di ruang publik. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta koordinasi yang solid di lingkungan Loka POM di Kabupaten Bungo menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Dengan capaian ini, diharapkan upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dapat terus berlanjut dan semakin berdampak luas di triwulan berikutnya.
3. Capaian pendampingan UMKM Pangan Olahan pada Tahun 2025 mencapai 100%, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah

berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang positif. Meskipun sebagian kegiatan dilakukan secara daring akibat efisiensi anggaran, pelaku usaha tetap menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti sosialisasi dan pendampingan, serta dalam upaya mendaftarkan produknya ke BPOM. Capaian ini menggambarkan komitmen Loka POM di Kabupaten Bungo dalam mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan penerapan prinsip keamanan pangan, sehingga mampu menghasilkan produk pangan olahan yang aman, bermutu, dan memiliki izin edar yang sah.

4. Capaian Indikator pada sasaran strategis Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dengan capaian 107,53 diperoleh kriteria Sangat Baik. Upaya yang dilakukan yaitu menyelesaikan perkara sesuai dengan tahapan yang ada hingga selesai Tahap II.
5. Capaian Indikator pada sasaran strategis Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dengan capaian Baik Upaya yang dilakukan yaitu adaptif terhadap sistem pelaporan baru laporan siber dan laporan profiling kejahatan dengan capaian 106,48%.
6. Indikator pada sasaran strategis Layanan Publik UPT yang prima dengan capaian sangat baik sebesar 109,55%.
7. Capaian Indikator pada sasaran strategis Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal di Kabupaten Bungo dengan capaian Baik 99,90%. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan monitoring terhadap implementasi dan tercapainya terkait reformasi birokrasi.

3.2 KENDALA

Secara umum capaian kinerja sasaran sesuai perjanjian kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada kendala yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Bungo antara lain :

1. Kurangnya jumlah tenaga pengawas inspeksi dan sertifikasi dibandingkan dengan jumlah sarana yang menjadi target Loka POM di Kabupaten Bungo
2. Luasnya wilayah dan kondisi demografi Provinsi Jambi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi keterjangkauan dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Kurang optimalnya pengawasan Obat dan Makanan oleh Lintas Sektor yang seharusnya juga merupakan tugas dan tanggung jawabnya karena memiliki tugas dan fungsi lain.
4. Adanya kebocoran informasi dalam kegiatan penindakan tindak pidana Obat illegal oleh oknum ekspedisi.
5. Pengelolaan kinerja anggaran yang belum optimal. Halaman III DIPA belum dilakukan perencanaan secara maksimal. Terdapat capaian kinerja output dan outcome yang belum maksimal.
6. Pengambilan sampel yang belum sesuai dengan pedoman sampling dan terjadi beberapa kali kesalahan pengiriman sampel yang tidak sesuai dengan balai tujuan.

3.3 REKOMENDASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk berkomitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/ kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM untuk pengawasan Obat dan Makanan
3. Agar mendapatkan halaman III DIPA yang baik, diharapkan melakukan monitoring Rutin Halaman III DIPA setiap bulannya dengan rapat evaluasi rutin dan melakukan revisi secara cermat dan tepat.
4. Pengelolaan kinerja anggaran yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk mencapai kinerja yang maksimal

5. Sampel disampling sesuai dengan perencanaan sampling yang sudah sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2024, serta menyesuaikan jadwal pengujian untuk sampel regional.
6. Aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Balai penguji sampel mengenai kemampuan uji serta ketersediaan reagen untuk pengujian jika terjadi perubahan terhadap perencanaan sampling.



LAMPIRAN

